

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 JUNI 2009

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pembangunan dalam era otonomi daerah menuntut perencanaan yang bisa memberi arahan dalam menata perubahan menuju perwujudan visi bersama. Arahan demikian sangat urgen mengingat lingkungan strategis tatanan demikian kompleks dan dinamis. Tanpa arahan sebuah tatanan bisa larut dalam perubahan yang dideterminasi lingkungan strategisnya, sehingga tatanan tersebut dapat kehilangan identitas dirinya. Secara internal, aspirasi unsur tatanan juga sangat kompleks dan dinamis, dibutuhkan arahan untuk mewadahi kompleksitas dan dinamika aspirasi tersebut menuju perwujudan visi bersama.

Kota Parepare adalah sebuah tatanan yang merupakan bagian dari tatanan besar Sulawesi Selatan dan Indonesia, dengan perubahan yang demikian kompleks dan dinamis, dan dengan itu membutuhkan arahan dalam menata perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Berdasarkan arahan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD sebagai arahan pembangunan di daerah untuk lima tahun ke depan. Dalam kerangka itu, RPJMD Kota Parepare 2008-2013 disusun sebagai arahan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

RPJMD Kota Parepare 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan kombinasi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. RPJMD ini bukan hanya merupakan penggarisan bagi program-program sektoral SKPD, ia juga merupakan dokumen pembangunan wilayah yang memberi penggarisan bagi kontribusi prakarsa dan swadaya masyarakat bagi perwujudan visi, tujuan dan sasaran bersama.

**B. Maksud dan Tujuan**

RPJMD Kota Parepare 2008-2013 ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan maksud untuk menjadi arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Parepare sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 adalah untuk:

1. Menyediakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai kesatuan dan kesamaan arah dalam upaya pembangunan;
2. Menyediakan rumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah dalam skala prioritas yang lebih tajam dan dapat dijadikan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama lima tahun;
3. Menyediakan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi program dan kegiatan yang akan dituang dalam APBD dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare;
4. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai baik oleh APBN maupun APBD;
5. Menyediakan bahan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare.

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013;
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor       Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

#### **D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013 mempunyai kaitan erat dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013. Secara substansial tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan serta strategi dan kebijakan yang akan dijalankan pada RPJMD Kota Parepare yaitu dengan memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan. Keterkaitan ini untuk menjamin konsistensi arah dan upaya pembangunan antara tingkat Kota Parepare dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan pada gilirannya dengan tingkat Nasional.

Selain itu, RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013 mempunyai hubungan dengan RPJPD Kota Parepare 2005-2025. Dokumen ini merupakan penjabaran dari arahan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan yang terdapat dalam RPJPD dan mengoperasionalkan arahan periodik RPJMD Kedua dalam RPJPD tersebut.

Dari segi keruangan, RPJMD Kota Parepare 2008-2013 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2008-2028. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan dalam RPJMD.

RPJMD Kota Parepare 2008-2013 selanjutnya akan menjadi acuan bagi Renstra SKPD dalam lingkup Kota Parepare. Selain itu, RPJMD ini akan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dimana dokumen RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

- Bab I. *Pendahuluan*, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II. *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, berisi Kondisi Geografis, Kondisi Perekonomian Daerah, Kondisi Sosial Budaya Daerah, Kondisi Prasarana dan Sarana Daerah serta Kondisi Pemerintahan Umum.
- Bab III. *Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan*, berisi uraian tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan bagi penyelenggaraan pembangunan.
- Bab IV. *Analisis Isu-Isu Strategis Daerah*, berisi kajian tentang proyeksi peluang dan ancaman serta proyeksi kekuatan dan kelemahan dalam lima tahun ke depan disertai dengan identifikasi isu strategis.
- Bab V. *Visi dan Misi Pembangunan*, berisi formulasi visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut.
- Bab VI. *Strategi dan Arah Kebijakan*, berisi uraian tentang Strategi dan Arah Kebijakan dalam menjalankan misi.
- Bab VII. *Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah*, berisi uraian tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VIII. *Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan*, berisi tentang program pembangunan daerah dalam bentuk rencana kerja kerangka regulasi dan rencana kerja kerangka pendanaan (dalam bentuk matriks) disesuaikan dengan sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Parepare, maupun pendanaan lainnya.
- Bab IX. *Indikator Kinerja Daerah*, berisi uraian tentang indikator kinerja daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan.
- Bab X. *Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan*, berisi arahan tentang pelaksanaan pembangunan pada transisi pemerintahan Tahun 2013 serta kaidah pelaksanaan dari RPJMD ini.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### A. KONDISI GEOMORFOLOGIS

##### 1. Letak Geografis, Luas wilayah dan Batas Administrasi Daerah

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara  $3^{\circ} 57' 39''$  -  $4^{\circ} 04' 49''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 36' 24''$  -  $119^{\circ} 43' 40''$  Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT).

Luas wilayah Kota Parepare adalah  $\pm 99,33 \text{ Km}^2$ , dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.

##### 2. Topografi dan Geologi

Kota Parepare berada pada ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah dominan berbukit, topografi dengan kelas lereng 2 - 15% mencakup 34% total wilayah, kemiringan lereng 15 - 40% sebanyak 22%, dan wilayah dengan kemiringan lereng diatas 40% sebanyak 32,17%. Topografi bergelombang dan perbukitan ini terletak pada bagian selatan kota mendekati kearah pantai. Sedangkan wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk.

Formasi geologi Kota Parepare terdiri dari struktur batuan endapan alluvial, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral. Selain itu terdapat juga batu gunung api Parepare seperti tufu, breksi, konglomerat, dan lava. Jenis tanah antara lain *regosol*, yakni tanah yang memiliki tekstur kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki *solum* yang dangkal serta tanah *alluvial* yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan. Keasaman tanah bervariasi antara pH 5,6 - 7,5.

Penggunaan lahan pada topografi wilayah tersebut terdiri dari hutan 39,17%, tegalan 22,88%, padang rumput 20,40%, sawah 10,00%, perumahan sebanyak 4,41%, jalan 1,42%, jasa 0,70%, perusahaan 0,59%, dan yang terkecil industri 0,17%.

### 3. Hidrologi dan Klimatologi

Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu sumur dalam P-2B Soreang, P-1D Harapan, P-5B Wekke'e dan P-4B Takkalao serta P-2C Soreang yang jumlah seluruh kapasitasnya mencapai 100 liter/detik. Untuk tanah dangkal berasal dari sumber Labatu dengan kapasitas 145 liter/detik. Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Bawah Tanah, 2001 – 2007

Air Bawah Tanah	2001 ltr/dt	2002 ltr/dt	2003 ltr/dt	2004 ltr/dt	2005 ltr/dt	2006 ltr/dt	2007 ltr/dt
Sumur Dalam P-1 D Harapan	13,56	13,25	11,26	8,77	7,40	5,82	-
Sumur Dalam P-1 E Harapan	15,10	15,85	14,68	14,38	12,98	12,52	12,16
Sumur Dalam P-2 B Soreang	16,79	-	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-2 C Soreang	9,02	9,47	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-2 E Soreang	-	-	13,37	12,56	9,52	-	-
Sumur Dalam P-2 F Soreang	-	-	14,67	15,35	16,72	16,68	16,57
Sumur Dalam P-4 B Takkalao	12,56	10,40	7,23	5,13	6,20	-	-
Sumur Dalam P-4 C Takkalao	-	-	-	-	16,08	16,68	17,59
Sumur Dalam P-5 B Wekke'e	12,71	10,64	12,40	14,37	14,11	12,37	15,31
Sumur Dangkal Labatu	5	5	5	5	5	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>79,33</b>	<b>78,61</b>	<b>75,56</b>	<b>88,01</b>	<b>69,07</b>	<b>66,63</b>

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare, 2007

Gambaran perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan, 2001 - 2007.

Air Permukaan	2001 ltr/dt	2002 ltr/dt	2003 ltr/dt	2004 ltr/dt	2005 ltr/dt	2006 ltr/dt	2007 ltr/dt
IPA I Sungai Karajae	16,72	16,34	16,34	16,33	16,29	15,07	39,19
IPA II Sungai Karajae	13,02	12,92	13,11	14,09	16,02	15,09	16,98
IPA III Sungai Karajae	-	16,11	10,45	6,43	8,18	9,42	16,57
IPA IV Sungai Karajae	-	-	-	-	12,90	14,62	16,41
IPA V Sungai Karajae	-	-	9,10	10,57	8,80	9,17	17,32
Jumlah	29,74	45,37	49,00	47,42	62,19	63,37	106,47
Total Kapasitas Produksi	114,48	124,47	127,61	122,98	150,20	132,44	173,10

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare, 2007.

Gambaran perkembangan produksi air baik yang terpakai maupun tidak terpakai dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Produksi air (dalam M<sup>3</sup>) Kota Parepare, 2002-2007.

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Air diproduksi	3.034.643	3.180.587	3.373.278	3.462.507	3.550.198	3.804.638
Air terjun	2.365.708	2.461.099	2.638.979	2.690.076	2.789.678	2.934.215
Air tidak terjual						
- Pengurusan Pipa	538	107	928	-	-	1.170
- Pemadam Kebakaran	211	199	309	1.048	1.656	1.330
Tingkat Kehilangan Air (M <sup>3</sup> )	668.186	719.182	733.062	771.383	758.864	867.923
- Prosentase	22.02	22.61	21.73	22.28	21.46	22.81

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare, 2007.

Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai Karajae. Sungai ini mempunyai debit air 100 liter/detik pada musim kemarau dan 500 liter/detik pada musim hujan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan.

Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 m yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah.

Kondisi iklim dan cuaca Kota Parepare berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi menunjukkan tipe iklim C2 (Schmidt-Ferguson) yaitu jumlah bulan basah 5 - 6 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut menempati wilayah bagian barat sampai pesisir pantai seluas  $\pm 60\%$  dari luas Kota Parepare. Tipe iklim D2 (Oldeman) yaitu jumlah bulan basah 3 - 4 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Zona iklim tersebut menempati wilayah bagian timur Kota Parepare seluas kurang 40% dari luas wilayah Kota Parepare. Curah hujan tertinggi adalah 556 mm/tahun dan yang terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki.

Rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar  $28,5^{\circ}\text{C}$  dengan suhu minimum  $25,6^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum  $31,5^{\circ}\text{C}$ , rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5 - 5,8 m/detik yang bertiup dari arah barat ke timur selama bulan November sampai April. Kota Parepare mempunyai dua jenis musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada bulan November - April dan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei - Oktober setiap tahunnya, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada daerah lain di Indonesia.

#### **4. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya**

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit ikonos tahun 2005 tentang rincian luas dan prosentase jenis penggunaan lahan di wilayah Kota Parepare, terdapat 30 jenis penggunaan lahan ditambah satu kelas jenis penggunaan lahan lainnya dan satu kelas lahan hasil reklamasi. Dengan adanya tambahan lahan hasil reklamasi pantai, maka luas wilayah daratan Kota Parepare bertambah dari 9.933,00 hektar menjadi 9.934,75 hektar. Lahan reklamasi pantai penting mendapat perhatian, karena memberikan pengaruh terhadap luas wilayah administrasi. Jenis penggunaan lahan Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 4.

Jenis penggunaan lahan yang paling luas adalah kawasan hutan yang mencapai 2.551,19 hektar atau setara 25,68% dari luas total wilayah Kota Parepare. Kawasan hutan tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Bacukiki. Berdasarkan urutan luasnya kawasan hutan, jenis penggunaan lahan yang memiliki luas cukup besar adalah kebun campuran, ladang/tegalan, semak belukar dan sawah.

Jenis-jenis penggunaan lahan lainnya yang signifikan luasnya di Kota Parepare adalah wilayah permukiman 800,88 hektar, jaringan jalan raya 150,47 hektar, kawasan perkantoran 105,77 hektar, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan, informasi luas masing-masing jenis penggunaan lahan tersebut berbeda dengan data statistik yang sudah biasa digunakan sebagai acuan. Hal ini disebabkan karena data statistik biasanya didasarkan pada status lahan



yang tercatat secara formal, sedangkan hasil interpretasi citra satelit penginderaan jauh menunjukkan kondisi faktual dan aktual kondisi lahan dilapangan.

Tabel 4. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Parepare

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Gardu Induk Listrik	1,51	0,02
2	Hutan	2.551,19	25,68
3	Jaringan Jalan	150,47	1,51
4	Kawasan Fasilitas Umum	2,81	0,03
5	Kawasan Olahraga	6,61	0,07
6	Kawasan Pasar	4,45	0,05
7	Kawasan Pelabuhan	4,67	0,05
8	Kawasan Pemakaman	5,16	0,05
9	Kawasan Pendidikan	54,56	0,55
10	Kawasan Pergudangan/Pabrik/Industri	25,90	0,26
11	Kawasan Perkantoran	105,77	1,06
12	Kawasan Pemukiman	800,88	8,06
13	Kawasan Pertambangan	12,19	0,12
14	Kawasan Pertokoan	19,57	0,20
15	Kawasan Peternakan	14,69	0,15
16	Kawasan Terminal	5,17	0,05
17	Kawasan Wisata	17,46	0,18
18	Kebun Campuran	1.649,45	16,61
19	Ladang/Tegalan	1.208,97	12,17
20	Lahan Terbuka	9,86	0,10
21	Perkebunan	697,69	7,02
22	Rumah Sakit/Puskesmas	7,20	0,07
23	Sawah	1.167,08	11,75
24	Semak Belukar	1.177,02	11,85
25	Sungai	99,53	1,00
26	Taman Kota	2,03	0,02
27	Tambak	116,83	1,18
28	Tempat Pembuangan Sampah	4,14	0,04
29	Tempat Peribadatan	3,66	0,04
30	Tempat Pelelangan Ikan	0,03	0,00
31	Lahan Lainnya	6,36	0,06
	Jumlah	9.933,00	100,00
32	Kawasan Reklamasi	1,75	0,02
	Jumlah (baru)	99.34,74	100,02

Sumber Data : Pengembangan data dasar pembangunan Kota Parepare berbasis GIS,kerjasama LAPAN dengan Bappeda Kota Parepare, 2006

## **5. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsinya tidak diperkenankan adanya kegiatan manusia. Kawasan lindung terbagi atas: 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air); 2) kawasan perlindungan setempat (kawasan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan pantai); dan 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kawasan hutan lindung yang dapat di tetapkan adalah DAS Karajae, yaitu kawasan yang berada di DAS hulu (Salo Camming, Kabupaten Sidrap) dan DAS tengah Karajae, dimana fungsinya sebagai kawasan lindung serta sebagai daerah resapan air, sehingga dapat dipertahankan sebagai kawasan non budidaya. Selain itu, penetapan DAS Karajae sebagai kawasan lindung karena sangat dipengaruhi oleh beberapa sumber mata air yang debit airnya semakin berkurang karena perambahan hutan di bagian tengah DAS Karajae.

Selain DAS Karajae yang diharapkan menjadi kawasan lindung, masih terdapat beberapa hutan yang dapat dimasukkan kedalam kategori kawasan lindung, yaitu Hutan Kota Jompie, Hutan Konservasi Alitta dan beberapa kawasan hutan yang masih lebat di Kecamatan Bacukiki. Dengan ditetapkannya kawasan-kawasan tersebut, maka perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya dapat terjaga dan lestari.

## **6. Kawasan Rawan Bencana**

Kota Parepare memiliki beberapa daerah rawan yang sangat berpotensi dan memungkinkan untuk terancam bencana, seperti wilayah Kelurahan Lumpue yaitu poros jalan menuju kota sebelah selatan jembatan di Sungai Sumpang Minangae dan wilayah Kelurahan Labukkang yang keduanya rawan terhadap banjir. Sementara daerah rawan longsor terdapat di wilayah Kelurahan Lumpoe, Lumpue, Watang Bacukiki, Bumi Harapan dan Kelurahan Lemoe. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut berada pada daerah pesisir dan sebagian lagi pada lereng 40% dengan vegetasi yang tidak mendukung.

Bencana lainnya yang biasa terjadi di Kota Parepare adalah bencana kebakaran akibat dari kelalaian manusia. Wilayah yang sering terkena bencana kebakaran ini berada di daerah-daerah padat pemukiman dengan letak yang tidak teratur, kondisi rumah panggung permanen dan non permanen, serta tidak dilengkapi dengan prasarana jalan yang cukup lebar, sehingga bila terjadi bencana kebakaran, akan menyulitkan petugas-petugas pemadam kebakaran melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 1997, bencana alam yang pernah terjadi di Kota Parepare adalah berupa gempa bumi yang tepatnya terjadi di kawasan pesisir Pantai Parepare dan memiliki skala getaran yang kecil. Akan tetapi, akibat dari gempa tersebut menimbulkan beberapa patahan-patahan tanah dan menyebabkan adanya bangunan yang mengalami keretakan, tetapi tidak sampai merobohkan bangunan dan rumah penduduk.

Menurut informasi yang diperoleh dari pusat kejadian gempa yaitu berada di Kabupaten Pinrang yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare.

## B. PEREKONOMOMIAN DAERAH

### 1. Struktur Ekonomi

Dalam kurun waktu 2003 - 2007 tidak terjadi pergeseran secara mendasar struktur perekonomian Kota Parepare. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) tetap berperan sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Parepare, dengan kontribusi rata-rata sebesar 27,80 persen pertahun. Selain sektor perdagangan, hotel dan restoran, terdapat tiga sektor lain yang setiap tahunnya memberikan kontribusi lebih dari 10 persen terhadap pembentukan angka total PDRB yakni sektor angkutan dan komunikasi (sektor 7), sektor bank dan lembaga keuangan (sektor 8), dan sektor jasa-jasa (sektor 9). Berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan Kota Parepare sebagai "Kota Niaga" sudah sesuai, hal ini dapat dilihat karena keterkaitan antar sektor cukup signifikan dengan didukung kelancaran transportasi, komunikasi dan juga pelayanan jasa.

Gambaran struktur PDRB Kota Parepare menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2007 (Juta).

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	49.399,79	55.731,16	61.731,16	70.229,03	79.714,44
2	Pertambangan dan penggalian	2.109,16	2.347,14	2.621,79	2.977,00	3.446,64
3	Industri Pengolahan	20.017,09	22.055,55	24.503,49	27.339,27	30.631,77
4	Listrik & Air Bersih	9.146,46	10.127,61	11.437,70	13.223,97	14.991,50
5	Bangunan	56.234,48	63.697,68	73.161,87	81.090,35	97.334,20
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	165.821,85	186.372,75	217.646,94	246.719,41	298.257,85
7	Angkutan dan Komunikasi	147.906,11	165.634,89	192.946,38	218.563,47	250.095,68
8	Bank dan Lembaga Keuangan	70.497,70	86.467,62	91.750,75	106.833,82	133.587,03
9	Jasa-jasa	75.261,61	86.898,71	110.650,70	135.582,78	155.376,27
Total Sektor		596.394,25	679.187,71	786.090,78	902.559,09	1.063.435,38

Sumber : BPS Kota Parepare, 2008

Sembilan sektor ekonomi yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor ekonomi utama yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalan. Sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor tersier terdiri dari sektor keuangan, persewaan dan perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Berdasarkan Tabel 5, jika perekonomian Kota Parepare dikelompokkan ke dalam tiga sektor perekonomian diperoleh kesimpulan bahwa perekonomian Kota Parepare didominasi oleh sektor sekunder dengan kontribusi berkisar 65 persen.

Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 6, distribusi pendapatan regional bruto Kota Parepare menunjukkan porsi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan komunikasi merupakan yang terbesar dibanding sektor lainnya.

Tabel 6. Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2007

No.	Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
1	Pertanian	8,28	8,18	7,81	7,88	7,50	7,93
2	Pertambangan & Penggalan	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,33
3	Industri Pengolahan	3,35	3,25	3,12	3,07	2,88	3,02
4	Listrik & Air Bersih	1,53	1,49	1,46	1,48	1,41	1,45
5	Bangunan	9,42	9,38	9,31	9,10	9,15	9,19
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,80	27,44	27,69	27,67	28,05	27,80
7	Angkutan dan Komunikasi	24,80	24,39	24,55	24,52	23,52	24,20
8	Bank & Lembaga Keuangan	11,82	12,73	11,67	11,87	12,56	12,03
9	Jasa-jasa	12,62	12,79	14,08	14,09	14,61	14,26

Sumber : BPS Kota Parepare, 2008

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah tersebut dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi yang terus meningkat kepada penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya dari barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai

prestasi dan kesuksesan suatu daerah serta kemampuan daerah untuk mengendalikan kegiatan ekonomi jangka panjang.

Angka PDRB dan PDRB perkapita merupakan indikator dari rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan indikator dasar dari perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Hasil perhitungan PDRB Kota Parepare menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat, walaupun perkembangannya masih berfluktuasi, termasuk kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan dan kontribusi PDRB Parepare terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Nilai PDRB Propinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2003 - 2007

Tahun	Nilai (Rp. Juta)		Prosentase terhadap Sulsel (%)
	Sulawesi Selatan	Parepare	
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	39.414.559,01	596.394,15	1,51
2004	44.744.532,59	679.187,08	1,52
2005	52.042.724,45	786.090,78	1,52
2006	60.902.823,80	902.559,10	1,48
2007	69.271.924,56	1.063.435,38	1,54

Sumber : BPS Kota Parepare

Pada tahun 2007, jika dibandingkan dengan nilai PDRB Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 69.271.924,56 Juta, maka kontribusi PDRB Kota Parepare terhadap angka PDRB Propinsi Sulawesi Selatan, hanya sebesar 1,54 % dan kontribusinya semakin tahun semakin mengalami peningkatan walaupun masih berfluktuasi (Tabel 7). Jika dilihat besaran prosentase, angkanya cukup kecil, namun apabila dilihat dari jumlah penduduk Kota Parepare, maka kontribusi tersebut relatif signifikan, karena jumlah penduduk Kota Parepare hanya sebanyak 116.309 jiwa pada Tahun 2007 atau sekitar 1,50% dari jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan (7.700.255 jiwa). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan ekonomi Kota Parepare mengalami kemajuan.

Selama periode tahun 2003-2007, laju perkembangan dan pembangunan ekonomi Kota Parepare cenderung meningkat walaupun sedikit berfluktuasi. Tabel 7 menunjukkan bahwa perkembangan nilai PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2007, yakni 15,74 % dan 17,82 % sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2003 hanya sebesar 12,87 %. Perkembangan PDRB selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2003 - 2007) secara rata - rata sebesar 14,33 % per tahun. Kondisi terbaik pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2007. Hal ini didukung oleh membaiknya sektor-

sektor ekonomi di Kota Parepare. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel-8 berikut.

Perkembangan PDRB selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2003 - 2007) secara rata - rata sebesar 14,33% per tahun. Kondisi terbaik pertumbuhan ekonomi yang terbaik yaitu pada tahun 2007. Hal ini didukung oleh membaiknya sektor-sektor ekonomi di Kota Parepare. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Pendapatan perkapita penduduk Parepare telah mengalami peningkatan dalam sepanjang 2004-2007. Pada tahun 2004, pendapatan perkapita penduduk Parepare sekitar Rp.5.000.000/tahun; naik menjadi sekitar Rp. 6.000.000 (2005); lalu sekitar Rp.7.000.000 (2006) dan sekitar Rp. 9.000.000 (2007).

Tabel 8. PDRB Berlaku dan Harga Konstan serta Perkembangan dan Pertumbuhannya, Tahun 2003 - 2007

Tahun	PDRB Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB Konstan (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2003	596.394,15	12,87	472.914,83	5,00
2004	679.187,08	13,88	502.367,17	6,23
2005	786.090,78	15,74	532.893,08	6,08
2006	902.559,10	14,82	569.455,47	6,86
2007*)	1.063.435,38	17,82	609.224,94	6,98
Rata - Rata		14,33		6,23

Sumber : BPS Kota Parepare \*)angka sementara

### 3. Investasi

Perbaikan iklim investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang usaha akan menggerakkan parameter ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan wilayah. Hal tersebut tergambar dalam di tahun 2007 jumlah perusahaan Industri di Kota Parepare sebanyak 1.121 unit, dengan menyerap tenaga sebanyak 3.738 orang, dan nilai output sebesar 35.633 juta rupiah. Secara rata-rata selama tahun 2003-2007 jumlah perusahaan industri di Kota Parepare mengalami peningkatan sebesar 3,08% per tahun, Nilai Investasi meningkat 9,23 per tahun, dan Nilai Produksi juga meningkat 5,24% per tahun. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diserap menurun sebesar 0,59%.

Pada Tabel 9 berikut terlihat bahwa dari tahun 2006 ke 2007 telah terjadi peningkatan dalam hal jumlah perusahaan yang berinvestasi, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan nilai bahan baku di Kota Parepare.

Secara garis besar jenis-jenis usaha tersebut mencakup industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan dan industri logam.

Tabel 9. Jumlah Perusahaan, Nilai Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja dalam Perkembangan Investasi Kota Parepare 2006-2007.

No.	Sektor	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (000) Rp	Nilai Produksi (000) Rp	Nilai Bahan Baku/ Penolong
1	2	3	4	5	6	7
1	Industri Pangan	260	814	3,089,204	9,234,810	5,619,935
2	Industri Sandang Dan Kulit	960	383	1,305,689	4,460,288	2,503,704
3	Industri Kimia & Bahan Bangunan	372	1,472	11,626,211	14,640,842	8,367,814
4	Industri Kerajinan	305	945	4,580,491	6,668,943	3,362,401
5	Industri Logam	88	124	590,058	628,561	324,861
	2007	1,121	3,738	21,191,743	35,633,444	20,175,715
	2006	1,052	3,603	18,269,463	31,509,484	18,019,901

Sumber Data : Parepare Dalam Angka, Tahun 2008

## C. SOSIAL BUDAYA DAERAH

### 1. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kota Parepare tahun 2007 berjumlah 116.309 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 59.342 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 56.967 jiwa. Kepadatan penduduk 1.171 jiwa/Km dengan jumlah rumah tangga sebanyak 27.464 unit. Laju pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir, pada tahun 2003 sebanyak 113.161 jiwa, pada tahun 2004 sebanyak 113.862 jiwa, pada tahun 2005 sebesar 114.000 jiwa, pada tahun 2006 sebesar 115.169 jiwa, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 116.309 jiwa.

Data penduduk berdasarkan struktur umur produktif di Kota Parepare terdiri dari 10 - 14 tahun sebanyak 12.541 jiwa, 15 -19 tahun sebanyak 12.656 jiwa, 20 - 24 tahun sebanyak 10.769 jiwa, 25 - 29 tahun sebanyak 9.658 jiwa, 30 - 34 tahun sebanyak 8.037 jiwa, 35 - 39 tahun sebanyak 9.154 jiwa, 40 - 44 tahun sebanyak 7.214 jiwa, 45 - 49 tahun sebanyak 6.314 jiwa, 50 - 54 tahun sebanyak 5.537 jiwa, 55 - 59 tahun sebanyak 4.161 dan umur 60 tahun ke atas sebanyak 7.860 jiwa.

Kecamatan Bacukiki memiliki wilayah paling luas dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, yaitu mencapai 79,70 Km<sup>2</sup> yang setara dengan 80,25 % dari total luas wilayah Parepare. Sementara itu, penduduk Kecamatan Bacukiki hanya mencapai 38,40 % dari total penduduk Kota Parepare, yaitu berjumlah 45.414 jiwa. Rata - rata kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di wilayah Kecamatan Soreang, yaitu mencapai 5.099 Jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan di wilayah Kecamatan Bacukiki hanya mencapai 570 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Ujung mencapai 2.669 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Jenis pekerjaan penduduk Kota Parepare yang dominan ialah sektor perdagangan yang mencapai angka 30,34%, terutama pada wilayah Kecamatan Ujung.

## **2. Kondisi Seni dan Budaya**

Masyarakat Kota Parepare yang dikenal heterogen memiliki kebudayaan yang beragam. Hal ini dikuatkan oleh keadaan kota yang relatif aman meski banyak komunitas yang berdiam di Kota Parepare dimana masyarakat didominasi oleh suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan selebihnya merupakan penduduk suku Jawa dan keturunan Cina. Selain mengacu pada sistem nilai dan norma masing-masing, antar suku juga berjalan interaksi sosial dan saling toleran satu sama lain.

Masyarakat Kota Parepare juga dikenal dengan kegiatan gotong-royong dengan kekerabatan yang sangat erat dalam melaksanakan kegiatan bersama seperti acara pernikahan, kematian, pesta padi, turun kelaut dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada dasarnya masyarakat telah menyadari akan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan kota, karena Kota Parepare mempunyai peran yang besar dalam mobilitas penduduk dari dan ke daerah lain khususnya Indonesia Timur dan Nusantara sehingga atas dasar saling membutuhkan inilah yang mempunyai andil besar dalam menciptakan kebudayaan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain.

## **3. Kondisi Kesehatan**

Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang menetapkan adanya standar pelayanan minimal yang menjadi kewenangan wajib Kota Parepare, dan sebagai penghargaan atas dukungan dan komitmen atas segala pencapaian hasil pembangunan kesehatan, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional tanggal 11 Nopember 2006, Pemerintah Daerah Kota Parepare telah menerima penghargaan tertinggi Bidang Kesehatan dari Menteri Kesehatan yaitu Manggala Ksatria Bakti Husada, sedangkan program Kota Sehat Tahun 2007, Kota Parepare direkomendasi oleh Depdagri sebagai penerima penghargaan sebagai Kota Sehat Kategori III (pemantapan) yang akan terus berlanjut sampai tahap tertinggi hingga tahun 2009.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya tidak hanya pada pelayanan medik (pengobatan) akan tetapi juga meliputi pelayanan pencegahan serta pengendalian penyakit dan wabah. Bagian ini berupaya mengeliminir faktor-faktor resiko yang dianggap mampu menyebabkan kesakitan, wabah dan



kematian. Oleh karena itu, dalam penetapan lingkungan sebagai salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan, maka aspek kontribusi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat menjadi penilaian utama. Untuk menilai lingkungan dan upaya yang dilakukan dalam menciptakan lingkungan maka indikator yang digunakan adalah persentase rumah sehat dan persentase tempat - tempat umum sehat. Dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat, maka peran serta masyarakat untuk dapat memelihara kesehatannya secara mandiri akan sangat menentukan. Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup perilaku dan tindakan dari individu dan keluarga dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk dalam hal ini perilaku dan tindakan kelompok dan masyarakat.

#### **4. Kondisi Pendidikan**

Pendidikan yang baik tidak hanya meneruskan tradisi ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan sebagai suatu alat untuk menentukan jalan bagi peserta didiknya melainkan juga agar pendidikan sejauh mungkin relevan dan menghubungkan antara alat yang diberikan dengan kemungkinan menentukan hidup yang paling baik bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, pendidikan memiliki arti sebagai materi dan memiliki arti sosial. Penerapan sistem pendidikan apapun pasti membutuhkan sarana, prasarana maupun sumber daya pendidikan lainnya. Pembangunan yang dilakukan akan mengusahakan terpenuhinya sumber daya pendidikan termasuk sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan biaya sehingga memudahkan untuk melakukan segala aktivitas yang bersangkutan dengan pendidikan. Pembangunan memiliki hubungan yang positif dengan pendidikan karena pembangunan dapat mengupayakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Pembangunan akan benar-benar terarah bila pendidikan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Fasilitas pendidikan merupakan indikator untuk mengukur tingkat intelektual penduduk dalam suatu kota. Pembangunan pendidikan merupakan sasaran yang diarahkan pada meningkatnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah, meningkatnya kualitas lembaga pendidikan, tersedianya tenaga pendidikan dalam jumlah yang cukup dan bermutu, meningkatkan kualitas manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam program pendidikan sejak lama telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain peningkatan dan perbaikan kualitas prasarana pendidikan, hal ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan/subsidi serta pembangunan rehabilitasi sekolah.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Melalui RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan program gratis biaya pendidikan, perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare diharapkan mendukung dan mensukseskan pembangunan di bidang pendidikan.

Program pendidikan dasar yang dilaksanakan di Kota Parepare bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus mewujudkan visi Kota Parepare sebagai kota pendidikan. Sejak tahun 2002 telah terbentuk Dewan Pendidikan Kota sebagai wahana yang memfasilitasi berbagai kepentingan untuk pengembangan pendidikan. Adapun fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Soreang berjumlah 65 Unit atau 37,38% dari keseluruhan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Parepare. Sedangkan Kecamatan Ujung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang paling sedikit yaitu 46 Unit atau 26,7% dan Kecamatan Bacukiki terdapat 61 Unit atau 35,92% dari keseluruhan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Parepare.

Saat ini di Kota Parepare juga terdapat sekolah unggulan yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU) 5 Parepare, serta terdapat beberapa perguruan tinggi setingkat Strata Satu dan Diploma antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN), PGSD UNM, Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, STAI DDI, AKPER Fatimah dan AKPER Dinkes. Disamping itu juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang membuka program-program pendidikan dengan jangka waktu tertentu yang dapat meningkatkan pendidikan dan daya saing SDM (sumber daya manusia) khususnya di Kota Parepare.

Data pendidikan lainnya sangat diperlukan untuk menunjang upaya perencanaan pembangunan sistem pendidikan dan penilaian perkembangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya penyediaan data dan informasi tidak hanya terbatas pada data pokok melainkan telah termasuk dalam rinciannya. Pemahaman kinerja tentang pendidikan di daerah termasuk juga di luar negeri akan memacu pendidikan yang ada di Kota Parepare secara khusus maupun secara nasional untuk mengikuti perkembangan pendidikan dalam kancah internasional dalam rangka globalisasi dan di khususkan pada globalisasi pendidikan.

Dengan kemajuan program pembangunan pendidikan selama ini maka dapat dikatakan bahwa pendidikan di Kota Parepare telah mencapai suatu keberhasilan, dimana kebutuhan akan peningkatan mutu data dan bentuk informasi yang tersedia telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena semakin banyak warga negara yang terdidik maka semakin tinggi pula perhatian negara terhadap pendidikan baik dalam hal pemerataan pendidikan dan perluasan akses masuk ke sekolah, peningkatan mutu dan relevansi, serta manajemen pendidikan dan pencitraan publik yang dilihat dari efisiensi internal pendidikan.

Adanya peningkatan kuantitas usia wajib belajar yang terserap, yaitu tahun 2004 jumlah Siswa SD/MI sebanyak 15.692 siswa, Tahun 2005 bertambah menjadi 16.378 atau meningkat sekitar 3,39%, dan pada Tahun 2007 menjadi 17.090 siswa atau meningkat sekitar 4,34% sehingga peningkatannya setiap tahun rata-rata sekitar (4,63%). Untuk jenjang SMP/MTs, juga mengalami peningkatan daya serap, dimana pada Tahun 2004 jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 6.230 siswa, kemudian pada Tahun 2005 meningkat menjadi 6.335 siswa atau meningkat sekitar 7,46%, dan pada Tahun 2007 menjadi 6.902 siswa atau meningkat sekitar 6,05% dimana rata-rata peningkatan daya serap tingkat SMP setiap tahun sekitar 5,45%. Peningkatan daya serap siswa pada setiap

jenjang pendidikan, dapat dilihat secara prosentase dalam bentuk indeks APK (Angka Partisipatif Pasar) sejak tahun pelajaran 2003/2004 sampai tahun pelajaran 2006/2007, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Peningkatan daya serap siswa dilihat dari Prosentase Indeks APK di Kota Parepare.

No	Jenjang Pendidikan	TP 2003/2004	TP 2004/2005	TP 2005/2006	TP 2006/2007
1.	AP K SD	118,76 %	119,97 %	114,08 %	119,00 %
2.	AP K SMP	86,06 %	88,69 %	102,98 %	103,00 %
3.	AP K SLTA	86,96 %	87,54 %	96,81 %	90,78 %

Untuk perkembangan grafik kenaikan pada nilai rata mata pelajaran tertentu yang di UAS-kan pada SD/MI seperti pada mata pelajaran Matematika nilai rata-rata Tahun 2004 adalah 7,04, Tahun 2005 naik menjadi 7,15 dan pada Tahun 2006 rata-rata naik menjadi 7,19. Untuk tingkat SMP/MTs pada mata pelajaran yang sama rata-rata pada Tahun 2004 adalah 5,70, Tahun 2005 naik menjadi 6,70, Tahun 2006 rata-rata 7,22 dan pada Tahun 2007 rata-rata 7,48.

Gambaran perkembangan prosentase tingkat kelulusan siswa mulai dari Tahun pelajaran 2003/2004 sampai dengan Tahun pelajaran 2006/2007 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Tingkat Kelulusan Siswa pada Berbagai Jenjang Pendidikan Di Kota Parepare.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun Pelajaran 2003/2004	Tahun Pelajaran 2004/2005	Tahun Pelajaran 2005/2006	Tahun Pelajaran 2006/2007
1.	Kelulusan SD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2.	Kelulusan SMP	89,33 %	98,41 %	84,99 %	97,80 %
3.	Kelulusan SLTA	94,16 %	77,54 %	96,95 %	90,89 %

Prosentase kerusakan Ruang Belajar (RB) pada jenjang SMA/SMK/MA dimana pada Tahun 2005 dari 215 RB yang ada, yang mengalami kerusakan 61

RB atau sebesar 28,37%, kemudian pada Tahun 2006, mengalami penurunan menjadi sisa 42 RB atau sebesar 19,53%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar pada Tahun 2004, jumlah Ruang Belajar (RB) SD/MI yang mengalami kerusakan berat sebanyak 130 RB, dan setelah dilakukan rehabilitasi berat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada Tahun 2005 jumlah yang rusak berat tinggal 100 RB dan pada Tahun 2006 ini sisa 49 RB yang mengalami kerusakan berat. Pada tingkatan pendidikan dasar terjadi peningkatan kualitas sarana pendidikan terutama perbaikan Ruang Belajar rata-rata sekitar 37,03% setiap Tahun, bahkan pada Tahun 2007 ini pula berdasarkan surat edaran Direktorat Pembinaan TK dan SD Diknas Nomor 0312/C2/LL/2007, tanggal 02 April 2007, untuk bangunan Ruang Belajar Sekolah Dasar, Kota Parepare merupakan salah satu kota dari 81 Kota/Kabupaten di Indonesia yang telah tuntas pembangunan Ruang Belajar Tingkat SD.

## **5. Kondisi Keagamaan**

Penduduk Kota Parepare yang tercatat di data Statistik pada awal tahun 2007 mencapai 116.309 Jiwa yang sebagian besar adalah menganut agama Islam yaitu sebanyak 100.760 Jiwa, namun sebagiannya menganut agama Kristen Protestan sebanyak 7.324 Jiwa, Kristen Katolik sebanyak 4.739 Jiwa, Hindu sebanyak 1.650 Jiwa, Budha sebanyak 1.263 Jiwa, dan Kon Fhu Cu sebanyak 573 jiwa. Ini menunjukkan bahwa dari segi signifikansi jumlah pemeluk berbagai agama, penduduk Kota Parepare cukup heterogen dan pluralistik.

Sedangkan untuk rumah ibadah yang ada dalam wilayah Kota Parepare dapat dibagi dalam 3 (tiga) kecamatan masing-masing kecamatan Bacukiki, terdapat 43 Masjid, 31 Mushollah, 1 Langgar, 2 Gereja, dan 1 Sanggah (Hindu). Untuk Kecamatan Ujung terdapat, 23 Masjid, 11 Mushollah, 2 Langgar, 6 Gereja dan 1 Vihara, sedangkan kecamatan Soreang terdapat 33 Masjid, 22 Musholla, 2 Langgar, 11 Gereja, 1 Vihara dan 2 Cetya (Budha).

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kota Parepare seperti Masjid, Mushollah, Gereja, Vihara yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Persebarannya cukup merata dan tingkat pencapaian masyarakat terhadap fasilitas peribadatan tersebut cukup baik dan dapat menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat terutama dalam hal peribadatan relatif baik. Komunikasi dan interaksi antar umat beragama selalu terjalin dengan baik dan para penganut agama menjalankan ibadahnya dengan tenang, walaupun yang menganut Agama Hindu belum memiliki fasilitas peribadatan.

Secara umum setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agama dan melakukan peribadatan dengan baik. Selain itu, toleransi antar pemeluk agama serta hubungan antara pemeluk agama dengan pemerintah, relatif berjalan baik dan harmonis.

## **6. Kehidupan Pemuda dan Olahraga**

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam membentuk masyarakat yang sehat adalah dengan memasyarakatkan olahraga ke segenap lapisan. Untuk menunjang hal tersebut, maka keberadaan berbagai fasilitas olahraga saat ini harus lebih ditingkatkan fungsi dan perannya dalam mewujudkan tujuan pemerintah tersebut.

Obsesi pemerintah Kota Parepare dalam usaha membentuk masyarakat sehat adalah dengan memasyarakatkan olahraga keseluruhan lapisan masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, bola volly, tennis lapangan, dan bola basket. Masyarakat dapat melakukan aktivitas olahraga minimal dapat membentuk masyarakat yang sehat walaupun tidak intensif. Pengembangan kelembagaan pemuda melalui pembinaan secara sistematis dan terpadu terhadap lembaga-lembaga kepemudaan didukung peran serta masyarakat demi terciptanya sasaran peningkatan prestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Distribusi fasilitas olahraga tersebut dalam menunjang atau melayani masyarakat Kota Parepare telah merata, karena tersebar di setiap Kecamatan sehingga masyarakat yang ingin berolahraga dapat terlayani dengan tersedianya fasilitas tersebut. Bahkan dalam pembinaan kesadaran, mental dan spiritual pementapan budaya belajar dan semangat penguasaan lptek, sehingga peningkatan keterampilan, kepeloporan dan etos kerja yang tinggi bagi pemuda agar mampu bersaing menghadapi masa depan yang kompetitif, serta peningkatan kesadaran untuk menghindari dan mencegah tumbuhnya budaya destruktif dan perilaku sosial yang merusak, terutama bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi, kriminalitas dan kenakalan remaja.

## **7. Kesejahteraan Sosial**

Keluarga Pra Sejahtera pada tahun 2007 mencapai 1.824 unit, jumlah ini meningkat dari 1.653 unit (2006) dan 630 unit (2005). Keluarga Sejahtera I pada tahun 2007 sebanyak 9.763 unit, turun dari 9.911 unit (2006) dan 11.641 unit (2005). Keluarga Sejahtera II pada tahun 2007 sebesar 3.236 unit pada tahun 2007, meningkat dari 2.063 unit (2006) dan tetapi turun dibanding tahun 2005 yang mencapai 4.266 unit. Keluarga Sejahtera III pada tahun 2007 sebanyak 11.597 unit, turun dari 12.128 unit (2006), sementara pada 2005 sebanyak 7.658 unit. Keluarga Sejahtera III Plus pada tahun 2007 sebanyak 2.016 unit, meningkat dari 1.981 unit (2006), sementara pada 2005 sebanyak 2.209 unit. Total keluarga pada tahun 2007 sebanyak 28.436 unit, pada tahun 2006 sebanyak 27.736 unit dan pada tahun 2005 sebanyak 26.404 unit.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam hal anak yang di asuh di panti asuhan, pada tahun 2007 tercatat jumlah anak sebanyak 271 orang yang ditampung pada enam panti. Pada tahun 2006 dan 2005 jumlah anak sebanyak 257 orang pada enam panti. Bantuan sosial yang terealisasi pada tahun 2007 mencakup sasaran 50 jiwa untuk penyandang cacat dalam panti dan 170 jiwa untuk luar panti; bagi anak terlantar untuk 271 jiwa didalam panti dan 35 jiwa di luar panti; untuk jompo sebanyak 30 jiwa di luar panti; untuk korban bencana

alam sebanyak 249 jiwa; untuk fakir miskin sebanyak 250 jiwa. Kejadian bencana alam pada tahun 2007 adalah kebakaran (12 kejadian) serta angin topan (237 kejadian).

#### **D. PRASARANA DAN SARANA DAERAH**

Kondisi jalan di Kota Parepare adalah 90 persen konstruksi hotmix dalam kondisi baik, dilewati jalan Nasional Trans-Sulawesi dan memiliki jalan lingkaran luar (outer-ringroad) lalu lintas regional. Transportasi di Kota Parepare tersedia dengan jumlah yang memadai, di Kota Parepare terdapat angkutan kota yang disebut dengan nama Pete-pete yaitu sejenis kendaraan roda empat angkutan kota yang dapat memuat hingga 10 orang penumpang, juga terdapat angkutan umum dengan segmen tertentu seperti Taxi dan Ojek Motor, serta kapal motor tempel yang melayani jalur khusus ke Ujung Lero yaitu wilayah pesisir yang letaknya berada di sebelah barat Kota Parepare namun menjadi wilayah administrasi kabupaten Pinrang, semua jenis angkutan tersebut beroperasi dengan lancar, baik pengangkutan yang dikelola oleh pemerintah seperti Patas yang khusus melayani rute Parepare-Makassar maupun pengangkutan yang dikelola oleh swasta dalam rangka menghubungkan beberapa provinsi dan antar daerah di Sulawesi Selatan dan Barat. Kota Parepare adalah salah satu peraih penghargaan Wahana Tata Nugraha yaitu Penghargaan Pemerintah Pusat dalam bidang pengelolaan lalu lintas dan transportasi.

Panjang jalan menurut kelas pada tahun 2007 terdiri dari jalan kelas II sepanjang 37,40 km, kelas III sepanjang 119,864 km, kelas IIIA sepanjang 76,004 km dan kelas IIIB/C sepanjang 12,000 km, dan lainnya sepanjang 94,620 km. Adapun panjang jalan dari jenis pemukaannya, terdiri dari jalan aspal sepanjang 210,504 km, jalan perkerasan 27,064 km dan jalan tanah sepanjang 9,111 km. Sedangkan menurut kondisinya, yaitu kondisi baik sepanjang 210,504 km, kondisi sedang 36,175 km dan kondisi rusak 94,620 km.

Prasarana transportasi laut di Kota Parepare terdapat beberapa unit pelabuhan yaitu diantaranya pelabuhan Nusantara. Pelabuhan utama yang merupakan pelabuhan kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Makassar yang disinggahi oleh kapal berbobot mati 1000 - 2000 ton. Pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang dan orang, melayani pelayaran Nusantara (antar pulau) dan Samudra (antar negara).

Pelabuhan Lontange dan Pangkalan Cappa Ujung, merupakan pelabuhan perahu motor atau kapal kayu yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang dan orang yang melayani pelayaran lokal (antar daerah) dan pelayaran nusantara terutama kawasan Timur Indonesia dan Kalimantan. Pelabuhan Pertamina, yaitu pelabuhan yang khusus melayani kapal tengker yang memuat bahan bakar. Fasilitas pelabuhan yang ada seperti demaga, tempat pemabahan tengker sebesar 6.500 dwt, depot pertamina dalam bentuk tangki raksasa sebagai tempat penampungan bahan bakar untuk didistribusikan didaerah pemasaran.

Kondisi drainase yang ada di Kota Parepare dengan total panjang drainase adalah 48.659 m atau 0,45 m/kapita yang terdiri dari saluran premier dengan

panjang 6.992 m, saluran sekunder 28.135 m dan saluran tersier sepanjang 13.602 m. Masyarakat Kota Parepare menggunakan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kota Parepare, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak tersentuh dengan jaringan air bersih PDAM. Kapasitas terpasang untuk saat ini adalah 205 L/detik, sementara kapasitas yang terpakai adalah 165 L/detik dan yang tersisa adalah 40 L/detik. Pemakaian air bersih PDAM pada tahun 2007 oleh masyarakat sebanyak 2.923.298 meter kubik dengan jumlah pelanggan sebanyak 14.592 pelanggan. Distribusi energi listrik dengan kapasitas 56 MVA yang jumlah produksi per satuannya sebesar 60.745.988 Kwh, dengan penunjang Gardu Induk Barru 10 MVA, Gardu Induk Pinrang 26 MVA dan Gardu Induk Sidrap 20 MVA.

Banyaknya sentral kapasitas tersambung (kapasitas otomatis) di Kota Parepare berjumlah 6.856 SST pada tahun 2002 sedangkan jumlah sambungan induk telepon pada tahun 2000 berjumlah 6.471 SST sambungan. Selain itu juga terdapat fasilitas lain yang sangat mendukung kelancaran arus informasi antara lain tersedianya satuan sambungan telekomunikasi sebesar 73.823 SST/SLJJ, Fasilitas Phonsel AMPS/GSM (Satelindo dan Telkomsel), Pemanfaatan pelayanan radio panggil Starko, Fasilitas internet dengan dukungan Homepage melalui jaringan City Net dan Wasantara Net, Satu Satuan Telepon Otomatis (STO), Wartel 35 unit, 26 unit kiosphone dan 68 TUK.

Dalam hal telekomunikasi pihak Telkom telah menyiapkan kapasitas jaringan yang sudah terpasang 5.960 SST, kapasitas yang terpakai adalah 5.526 SST dan kapasitas yang tersisa adalah 434 SST. Disamping itu masyarakat pada umumnya juga merupakan layanan telepon seluler yang telah dioperasikan oleh beberapa operator Nasional seperti Telkomsel, Indosat, Exelindo, Telkom, dan lain lain. Pengembangan pelayanan telekomunikasi di Kota Parepare sudah saatnya dikembangkan ke seluruh bagian kota, sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan e-Government, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana informasi yang dapat mempermudah pelayanan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi, yang dilakukan melalui pengembangan akses informasi secara cepat, mutakhir dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung terbangunnya e-government dan e-community, peningkatan peranan media massa dan pers dalam upaya penyebarluasan informasi secara akurat, bermoral dan bertanggungjawab, perluasan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.

## **E. KONDISI PEMERINTAH UMUM**

Kondisi pemerintahan sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diupayakan untuk lebih desentralistis dengan berupaya memberdayakan semua potensi yang ada, termasuk masyarakat. Untuk kepentingan pelayanan, secara administratif Kota

Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Sedangkan dari segi kelembagaan sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 telah ditetapkan sebanyak 7 Badan, 12 Dinas, 9 Kantor, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Sekretariat DPRD. Jumlah pegawai negeri sipil pada tahun 2007 sebanyak 4.123 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.918 orang dan perempuan 2.205 orang. Pegawai golongan I sebanyak 53 orang; golongan II sebanyak 931 orang, golongan III sebanyak 1.892 orang, dan golongan IV sebanyak 1.205 orang. Pegawai dengan jabatan fungsional sebanyak 2.264 orang.

Untuk kepentingan pelayanan, telah diupayakan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan membangun sistem pelayanan terpadu terbatas, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan semua unsur mulai dari unsur pemerintahan, yaitu pejabat wilayah, DPRD dan Muspida serta unsur kemasyarakatan, antara lain LPMK, berbagai ormas dan kalangan lainnya. Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance secara bertahap mulai dilembagakan dengan tetap mengedepankan terpeliharanya kondisi yang aman dan tertib.

Peningkatan peran komunikasi dan informasi dalam melaksanakan segala proses pembangunan di Kota Parepare lebih ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, khususnya dalam hal pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi juga ditujukan bagi terwujudnya pers yang bebas dan mapan serta bertanggung jawab yang menjamin terbukanya akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas, demokratis, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare telah memprogramkan dan melaksanakan sejumlah program kegiatan yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendukung kebijakan sebagaimana digambarkan di atas. Salah satunya adalah Kegiatan Visualisasi Pemerintah Kota Parepare dalam bentuk Buku Visualisasi yang berisi Foto Kegiatan dan CD Kegiatan yang telah didistribusikan kepada seluruh SKPD yang ada.

Selain itu, melalui Website Pemkot Parepare ([www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)) Bagian Humas setiap hari mendistribusikan berbagai informasi berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam bentuk berita, terutama kegiatan yang melibatkan langsung Walikota Parepare, Wakil Walikota Parepare serta Sekretaris Daerah Kota Parepare. Berita-berita tersebut, selanjutnya, menjadi bahan pemberitaan media yang ada, terutama media harian (lokal, regional dan nasional).

Sehubungan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, melalui fasilitas email pada website dimaksud, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare juga lebih membuka ruang luas yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol, koreksi, dan masukan yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintahan. Saat ini berbagai informasi seputar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 dapat diakses pada situs ini. Seiring dengan hal tersebut, Bagian Humas juga menyelenggarakan SMS Centre (08141350077) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi dan



kritikan kepada pemerintah daerah. Setiap minggu, semua SMS yang masuk ke SMS Centre Pemkot Parepare di-*print out* selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Walikota Parepare sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Peningkatan penyebaran informasi dan pengkomunikasian penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari proses pencerdasan kepada masyarakat, juga ditempuh melalui kegiatan Tudang Sipulung dalam desain *talkshow* interaktif. Kegiatan ini disiarkan secara langsung (*live*) oleh radio lokal yang memungkinkan masyarakat yang tidak sempat hadir di lokasi berlangsungnya kegiatan, dapat mengikuti kegiatan tersebut. Untuk tahun 2008, konsep kegiatan Tudang Sipulung, lebih dikembangkan melalui pelibatan televisi lokal, selain radio, yang juga menyiarkan kegiatan tersebut secara langsung kepada masyarakat Parepare.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2006-2008), program ini telah mengambil peran signifikan dalam penyebaran hasil-hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Walikota Parepare dapat memperoleh masukan langsung dari lapangan (masyarakat) sekaitan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

## BAB III

### GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1. Kerangka Pendanaan

Perubahan besar pengelolaan keuangan negara/daerah diawali dengan penerbitan paket Undang-Undang yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bernafaskan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni paket UU No. 22 dan No. 25/1999 yang kemudian keduanya direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Legalitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan diikuti pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti dengan sumber pembelanjaan tersebut, diharapkan mampu mendorong lahirnya optimalisasi pengelolaan sumberdaya pembangunan di daerah untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas.

Guna mensinergikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada setiap poin yang dirumuskan dalam kebijakan program pembangunan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang berujung pada lahirnya APBN dan APBD, pemerintah telah melengkapinya dengan paket UU selanjutnya, yaitu UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Paket UU ini kembali memberikan penegasan tentang pentingnya keterkaitan antara pengelolaan keuangan publik dengan kepentingan publik. Kepentingan publik yang dirumuskan dalam sejumlah kebijakan pembangunan nasional dan daerah merupakan landasan pokok dalam penyusunan anggaran publik yang tertuang dalam APBN dan APBD.

Sejumlah UU di atas, merefleksikan pengaturan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, oleh karenanya kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Belanja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas perbantuan didanai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Jadi, secara umum sumber pendanaan yang diimplementasikan di daerah menjadi investasi bagi daerah, selain dilakukan melalui investasi swasta, juga berupa investasi pemerintah melalui *government expenditure*, yang dimuat dalam APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri atas tiga kelompok pendanaan.

*Pertama*, Dana Desentralisasi. Pemerintah telah mendesentralisasikan wewenang sebagian besar dari belanja pemerintah kepada pemerintah daerah, dan hasilnya pemerintah daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia sekarang membelanjakan 37% dari total dana publik. Ini mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer Dana Perimbangan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Parepare berupa

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi ini dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU besarnya dihitung menggunakan rumus/formulasi yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas statistik wilayah. Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus diperkirakan pula akan lebih besar pada tahun-tahun mendatang mengingat banyaknya kebijakan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

*Kedua*, Dana Dekonsentrasi. Ini terkait dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada kepala daerah sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

*Ketiga*, Dana Tugas Pembantuan, merupakan ceminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memberikan pedoman dasar dengan menerbitkan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah setelah sebelumnya menerbitkan Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD dan Penyusunan Perhitungan APBD. Kepmendagri ini kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang hanya dalam tempo satu tahun kembali diperbaharui dengan Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinamisnya legalitas pengelolaan keuangan daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik di daerah yang akuntabel, transparan dan berkinerja untuk mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Keuangan daerah diharapkan mampu secara efisien mengalokasikan sumberdaya pembangunan daerah, semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus mampu teralokasi kembali secara tepat untuk kepentingan masyarakat, karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah memang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Faktanya, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, antara kepentingan masyarakat dengan alokasi belanja daerah seringkali tidak sejalan. Kepentingan masyarakat jika tidak diidentifikasi secara baik, tidak direncanakan secara cermat oleh pemerintah daerah, seringkali justru menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan belanja daerah. Akibatnya, kebutuhan belanja (*fiscal needs*) akan senantiasa tidak

terkendali besarnya. Sebaliknya, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Parepare memiliki keterbatasan untuk menarik uang dari masyarakat, karena di samping akan berdampak negatif pada melemahkan daya beli masyarakat dan timbulnya biaya tinggi bagi investasi dan industri lokal, juga kondisi sebagian besar masyarakat masih berada dalam tekanan kemiskinan yang berkepanjangan. Keraguan Pemerintah Kota dalam meningkatkan pendapatan daerah ini menyebabkan kemampuan keuangan daerah (*fiscal capacity*) menjadi sangat rendah.

Dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang rendah dan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang tinggi, menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang semakin lebar, memaksa pemerintah daerah untuk menciptakan ketergantungan fiskal pada sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari luar. Sumber-sumber keuangan dari luar antara lain dari pemerintah kabupaten/kota lainnya, provinsi, serta dari pemerintah pusat dan bahkan tidak tertutup kemungkinan ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari luar negeri, melalui hibah dan pinjaman luar negeri.

Untuk memperkecil kesenjangan fiskal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat untuk menciptakan efisiensi keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mengelola belanja daerah secara cermat, efisiensi belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, belanja pelayanan publik yang tepat sasaran, belanja modal pada sektor-sektor yang strategis dan akseleratif dalam menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan daerah secara berkesinambungan, serta belanja daerah yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas sarana dan fasilitas publik.

Kota Parepare yang memerlukan kebijaksanaan keuangan daerah untuk mempercepat proses pembangunan dalam mencapai kualitas hidup masyarakat yang tinggi diarahkan pada kebijaksanaan keuangan yang konservatif (berhati-hati). Dengan selalu menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam keadaan mendekati posisi keseimbangan dan menghindari melakukan pengeluaran yang berlebihan. Kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tekanan kenaikan harga yang dapat membebani perekonomian daerah secara luas. Pembelanjaan pemerintah daerah difokuskan pada sektor-sektor strategis sehingga akan dapat menggalakkan investasi yang lebih besar pada sektor tersebut.

Selain itu, diperlukan kebijakan keuangan daerah yang memberikan perangsang fiskal (*fiscal incentives*) kepada sektor bisnis yang menjalankan aktivitas usahanya di samping strategis dalam penciptaan kesempatan kerja, juga konsen pada industri barang-barang lokal dengan penggunaan bahan baku lokal. Bentuk perangsang tersebut antara lain berupa pemberian pinjaman modal yang lunak dan pembebasan sementara pembayaran pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sebagai alat untuk memperbesar jumlah pembentukan modal daerah.

Dengan demikian, arah kebijaksanaan keuangan daerah Kota Parepare ditujukan pada terwujudnya Kota Parepare sebagai 'bandar madani' melalui terciptanya masyarakat mandiri, religius dan berkomitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainability development*) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan, pada:

- (1) Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;

- (2) Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum. Surplus secara bertahap, bukan berarti mengurangi belanja pemerintah kota, tetapi mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan sarana dan fasilitas publik.

### 3.3. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selama periode lima tahun terakhir, ketergantungan keuangan daerah Kota Parepare terhadap dana yang bersumber dari luar, terutama dana perimbangan yang bersumber dari DAU dan DAK, masih sangat besar. Ketergantungan terhadap DAU dan DAK masih mencapai di atas 85% terhadap total pendapatan daerah dan lebih dari 82% belanja daerah masih tergantung pada sumber dana perimbangan DAU dan DAK tersebut. Sebaliknya, kebutuhan belanja daerah hanya mampu dikontribusi rata-rata sekitar 12% oleh kemampuan fiskal daerah (PAD ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA daerah), dan kemampuan fiskal tersebut baru mampu membiayai 32,7% total kebutuhan belanja modal daerah. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat/daerah Kota Parepare dalam membiayai kebutuhan fiskalnya (*fiscal needs*), yang berarti tingkat kemandirian masyarakat/daerah dalam bidang keuangan masih jauh dari yang diharapkan.

Untuk itu, dalam rencana jangka menengah lima tahun ke depan, visi kemandirian di bidang keuangan daerah menjadi salah satu bagian penting dari terwujudnya masyarakat madani. Peningkatan peran kapasitas fiskal dalam mendanai kebutuhan belanja, khususnya belanja modal akan diarahkan untuk melebihi kontribusi dari sumber dana perimbangan DAU dan DAK. Kemampuan fiskal diharapkan mampu berkontribusi maksimal terhadap total pendapatan daerah, dan mampu mendanai lebih dari kemampuan maksimal atau diatas dari kemampuan fiskal, atau dapat dikatakan bahwa kebutuhan belanja modal daerah pada tahun 2013 bersumber dari PAD serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak SDA (*fiscal capacity*), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel-12 berikut ini.

Tabel 12. Proyeksi Pencapaian Tingkatan Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Parepare, 2009-2013 (dalam juta rupiah)

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	2009	2010	2011	2012	2013
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>32.012</b>	<b>31.907</b>	<b>35.098</b>	<b>38.607</b>	<b>42.468</b>
Pajak Daerah	4.435	4.216	4.638	5.102	5.612
Retribusi Daerah	20.851	20.722	22.794	25.073	27.581
Bagian Laba BUMD	1.150	1.265	1.392	1.531	1.684
Penerimaan Lain-lain	5.576	5.704	6.274	6.901	7.591
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>310.494</b>	<b>322.310</b>	<b>339.750</b>	<b>355.863</b>	<b>373.062</b>
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	28.760	26.490	29.139	29.722	30.614
Dana Alokasi Umum (DAU)	237.302	249.167	261.625	274.706	288.441

Dana Alokasi Khusus (DAK)	44.431	46.653	48.986	51.435	54.007
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>19.973</b>	<b>21.228</b>	<b>22.571</b>	<b>23.514</b>	<b>24.536</b>
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	11.350	11.918	12.513	13.139	13.769
Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.123	5.635	6.199	6.323	6.513
Dana Darurat	3.500	3.675	3.859	4.052	4.254
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>362.479</b>	<b>375.445</b>	<b>397.4189</b>	<b>417.984</b>	<b>440.069</b>

Sumber: Hasil Perhitungan, 2009.

Kondisi pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan pada Tabel-12 akan mampu dicapai dengan asumsi pokok bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kota Parepare tidak kurang dari 7,5% setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan dan membangun perusahaan daerah yang *profit oriented*, serta mengefisienkan tata kelola perusahaan daerah yang bersifat penyediaan pelayanan dasar masyarakat seperti PDAM, dan perusahaan-perusahaan daerah yang akan di bentuk dan dikembangkan. Pada saat yang sama, dana surplus dapat dialokasikan secara tepat pada penyertaan-penyertaan modal yang memiliki *return of investment* yang tinggi. Sejalan dengan itu, tidak ada kebijakan pemerintah yang bersifat ekstrim mempengaruhi kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mempengaruhi proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak daerah. Terakhir diasumsikan bahwa SKPD yang berwenang mengelola pendapatan daerah mampu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tanpa memberikan efek distorsi terhadap aktivitas perekonomian Kota Parepare secara menyeluruh.

### **(1) Arah Kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah**

Sumber utama pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan fiskal daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah ini, diharapkan berkontribusi lebih besar, baik terhadap total pendapatan daerah maupun menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan total belanja daerah, khususnya diharapkan mampu mendanai sekitar 82% kebutuhan belanja modal pada tahun 2013 yang akan datang.

Untuk menghindari terjadinya distorsi ekonomi daerah yang dapat dipicu oleh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan PAD akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan PAD yang berasal dari pertumbuhan laba BUMD dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama PAD, tetapi akan dilakukan secara cermat melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

#### ***Pendapatan Asli Daerah***

Sumber-sumber utama PAD Kota Parepare sebagai komponen penting yang menunjukkan kemampuan fiskal daerah adalah: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) laba perusahaan daerah; dan (iv) lain-lain PAD yang sah. Arah kebijakan yang spesifik ditujukan untuk pengelolaan sumber-sumber PAD tersebut, antara lain: (1) Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam

penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi; (2) Pembuatan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan redistribusi daerah; (3) Pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping berorientasi profit juga menjalankan pelayanan dasar masyarakat; (4) Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah; (5) Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan *software* sistem informasi.

### ***Pendapatan Daerah Dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak***

Sumber pendapatan daerah lainnya yang menunjukkan tingkat kemampuan fiskal daerah diperoleh dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumberdaya alam yang selama ini kontribusinya masih sangat kecil. Kota Parepare sebagai salah satu wilayah terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, memang memiliki potensi bagi hasil pajak yang tidak besar serta potensi bagi hasil sumberdaya alam yang sangat minim, kecuali potensi kilang minyak yang sekarang proses pembangunannya mengalami hambatan.

Karena itu, khusus untuk bagi hasil pajak, Pemerintah Kota akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Diperlukan intensifikasi pemungutan pajak, pola pemungutan pajak yang efisien dan akuntabel serta pengawasan dan pengendalian yang baik.

### **(2) Arah Kebijakan Sumber Pendapatan dari Luar Daerah**

Sebagian besar sumber pendapatan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Parepare masih bersumber dari luar daerah, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun yang berasal dari Provinsi. Satu sumber pendapatan lainnya yang memungkinkan diperoleh oleh setiap daerah otonom, tetapi belum pernah dinikmati oleh Kota Parepare adalah penerimaan dari kabupaten/kota lainnya.

Sumber dari Pemerintah yakni: (i) dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), (ii) lain-lain pendapatan yang sah berupa penerimaan dari Pemerintah, atau dapat juga berupa dana darurat dan lain-lainnya. Sedangkan penerimaan dari Provinsi dan penerimaan dari kabupaten/kota lainnya termasuk dalam bagian lain-lain pendapatan yang sah.

Berkaitan dengan sumber pendapatan dari luar ini, kebijakan pokok untuk dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah memperluas jaringan dan akses terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut. Fungsi akses dan sumbangan Pemerintah Kota akan dioptimalkan. Perencanaan program yang dilengkapi dengan studi kelayakan yang valid menjadi sebuah keharusan untuk meyakinkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sumbangsih dan kontribusi pembangunan Kota Parepare terhadap wilayah yang lebih luas, misalnya peran sentral Kota Parepare dalam pengembangan wilayah Ajatappareng atau wilayah KAPET Parepare; peran Parepare sebagai salah satu Kota Niaga andalan Provinsi Sulawesi Selatan; Kota Parepare sebagai penghubung perdagangan antar pulau (Kalimantan, Sulawesi dan Wilayah Kepulauan lainnya di Indonesia Timur, bahkan hingga Indonesia Barat) harus menjadi 'jualan' penting untuk menunjukkan pentingnya Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Parepare.

Selain perluasan akses sumber pendapatan dari luar tersebut, pada sisi yang lain Pemerintah Kota berkomitmen kuat untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan dana alokasi umum. DAU diprioritaskan hanya untuk membiayai kebutuhan pendanaan yang bersifat kepegaw aian, operasional dan pemeliharaan, sehingga ketergantungan secara bertahap dapat dikurangi, meskipun secara absolut tetap menunjukkan peningkatan pendapatan dari dana perimbangan, khususnya dari DA U.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah hendaknya akan diikuti dengan langkah-langkah konkrit yang strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain: (1) Memperluas basis penerimaan, melalui pemetaan dan perluasan jaringan untuk identifikasi dan pengelolaan potensi pendapatan daerah; (2) Memperkuat proses pemungutan dan kerjasama antar daerah dan dengan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi; (3) Meningkatkan pengawasan, menerapkan *reward* dan *funishment* dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah serta proses perolehan pendapatan daerah lainnya; (4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; (5) Meningkatkan kapasitas pendapatan melalui perencanaan yang lebih baik.

### **(3) Arah Pengelolaan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah untuk lima tahun ke depan, difokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal. Selama periode tahun 2003-2006, alokasi belanja pegawai rata-rata mencapai 46,02% dari total belanja daerah, selebihnya untuk belanja modal hanya mencapai rata-rata 28,25% dan belanja barang dan jasa 15,88% dan sisanya 9,86% terdistribusi pada belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja tidak terdangka serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Fakta ini menunjukkan bahwa seperdua kebutuhan belanja (*fiscal needs*) Kota Parepare teralokasi pada kebutuhan belanja pegawai dan hanya sedikit lebih dari seperempatnya yang menyentuh belanja pelayanan publik, berupa belanja modal.

Ke depan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang bukan hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektor-sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kualitas pertumbuhan yang tinggi, tidak hanya menekankan pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi Kota Parepare yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Belanja daerah diharapkan mampu melahirkan transformasi struktur ekonomi masyarakat dari yang *bervalue added* rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas, meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan ekonomi masyarakat Kota Parepare.

Guna mewujudkan rencana jangka menengah lima tahun ke depan tersebut, belanja daerah diarahkan untuk selalu bertumbuh rata-rata di atas 13,61% agar mampu tetap menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 7,5% per tahun dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain peningkatan belanja daerah yang signifikan, alokasi belanja daerah yang tepat juga sangat mendesak untuk dicermati secara mendalam ke arah keseimbangan antara belanja pelayanan publik dengan kebutuhan belanja untuk operasional perkantoran dan kepegaw aian.



Tabel 13. Proyeksi Kebutuhan Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare, 2009-2013 (dalam juta rupiah).

<b>KOMPONEN BELANJA DAERAH</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Belanja Tidak Langsung	194.085	203.789	213.978	224.677	235.911
Belanja Langsung	213.434	224.106	235.311	247.077	259.431
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>407.519</b>	<b>427.895</b>	<b>449.289</b>	<b>471.754</b>	<b>495.342</b>

Sumber: Hasil Perhitungan, 2008.

Dalam lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, namun belanja-belanja pegawai yang tidak berhubungan dengan penggajian diupayakan dan diarahkan untuk mengalami penurunan secara bertahap. Pada saat yang sama, alokasi belanja modal terus mengalami peningkatan hingga mencapai kontribusi rata-rata 9,52% terhadap kebutuhan belanja daerah. Selain itu, kebutuhan belanja barang dan jasa diharapkan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, sebaliknya pada peningkatan belanja pemeliharaan yang diharapkan mencapai angka rata-rata di atas 4% terhadap total belanja per tahun. Sejalan dengan itu, untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan, alokasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan harus selalu didorong peningkatannya selama lima tahun ke depan.

#### **(1) Arah Kebijakan Belanja Pegawai serta Operasional dan Pemeliharaan**

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan memberikan implikasi pada terjadinya perampingan struktur organisasi Pemerintah Kota Parepare. Perampingan tersebut, diharapkan tidak menurunkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan percepatan pembangunan kota. Perampingan tetap membawa visi memperkaya fungsi dan tugas pokok pemerintahan kota dalam rangka mengawal Kota Parepare sebagai 'bandar madani' melalui penciptaan 'masyarakat mandiri, religius dan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan'.

Untuk mencapai hal tersebut, belanja APBD lebih banyak diarahkan untuk belanja langsung pada peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja pegawai, meskipun diarahkan untuk tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi kontribusinya terhadap total kebutuhan belanja (*fiscal needs*) terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Belanja operasional berupa belanja barang dan jasa, juga diarahkan agar kontribusinya selalu menurun terhadap belanja daerah, meskipun tetap menunjukkan peningkatan jumlah belanja setiap tahunnya. Selanjutnya biaya pemeliharaan didorong untuk senantiasa mengalami peningkatan, baik dari segi nilai maupun dari segi kontribusinya terhadap total belanja daerah. Peningkatan biaya

pemeliharaan diperlukan untuk mencegah penggunaan alokasi anggaran belanja modal pada hal-hal yang tidak relevan atau tidak produktif, seperti renovasi atau pembangunan perkantoran baru, pergantian mobil dinas dan alokasi belanja daerah yang tidak relevan lainnya. Hal ini penting agar alokasi belanja kepada non-kepegawaian akan lebih besar sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Belanja pegawai akan lebih banyak diarahkan untuk mengoptimalkan peran pegawai daerah secara fungsional untuk pelayanan sosial masyarakat perkotaan. Karenanya jabatan fungsional menjadi prioritas pembelanjaan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat perkotaan yang tinggi. Belanja barang dan jasa, cukup menyita antara 10-12% belanja daerah, angka ini akan tetap mampu menjamin tetap terselenggaranya pelayanan minimal pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain jika penghematan belanja barang dan jasa ini diarahkan untuk belanja modal, maka akan mendorong peningkatan produktivitas kerja pegawai dalam melakukan pelayanan kemasyarakatan dan akselerasi pembangunan daerah.

## **(2) Arah Kebijakan Belanja Modal**

Kebijakan peningkatan belanja modal dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya Kota Parepare sebagai 'bandar madani' melalui terciptanya 'masyarakat mandiri, religius, dan berkomitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan'. Peningkatan belanja modal, bukan hanya dilihat dari nilai absolutnya tetapi juga kontribusinya terhadap total belanja daerah, yang diarahkan mampu melebihi belanja pegawai. Peningkatan belanja modal tersebut diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang berorientasi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial keagamaan maupun untuk pembangunan lingkungan.

Pada bidang ekonomi, belanja Pemerintah Kota didorong untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat dan pemerintahan, membuka aksesibilitas ekonomi dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya, serta menjamin terselenggaranya keadilan ekonomi masyarakat. Pada bidang sosial keagamaan, pemerintah menjamin terselenggaranya kehidupan sosial-beragama yang kondusif; renovasi dan pembangunan infrastuktur pendidikan, kesehatan dan keagamaan; peningkatan kualitas tenaga pendidikan, kesehatan dan keagamaan; serta menjamin keseimbangan lingkungan pantai, daerah aliran sungai dan pegunungan yang merupakan ciri utama wilayah Kota Parepare. Intinya, kebijakan belanja modal diarahkan untuk terselenggaranya pembangunan yang mampu mencapai pertumbuhan secara cepat dan berkualitas. Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (diperoleh dengan peningkatan investasi dan produktivitas kerja yang tinggi), distribusi pendapatan yang merata, kualitas hidup masyarakat yang tinggi (berpendapatan tinggi, religius, intelek serta sehat jasmani dan rohani), serta tingginya kualitas lingkungan tetap terjaga dan berkesinambungan.

## **(3) Arah Kebijakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan**

Guna mengoptimalkan *span of control*, Pemerintah Kota Parepare mendorong belanja pemerintah kota untuk mendukung kebijakan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, bukan hanya harus meningkat jumlahnya setiap tahun, tetapi kontribusinya terhadap total belanja juga ditingkatkan hingga mencapai 4,65% pada tahun 2013, atau rata-rata mencapai 4,30% terhadap kebutuhan belanja (*fiscal needs*) setiap tahunnya selama periode 2009-2013.

Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam mengelola kewenangan yang telah dimiliki dan dilimpahkan Pemerintah Kota sesuai kemampuannya. Pelimpahan kewenangan yang disertai pendanaan ini, bukan hanya dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga penyelesaian permasalahan pada tingkat lokalitas yang akan mengakumulasi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga arah kebijakan belanja daerah, yaitu arah kebijakan belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan; belanja modal; serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebagaimana diutarakan di atas, secara spesifik memberikan arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Parepare selama periode lima tahun ke depan, antara lain sebagai berikut: (1) Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota; (2) Meningkatkan alokasi belanja pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat; (3) Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja; (4) Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan; (5) Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk: (i) industri-industri produk lokal dan kelompok ekonomi lemah; (ii) bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial; (6) Pemerintah Kota harus melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritas program-program pembangunan strategis.

### **3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang.

Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Melalui PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah telah mengatur alokasi pengeluaran daerah, jika terjadi surplus anggaran antara lain: (i) transfer ke dana cadangan; (ii) penyertaan modal Pemda dalam BUMD; (iii) pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; (iv) pembayaran utang kepada pihak ketiga. Sedangkan jika terjadi defisit anggaran, sumber penerimaan daerah, antara lain: (i) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau biasa disingkat SiLPA tahun lalu; (ii) transfer dari dana cadangan; (iii) penerimaan pinjaman dan obligasi; serta (iv) hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Kota Parepare dalam lima tahun ke depan (2009-2013), menunjukkan arah kebijakan keuangan daerah yang ekspansif dalam dua tahun anggaran dan selebihnya menganut kebijakan keuangan yang lebih konservatif (hati-hati). Kebijakan pembiayaan daerah yang ekspansif, yakni dengan mendorong belanja daerah yang lebih besar, melebihi kemampuan pendapatan daerah, sehingga terjadi transaksi keuangan daerah yang defisit. Hal ini dibutuhkan untuk menggairahkan perekonomian daerah dengan

semakin besarnya belanja pemerintah daerah, khususnya pada aktivitas ekonomi daerah yang bersifat strategis akan memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih cepat dan bergairah secara keseluruhan.

Sebaliknya, kebijakan keuangan yang konservatif menunjukkan sikap kehati-hatian dari pemerintah daerah di dalam membelanjai program dan kegiatan pemerintah, sehingga transaksi keuangan daerah menjadi surplus. Hal ini penting, di samping untuk menahan gejolak terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga umum pada satu sisi, pada sisi yang lain, surplus anggaran juga dapat terjadi karena kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat luas untuk bertanggung jawab dalam pembangunan fasilitas-fasilitas sosial dan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan. Jadi surplus dalam konteks kebijakan ini, bukan menghentikan aktivitas pembangunan, tetapi diarahkan pada keterlibatan masyarakat yang luas, sehingga pembangunan daerah tidak semua harus menjadi beban keuangan daerah.

Berdasarkan perspektif tersebut, arah kebijakan pembiayaan Kota Parepare pada tahun pertama menganut prinsip anggaran yang surplus. Transaksi keuangan daerah yang surplus pada tahun pertama ini bukan disebabkan oleh tingginya pendapatan daerah, tetapi merupakan suatu langkah kehati-hatian dari Pemerintah Kota dalam membelanjakan keuangan daerah. Hal ini penting untuk dilakukan terutama untuk menjaga gejolak inflasi dan ketidakstabilan perekonomian secara umum sebagai dampak dari krisis global yang melanda perekonomian dunia dan nasional. Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam membelanjakan keuangan daerah diperlukan untuk mengatasi kondisi uncertainty menghadapi pesta demokrasi PEMILU Legislatif dan PEMILU Presiden/Wakil Presiden 2009.

Pada tahun kedua dan ketiga, Pemerintah Kota mulai menerapkan kebijakan ekspansif dengan mendorong belanja daerah yang lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga terjadi defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan defisit pada tahun kedua dan ketiga ini diperlukan untuk memberikan rangsangan untuk bergulirnya perekonomian daerah yang lebih cepat guna mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas. Kebijakan anggaran defisit ini ditempuh dari dua sisi, yakni pada sisi pendapatan daerah, Pemerintah Kota harus berhati-hati menerapkan Perda pendapatan yang dapat menimbulkan biaya dan beban tinggi bagi aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pada melemahnya investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pada sisi belanja daerah, Pemerintah Kota harus berani meningkatkan belanjanya pada sektor-sektor ekonomi atau aktivitas ekonomi strategis atau pada fasilitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memiliki dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, sehingga memiliki daya dorong yang tinggi untuk kemajuan perekonomian daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga umum berkaitan dengan peningkatan belanja daerah ini, Pemerintah Kota harus cermat mengalokasikan belanjanya, selain untuk tujuan pembangunan sektor-sektor strategis, juga diperlukan pemberian subsidi khususnya kepada produk-produk industri lokal sehingga mampu tetap menjaga tingkat harga untuk tetap stabil dan kondusif bagi perekonomian daerah.

Pada tahun keempat dan kelima, implementasi program-program yang mengarah kepada percepatan aktivitas perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dijalankan dalam dua tahun sebelumnya, diharapkan mampu menciptakan stabilitas makro ekonomi daerah dan kehidupan sosial masyarakat yang seimbang. Hasil ini akan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat bisnis dan individu untuk berpartisipasi secara baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga

sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting dapat disediakan oleh individu dan swasta dan APBD hanya sekedar pendamping atau sama sekali tidak melibatkan APBD, antara lain fasilitas kebersihan dan keindahan kota, infrastruktur pariwisata, infrastruktur ekonomi dan transportasi, dan lain sebagainya.

### **(1) Arah Kebijakan Pembiayaan Defisit**

Kebijakan pokok yang mendapat perhatian dalam mengatasi defisit anggaran diarahkan kepada upaya-upaya untuk memperoleh pinjaman daerah, baik melalui pinjaman luar negeri ataupun dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, maupun dari masyarakat luas melalui penerbitan obligasi daerah.

*Pinjaman daerah*, khususnya yang berjangka menengah dan panjang dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk menutup defisit APBD Kota Parepare yang terjadi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan perencanaan pinjaman daerah ini memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini: *Pertama*, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya. *Kedua*, rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio-DSCR*) paling sedikit 2,5. *Ketiga*, tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. *Keempat*, mendapatkan persetujuan dari DPRD, persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

*Obligasi daerah*, pemerintah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah. Sumber pembiayaan ini untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Parepare secara luas.

### **(2) Arah Kebijakan Pembiayaan Surplus**

Kebijakan pokok yang mendapat perhatian dalam mengalokasikan surplus anggaran yaitu diarahkan kepada upaya-upaya untuk mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah kepada sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan *cost recovery* yang tinggi dan mampu mendorong peningkatan PAD dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan penciptaan *cost recovery* tertinggi diarahkan untuk pengalokasian pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal yang bersifat produktif, baik yang diimplementasikan di dalam maupun di luar Kota Parepare.

Penyertaan modal yang diperoleh dari surplus anggaran untuk jenis-jenis usaha produktif yang mampu bergulir cepat, sehingga dana yang diinvestasikan akan cepat kembali untuk menjadi sumber pembiayaan daerah. Penyertaan modal daerah dalam kategori seperti ini antara lain dapat dilakukan untuk usaha perbankan daerah ataupun nasional, pembelian saham-saham potensial dan lain sebagainya. Sedangkan alokasi pengeluaran daerah dari surplus anggaran yang ditujukan untuk peningkatan PAD, arah kebijakannya terutama ditujukan untuk pengembangan dan pembangunan Perusahaan Daerah non pelayanan kebutuhan dasar (PDAM). Perusahaan-perusahaan daerah yang potensial untuk mengembangkan industri dan distribusi produk barang dan jasa lokal, antara lain industri perikanan dan jasa kepelabuhanan, industri pariwisata, agroindustri dan lain sebagainya.

## BAB IV

### ANALISIS DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

#### A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS WILAYAH

##### 1. Analisis Lingkungan Internal

###### **Kekuatan**

- a. Posisi Kota Parepare sebagai perlintasan darat arus pergerakan manusia, barang dan jasa antara Ibu Kota Provinsi (Makassar) dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
- b. Keberadaan teluk dan pelabuhan Parepare sebagai sarana perhubungan laut ke berbagai daerah Indonesia dan Luar Negeri untuk angkutan manusia dan barang ke berbagai daerah Indonesia dan luar negeri.
- c. Keberadaan pusat pertokoan, perdagangan dan kuliner sebagai daya tarik untuk persinggahan.
- d. Keberadaan rumah sakit umum Andi Makkasau sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan bagi wilayah sekitarnya.
- e. Posisi sebagai pusat kegiatan bagi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare dan dukungan daerah-daerah sekitarnya.
- f. Heterogenitas masyarakat sebagai modal sosial bagi kehidupan multikultur yang madani.

###### **Kelemahan**

- a. Wilayah kota yang relatif sempit sehingga pengembangan kawasan pemukiman dan perkantoran terbatas.
- b. Fasilitas, sarana, prasarana fisik kota dan pelabuhan belum tertata dan berfungsi optimal bagi kemajuan kota.
- c. Tatanan kota belum atraktif bagi berkembangnya kegiatan kesenian, olah raga, serta ilmu dan teknologi sebagai penanda bagi citra kota yang madani.
- d. Kualitas pengetahuan dan dinamika wawasan masyarakat belum memadai dalam merespon tuntutan globalitas dan modemitas.
- e. Posisi sebagai kota persinggahan dan pelabuhan, dibalik nilai kekuatannya, juga mengandung kelemahan terkait masalah sosial dan kesehatan yang menjadi konsekuensinya.

##### 2. Analisis Lingkungan Eksternal

###### **Peluang**

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberi peluang bagi inisiatif dan kreativitas dalam menjalankan pelayanan dan mendorong kemajuan.
- b. Dukungan donor dalam penyelenggaraan program untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium (*Millennium Development Goals*).

- c. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan program-program strategis bagi visi nasional dan provinsi.
- d. Prospek kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan investasi dan implementasi pembangunan.
- e. Keberadaan lembaga non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat/LSM) sebagai mitra-sinergis-kritis pemerintah dalam mendorong kemajuan.
- f. Peningkatan mobilitas manusia di Kawasan Timur Indonesia sebagai konsumen pelabuhan Parepare.
- g. Peningkatan jumlah dan kualitas produk daerah sekitar yang memanfaatkan Kota Parepare sebagai pusat pengolahan perdagangannya.

### **Ancaman**

- a. Dinamika perekonomian global, nasional dan regional yang cepat dan tidak menentu yang mempengaruhi layanan sebagai kota niaga.
- b. Dinamika politik nasional dan regional yang tinggi dan rawan pergesekan antar golongan dan lapisan sehingga bisa mengganggu kegiatan ekonomi dan ketenteraman masyarakat.
- c. Ekspansi nilai-nilai global dan modernitas yang mempengaruhi tindakan, perilaku, gaya hidup dan tatanan kehidupan generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pertumbuhan populasi dan tingkat urbanisasi yang semakin meningkatkan kebutuhan atas sumberdaya dan fasilitas bagi pemukiman dan aktivitas sosial-ekonomi.
- e. Dinamika dan kompleksitas aktivitas sosial-ekonomi yang dapat mendorong degradasi lingkungan.
- f. Tekanan atas lingkungan pantai, laut, dan sungai akibat aktivitas sosial-ekonomi daerah sekitar.
- g. Perkembangan sejumlah penyakit terkait perkembangan Kota Parepare sebagai pusat persinggahan dan pelabuhan.
- h. Pengaruh perubahan iklim global terhadap keberadaan laut dan pantai serta ekologi Kota Parepare.

### **B. Isu-isu Strategis**

Berdasarkan analisis terhadap kecenderungan sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang potensial mempengaruhi perkembangan kota Parepare ke depan, maka sejumlah isu strategis yang dianggap urgen diperhatikan bagi perumusan arah pembangunan 2008-2013 adalah sebagai berikut :

#### **1. Kualitas dan Akses Pendidikan**

Parepare sebagai kota kedua terbesar di Sulawesi Selatan berpotensi besar dalam mendorong pencapaian kinerja rata-rata pendidikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2008, dilihat dari indikator tingkat melek huruf, angka buta huruf di Parepare hanya 685 orang (3,80%) menurun dari 6,5% pada 2005. Angka putus sekolah untuk SD sebesar 20 orang, jumlah mengulang 366 orang. Angka putus sekolah untuk tingkat SMP sebanyak 36

orang, mengulang 23 orang. Angka putus sekolah pada tingkat SMA/SMK sebanyak 24 orang, mengulang 29 orang. Pada indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, pencapaian Parepare berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan. Dalam IPM, Parepare mencapai indeks 76,01, berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan.

Peningkatan kualitas, terkait luaran maupun proses belajar dan tenaga pendidik, merupakan salah satu isu penting dalam lima tahun ke depan. Tingkat kelulusan SLTP pada tahun 2007 hanya 97,80 %, sementara kelulusan tingkat SMU dan SMK lebih parah lagi, yakni hanya 90,89%. Masalah terkait adalah kualitas tenaga pengajar, kualitas proses belajar-mengajar, termasuk soal efektivitas dari penjerapan manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, perwujudan Parepare sebagai Kota Pendidikan menuntut pembenahan sejumlah masalah, terutama terkait dengan upaya memantapkan perwujudan Sekolah Unggulan dan Sekolah Bertaraf Internasional, peningkatan kinerja pendidikan tinggi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan berkualitas.

Angka Melek Huruf (AMH) Laki-Laki Kota Parepare tergolong tinggi dibanding dengan Perempuan. Hal ini terlihat pada tahun 2005 penduduk yang bisa tulis sekitar 97,88 persen dari total penduduk umur 10 tahun keatas, kemudian pada tahun 2007 naik menjadi sekitar 98,38 persen, AMH perempuan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 92,72 persen tahun 2005, menjadi 94,66 persen pada tahun 2007. Secara keseluruhan AMH di Kota Parepare pada tahun 2005 sekitar 93,50 persen naik menjadi sekitar 96,20 persen pada tahun 2007. Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Parepare walaupun persentasenya tergolong tinggi namun harus tetap mendapatkan perhatian agar kemampuan membaca baik Laki-Laki maupun Perempuan semakin meningkat. Angka Buta huruf di daerah ini relatif menurun yaitu dari 6,50 persen pada tahun 2005 menjadi sisa 3,80 persen pada tahun 2007.

Gambaran secara umum mengenai banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang sekolah tanpa memandang atau tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan antara lain dapat juga dilihat dengan meningkatnya APS. APS untuk usia sekolah dasar di Kota Parepare mengalami kenaikan antara kurun waktu 2005-2007. Pada tahun 2005 APS SD (7-12) sekitar 95,54 relatif naik menjadi sekitar 95,87 persen pada tahun 2007. Kemudian APS Sekolah Lanjutan Pertama meningkat, dari 85,00 pada tahun 2005 menjadi 90,81 di tahun 2007, APS Sekolah lanjutan Atas mengalami penurunan dari sekitar 68,63 tahun 2005, menjadi tinggal 55,77 tahun 2007. Selanjutnya APS untuk umur 19-24 (D1-S1) mengalami peningkatan yang besar dari 13,49 persen pada tahun 2005 menjadi 21,61 persen pada tahun 2007.

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju atau mundurnya dunia pendidikan di Kota Parepare. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelengkapan dan penyebaran jumlah guru pada sekolah-sekolah. Isu yang masih sering terdengar bahwa banyaknya guru enggan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang tidak favorit atau daerah pinggir kota,



sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di sekolah-sekolah tertentu.

Fasilitas pendidikan mulai dari tingkatan Taman Kanak-Kanak sampai SMU/ sederajat di Kota Parepare persebarannya relatif merata karena terdapat di setiap kecamatan, sehingga aksesibilitas anak sekolah cukup mudah dan terjangkau.

## **2. Akses dan Derajat Kesehatan**

Kota Parepare memiliki potensi untuk berkontribusi bagi daerah sekitarnya untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Potensi ini terkait dengan keberadaan Rumah Sakit A. Makkasau yang berkualifikasi sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat Parepare dan daerah sekitarnya. Sebagai rumah sakit rujukan, terdapat potensi pengembangan yang belum direalisasikan seperti perawatan VIP, pembukaan poli geriatric, poli AIDs serta pembukaan layanan hemodialisa/cuci darah.

Dilihat dari indikator angka harapan hidup (AHH), pada tahun 2007 AHH penduduk Parepare mencapai 72,9 tahun, meningkat dari 72,70 tahun (2005) dan 72,70 tahun (2004). Angka ini berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan yang pada tahun 2006 sebesar 69,20 tahun, 2005 (68,70) dan 2004 (68,70). Daerah sekitar Parepare juga mencapai AHH cukup tinggi pada tahun 2006 yakni Enrekang (73,70), Sidrap (70,80) dan Pinrang (70,70). Hanya Barru yang AHHnya dibawah rata-rata Sulawesi Selatan yakni 67,60.

Namun demikian, sebagai kota persinggahan dan pelabuhan, di Parepare terdapat potensi masalah kesehatan yang bisa berkembang serius. Di Parepare sudah ditemukan sejumlah penderita HIV/AIDs. Data tahun 2007 menunjukkan 48 kasus HIV/AIDs dan meninggal 16 orang. Begitu pula angka pengguna narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Penderita gizi buruk juga masih ditemukan, pada tahun 2006-2007 tercatat 11 orang anak dan balita penderita gizi buruk yang dilayani. Isu kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian poenyakit, kesehatan keluarga tetap akan signifikan dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Disamping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk. Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

Indeks kesehatan diwakili dengan Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibanding kesehatan. Pada tahun 2007 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 72,90 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2005-2007. Sementara itu indeks kesehatan Kota Parepare tahun 2007 masih lebih tinggi dibanding dengan indeks kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2007 yaitu sekitar 69,40 persen. Walaupun indeks kesehatan di daerah ini, relatif membaik atau sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Sulawesi Selatan, akan tetapi perhatian di bidang ini perlu dipertajam lagi.

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sejak dini keadaan gizi perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti upaya telah ditempuh oleh pemerintah selama ini diantaranya pemberian zat besi terhadap ibu-ibu, pemberian kapsul yodium (untuk ibu hamil, ibu nifas dan WUS) dan pemberian kapsul vitamin A kepada balita. Selanjutnya berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Parepare menunjukkan bahwa balita yang berstatus gizi buruk di temukan. Kemudian pada tahun 2007 kondisi balita yang berstatus gizi buruk, ada satu dua tapi telah ditangani dengan baik dari Dinas Kesehatan Kota Parepare. Data susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kota Parepare sekitar 34,39 persen pada tahun 2005, kemudian menurun menjadi 26,19 persen dari total penduduk pada tahun 2007. Banyaknya penduduk yang mengeluh diduga akibat perubahan cuaca yang tidak menentu atau siklus lima tahunan. Sementara kalau dilihat dari jenis kelamin maka persentase laki-laki yang mengeluh sekitar 26,41 persen dari jumlah penduduk dan perempuan sekitar 25,98 persen pada tahun 2007, laki-laki lebih banyak mengeluh dibanding perempuan ini diduga karena laki-laki banyak yang merokok dan minum minuman keras dari perempuan.

### **3. Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin Kota Parepare tahun 2007 berdasarkan perhitungan penerima BLT adalah 6.256 RTP, tersebar di Kecamatan Bacukiki sebanyak 3.362 RTP, Kecamatan Ujung 1.106 RTP, Kecamatan Soreang 1.797 RTP. Jumlah penduduk miskin telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebagai hasil dari upaya pembangunan dan pelayanan. Namun demikian, dalam lima tahun kedepan, reduksi kemiskinan tetap menuntut prioritasasi.

Masalah kemiskinan di Kota Parepare lebih banyak terkait dengan masalah sosial perkotaan seperti keberadaan pemukiman kumuh, gelandangan dan peminta-minta, penganggur terbuka dan golongan rentan lainnya. Tantangan dalam lima tahun mendatang bukan hanya bagaimana memfasilitasi akses lapangan kerja dan usaha, tetapi juga pemenuhan hak dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bahkan jaring pengaman untuk pangan dan sandang.

#### 4. Perekonomian Daerah

Sebagai sebuah kota, struktur perekonomian Kota Parepare dikontribusi lebih signifikan oleh sektor yang lebih banyak menghasilkan produk sekunder dan tersier yakni perdagangan, hotel dan restoran (28,05%), angkutan dan komunikasi (23,52%), keuangan, persewaan dan jasa bisnis (12,56%) serta jasa pemerintah dan swasta (14,61%). Sementara itu, kontribusi pertanian relatif rendah (7,50%) begitupula industri pengolahan (hanya 2,88%).

Di balik kondisi struktural demikian, salah satu isu strategis dalam lima tahun ke depan adalah terkait dengan eksistensi ekonomi kerakyatan. Sektor hotel dan restoran serta angkutan dan komunikasi dominan melibatkan pelaku usaha bermodal besar, begitu pula sektor perdagangan. Namun demikian, keterlibatan modal besar ini belum sampai mencitrakan Kota Parepare dengan simbol modernitas perdagangan/konsumsi, misalnya melalui eksistensi Pusat Perbelanjaan Modern (mall). Kota Parepare justru tercitrakan sebagai pusat perdagangan barang bekas (pakaian cap karung/cakar) dan penjualan barang impor dari Malaysia. Pada sisi ini, terimplisitkan tantangan modernisasi untuk menguatkan citra Parepare sebagai Kota Niaga.

Di sisi lain, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah juga menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan, guna menghindari dominasi pelaku usaha besar yang bisa mendorong kesenjangan. Pengembangan sektor pengolahan juga perlu menjadi perhatian, selain untuk lebih optimalnya posisi strategis sebagai kota yang memiliki pelabuhan, juga untuk melayani kebutuhan daerah hinterland yang dominan menghasilkan produk primer.

Eksistensi Kantor Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare merupakan potensi bagi promosi dan realisasi investasi bagi Kota Parepare. Namun demikian, upaya pengembangan kawasan cepat tumbuh dan strategis dengan mengharapkan peran investor masih terkendala kekurangsiapan sarana penunjang, sementara sinergitas Parepare dengan daerah hinterlandnya dalam mendorong realisasi investasi belum optimal.

Keadaan perekonomian Kota Parepare selama 5 (lima) tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita, baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,23% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara riil di Kota Parepare. Gambaran ini sekaligus juga mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas masyarakat secara makro.

**Secara absolut, perkembangan harga 9 bahan pokok yang ada di Kota Parepare dari waktu ke waktu dapat dilihat dari rata-rata harga masing-masing komoditi pada Tabel 19. Berikut.**

**Tabel 14. Perkembangan Rata-rata Harga 9 Bahan Pokok di Kota Parepare, Tahun 2000-2007**

Komoditi	Satuan	2000 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	Pekembagan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Beras	Kg	1.741	2.330	2.450	2.650	3.800	4.600	18,54
2. Ikan Asin	Kg	15.783	18.000	18.700	18.900	19.000	22.500	5,74
3. Ikan Teri Kering	Kg	23.000	26.000	27.500	29.000	30.000	35.000	7,71
4. Minyak goreng	Liter	3.296	4.500	5.200	5.250	5.600	10.200	22,70
5. Gula Pasi	Kg	3.000	4.450	6.200	6.300	6.400	6.800	11,18
6. Garam	Kg	500	850	900	1.000	1.000	1.000	4,15
7. Minyak Tanah	Liter	450	950	1.000	2.300	2.300	2.500	27,37
8. sabun Cuci	Batang	1.650	2.500	2.750	3.000	3.000	3.250	6,78
9. Tekstil	Meter	9.000	17.500	20.000	25.000	25.000	27.500	11,96
10. Kain Batik	Helai	40.000	57.500	62.500	66.500	66.500	68.500	4,47

*Sumber : BPS Kota Parepare 2008*

Dalam kurun waktu 2003-2007, harga masing-masing komoditi menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Pada umumnya meningkat pada semua harga komoditi. Dengan membandingkan rata-rata harga pada tahun 2006 dengan harga yang cukup tinggi. Dari tabel 14 terlihat semua jenis komoditi mengalami kenaikan. Kenaikan indeks harga yang cukup tinggi terjadi pada Minyak tanah (27,37%), Beras (18,54%), Tekstil (11,96%), dan Gula Pasir (11,18%). Beberapa kenaikan harga yang menyolok umumnya terjadi disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Dan hal ini terjadi secara merata di semua Propensi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun dari berbagai pengaruh eksternal dan internal tersebut, penduduk Kota Parepare masih bisa mencukupi kebutuhannya walaupun harga selalu berubah naik.

Walaupun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mengalami peningkatan, hal ini belum mencerminkan pemerataan di semua bidang (sektor ekonomi), tidak hanya disektor perdagangan, keuangan, angkutan dan jasa-jasa yang selama ini menguasai perekonomian Kota Parepare. Perlu pertumbuhan yang merata terhadap seluruh sektor agar peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat dapat juga merata.

## **5. Sarana dan Prasarana Fisik Perkotaan**

Sebagai kota perlintasan antar Kabupaten bahkan Provinsi, sarana dan prasarana fisik perkotaan di Parepare cukup terbebani intensitas dan kualitas pemanfaatannya. Ini terutama terkait dengan tuntutan ketersediaan sarana jalan, drainase dan perhubungan yang fungsional. Permasalahan utama adalah kerusakan jalan dan saluran drainase setiap tahun. Pada tahun 2007/2008, jalan rusak mencapai 34.000 meter, sementara drainase rusak mencapai 17.000 meter. Di Kota Parepare terdapat banyak titik banjir, terutama karena saluran drainase selalu tertimbun saat hujan karena besarnya volume aliran air dari lokasi ketinggian. Kerusakan jalan dan drainase juga terkait dengan aktivitas penggalian untuk berbagai kepentingan seperti saluran telpon, bangunan tower dan sebagainya. Dalam mewujudkan citra madani, ketercukupan trotoar bagi pejalan kaki juga semakin mendesak.

Sarana dan prasarana dari segi kelancaraan perlintasan angkutan juga merupakan isu strategis dalam perkembangan Parepare lima tahun kedepan. Seiring dengan perbaikan dan pelebaran jalan trans-Sulawesi, intensitas kendaraan yang melintasi Parepare akan makin meningkat, karena itu memerlukan pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, sarana dan fasilitas perhubungan serta sarana dan fasilitas LLAJ yang lebih meningkat lagi.

Dalam lima tahun ke depan, antisipasi atas perkembangan kawasan strategis cepat tumbuh perlu dimantapkan perencanaannya, dalam kaitan ini terkait dengan kecukupan sarana dan prasarana untuk ketersediaan energi, air bersih dan akses lokasi. Begitu pula sarana dan prasarana untuk optimalisasi fungsi lokasi reklamasi pantai untuk pengembangan pelabuhan ikan.

## **6. Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota**

Dalam lima tahun ke depan, pemenuhan ruang terbuka hijau sebanyak minimal 30% dari luas wilayah merupakan isu yang strategis. Di satu sisi, Parepare sebagai kota dengan luas wilayah yang sempit dan sudah padat pemukiman, menghadapi kesulitan dalam memenuhi luasan tersebut. Di sisi lain, dengan kepadatan kendaraan bermotor sebagai kota perlintasan Parepare dituntut memiliki banyak pohon demi meredam polusi udara. Apalagi Parepare ingin diwujudkan sebagai Kota Hijau.

Saat ini terdapat sejumlah potensi yang memerlukan pembenahan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Hutan Jompie dengan luas 13,5 ha, hutan raya Alitta dengan luas 80 ha dan tambahan untuk hutan raya Bacukiki seluas 100, kesemuanya memerlukan penataan batas fisik kawasan dan pemanfaatan dalam kawasan. Hutan Bacukiki potensial dikembangkan sebagai hutan konservasi plasma nutfah. Sejumlah lahan lembah dan tebing memerlukan penataan untuk dapat berfungsi sebagai area tangkapan hujan sekaligus hutan kota, guna menghindari penggarapan terus menerus yang dapat menyebabkan longsor. Pada pusat kota, daya serap tanah terhadap air semakin berkurang, berhubung permukaan yang ada telah tertutup aspal dan semen.

Penataan lingkungan pantai juga menjadi isu strategis dalam lima tahun ke depan. Sejumlah lahan hasil reklamasi pantai seperti pantai Mattirotasi, Tonrangan, dan Labukkang, memerlukan pembenahan lebih jauh agar efektif berfungsi, baik dalam bentuk tambahan reklamasi, pemanfaatan secara jangka pendek, pembangunan sarana dan sebagainya. Perlindungan atas lokasi terumbu karang di Tonrangan serta reboisasi hutan mangrove yang terus mengalami degradasi di muara sungai Karajae, juga merupakan isu penting.

Dalam lima tahun ke depan, antisipasi terhadap perubahan iklim global juga dapat menjadi isu strategis bagi Parepare. Populasi biota laut di Teluk Parepare dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan, bila pemanasan suhu air laut benar-benar terjadi sebagai dampak pemanasan global, maka ancaman bagi biota laut tersebut makin besar. Begitu pula dengan isu kenaikan permukaan air laut, sebagai kota pantai dan pelabuhan Parepare akan amat terpengaruh oleh dampak demikian.

Kebersihan dan keindahan kota juga memerlukan pemeliharaan dan pemantapan dalam mewujudkan Parepare sebagai Kota Hijau. Meskipun Parepare telah berprestasi memperoleh Piala Adipura, dalam lima tahun kedepan sejumlah masalah memerlukan pembenahan seperti keterbatasan armada pengangkutan dan tenaga pengumpul sampah, diperlukannya pengelolaan sampah secara lebih permanen dalam bentuk daur ulang dan pengomposan sampah, papan reklame, patung dan taman kota yang memerlukan penataan estetik, serta tuntutan pemantapan kesadaran kebersihan dan etika lingkungan secara umum bagi warga masyarakat.

## **7. Seni Budaya dan Pariwisata**

**Dalam mewujudkan citra madani dalam lima tahun ke depan, yakni kota sejahtera dengan peradaban yang tinggi, salah satu tantangan strategis yang dihadapi Kota Parepare adalah bagaimana mendinamiskan kegiatan seni-budaya secara terkait dengan kegiatan pariwisata. Citra madani amat ditandai oleh apresiasi seni budaya dibalik harmoni heterogenitas masyarakat.**

Terkait dengan hal ini, belum berkembang sebuah kelembagaan yang mengelola apresiasi seni budaya, misalnya sebuah Dewan Kesenian yang fungsional. Selain itu, wadah untuk merangsang apresiasi karya seni budaya dalam bentuk Gedung Kesenian juga belum berfungsi optimal, dan ini seiring dengan fenomena kurang bergairahnya aktivitas dari para penggiat seni untuk menggelar atraksi seni-budaya. Pada hal, pada tahun 1970-an di Parepare berkembang pesat aktivitas seni budaya, terutama digerakkan oleh tokoh seni tari Sulawesi Selatan Ibu Ida Yusuf Madjid.

Dalam lima tahun kedepan, bila pada budaya material Parepare telah mencapai sejumlah kemajuan, maka kemajuan pada budaya non-material seperti seni-budaya akan sangat menjadi kebutuhan vital warga kota guna mengisi ruang-ruang spiritual kehidupan. Kegiatan pariwisata sangat relevan dengan urgensi tersebut, bahwa ke depan Kota Parepare tidak hanya berperan sebagai tujuan wisata karena posisinya sebagai perlintasan yang menyediakan

souvenir khas dan lainnya, tetapi juga karena Parepare memiliki atraksi seni-budaya yang berdaya tarik bagi pelintas dan warga daerah sekitar.

## **8. Ilmu dan Teknologi**

Dalam lima tahun ke depan, tantangan perwujudan citra madani Kota Parepare juga sangat terkait dengan sampai mana ilmu-pengetahuan dan teknologi mewarnai aktivitas yang dilakukan dan produk yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam memperoleh manfaat optimal atas berlakunya tatanan globalisasi, perwujudan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*), termasuk ekonomi/tata produksi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*), akan menjadi keniscayaan.

Salah satu isu krusial terkait dengan tantangan tersebut adalah belum optimalnya kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Sementara itu, cukup banyak pekerjaan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang idealnya melibatkan kajian dan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaiannya. Pada tataran praktis kehidupan masyarakat, kebutuhan akan aplikasi teknologi madya dalam berbagai kegiatan produksi masyarakat juga menjadi kebutuhan, agar nilai tambah dari produk dan layanan yang dihasilkan dapat meningkat.

## **9. Ketahanan Pangan dan Pertanian**

**Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Konsep pangan yang menyatakan beras sebagai satu-satunya makanan utama di Indonesia perlu diubah. Konsep pangan semacam itu dapat menjadi sumber terpuruknya nasib petani, dan hilangnya ragam pangan lain yang pernah ada. Padahal keragaman jenis bahan pangan itu bisa menghindari adanya krisis pangan.**

Terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan salah satu hak dasar warga. Dalam lima tahun ke depan, dari segi ketersediaan dan distribusi, Kota Parepare relatif tidak mendapatkan ancaman, mengingat daerah sekitarnya adalah daerah surplus pangan terutama beras, selain itu di Kota Parepare juga terdapat kegiatan budidaya pertanian. Masalah yang kemungkinan signifikan ke depan adalah soal keamanan pangan, terutama dari segi higienitas dan standar kesehatan, bukan hanya pada pangan utama beras tetapi juga pada pangan hasil olahan pabrik. Masalah keamanan obat-obatan, baik yang sifatnya sintetis buatan pabrik maupun

berbagai obat bukan buatan pabrik/tradisional, juga memerlukan perhatian lebih tinggi dalam lima tahun kedepan.

Diperlukan gambaran kesejahteraan petani saat ini yang akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, diantaranya yang utama adalah: Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya, Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi, Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan, Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik, Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai, Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (*bargaining position*) yang sangat lemah dan Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri.

Terkait dengan bidang pertanian, tantangan yang perlu direspons dalam lima tahun kedepan adalah bagaimana menghasilkan produk pangan dan hortikultura dengan menekankan pada kespesifikan kualitas tertentu misalnya beras aromatik dan hortikultura organik. Selain itu, pengembangan agrowisata juga potensial. Tantangannya adalah penguatan kapasitas penyuluh dan penguatan SDM serta kelembagaan petani guna mendorong pengembangan pertanian dengan kespesifikan tersebut, bukan untuk orientasi produksi secara massif.

## 10. Pelayanan Perizinan dan Investasi

Kota Parepare telah mencapai berbagai penghargaan dalam kinerja pelayanan publik untuk administrasi kependudukan, perizinan usaha dan investasi. Penghargaan yang diperoleh adalah sebagai Unit Pelayanan Percontohan Tingkat Nasional (2006) dan sebagai daerah *best-practice* pelayanan satu atap dari Depdagri (2004).

Saat ini terdapat 18 jenis perizinan yang dikelola secara satu atap dan sudah memiliki standar persyaratan dan waktu pengurusan yang telah tersosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Item-item tersebut adalah: IMB, Izin Tempat Usaha (SITU/HO), Izin Pemasangan Reklame, Izin Penggunaan Pelataran, Izin Penggunaan Alat Berat, Izin Trayek Angkutan Kota, Akta Catatan Sipil, KTP, Kartu Keluarga, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Usaha, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Ruang, Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Pengurusan berbagai perizinan ini telah memanfaatkan teknologi informasi dan Local Area Network (LAN).

Dalam mewujudkan Parepare sebagai Kota Pelayanan dalam lima tahun kedepan, tuntutan yang harus dipenuhi akan makin kompleks di tengah perubahan yang makin dinamis. Karena itu, cakupan urusan yang membutuhkan pelayanan akan bertambah dan kualitas pelayanan yang diekspektasi khalayak juga makin tinggi. Hal strategis terkait dengan ini adalah perluasan dari item urusan-urusan yang akan dilayani dengan prima serta peningkatan terus-menerus dari kualitas pelayanan itu sendiri.



## 11. Kelembagaan masyarakat

Di bidang sosial, peran lembaga yang sepenuhnya berkiprah dalam misi kemasyarakatan, juga kurang berkembang. Organisasi sosial dan berbagai organisasi pemuda, tetap memainkan peran tetapi loncatan yang berarti juga kurang tercapai. Sejumlah organisasi sosial-kemasyarakatan baru bermunculan, tetapi keberfungsian belum cukup bagi terkuatkannya modal sosial dalam tetapan masyarakat. Bahkan sejumlah organisasi kemasyarakatan pada akhirnya juga banyak bergantung kepada pemerintah sebagai sponsor kegiatan.

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika perubahan dalam lima tahun ke depan, keberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan pada tingkat lokalitasnya merupakan keniscayaan. Ini terkait dengan kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Kecenderungan perkembangan pemerintahan juga semakin mengarah pada fungsi pemerintah yang lebih menekankan keberdayaan masyarakat dalam berjalannya fungsi-fungsi tersebut.

Dalam keswadayaan masyarakat, lembaga yang mendampingi masyarakat beradaptasi-kreatif terhadap perubahan, relatif sedikit jumlahnya. Perkembangan LSM dalam memfasilitasi *choice* dan *voice* pada berbagai bidang kehidupan memang cukup nyata. Beberapa LSM menangani bidang spesifik seperti lingkungan hidup, gender demokrasi dan HAM, teknologi pedesaan, dan lainnya. Faktanya, keswadayaan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan belum signifikan. Sehingga diperlukan Kelembagaan yang dulu fungsional dalam mengatasi kebutuhan/masalah lokalitas bias muncul kembali di Kota Parepare. Untuk pengembangan budaya lokal, lembaga-lembaga dari masyarakat belum berkembang optimal, pada hal ini sangat krusial untuk melahirkan masyarakat dengan identitas yang unik.

Permasalahan umum yang perlu direspons dalam lima tahun kedepan adalah tuntutan peningkatan kapasitas dari sejumlah kelembagaan pembangunan seperti PKK, Posyandu dan Karang Taruna agar bisa mengimbangi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan serta upaya pengembangan Balai Rujukan Keluarga dan Pelayanan Pembangunan (Baruga Sayang) sebagai kebijakan provinsi, juga merupakan tuntutan yang perlu direspons kedepan.

Perwujudan visi Kota Madani dalam lima tahun kedepan juga berhadapan dengan tantangan penguatan kelembagaan masyarakat sipil (*civil society organizations*) sebagai wadah bagi warga masyarakat mengartikulasikan aspirasi serta secara membantu pemecahan masalah anggota dan lingkungannya. Selain itu, penguatan kelembagaan profesi menjadi kebutuhan dalam mengoptimalkan peran dari setiap profesi bagi kemajuan kota.

## 12. Iklim Ketenagakerjaan

Terkait dengan posisi Kota Papare sebagai pelabuhan pemberangkatan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia tujuan Malaysia dan tujuan lainnya, tuntutan dalam pelayanan ketenagakerjaan menjadi lebih kompleks. Isu strategis terkait hal ini adalah belum optimalnya sentra pelayanan penempatan TKI dalam menjalankan fungsinya, belum optimalnya fungsi dari lembaga pelatihan kerja dan pencapaian standar kompetensi kerja.

Isu ketenagakerjaan lainnya adalah informasi pasar kerja yang memerlukan persebaran lebih luas dan lebih cepat, perbaikan hubungan industrial pekerja dengan pengusaha serta penegakan hak-hak pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Parepare. Masalah-masalah ini signifikan di Parepare terutama karena posisinya sebagai pusat perlintasan KTI ke Malaysia dan tujuan lainnya.

Dengan semakin meningkatnya penduduk, maka jumlah angkatan kerja di wilayah ini diperkirakan akan bertambah pula selama periode perencanaan. Pertambahan angkatan kerja tersebut berasal dari penduduk Kota Parepare yang ada saat ini, maupun migrasi penduduk dari daerah lain. Mengingat pertumbuhan penduduk alami kota Parepare yang relatif rendah, maka penambahan angkatan kerja diharapkan lebih banyak berasal dari luar wilayah ini ataukah berbanding lurus dengan gejala pertumbuhan penduduk. Dengan catatan tidak diciptakan jumlah pengangguran di Kota Parepare semakin meningkat akibat penetrasi tenaga kerja produktif potensial tersebut.

Oleh karena itu, peningkatan tenaga kerja terampil yang cukup tinggi diharapkan terjadi karena wilayah ini mempunyai potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang dapat dikembangkan, utamanya dalam sektor perikanan dan kelautan, agroindustri, dan kegiatan pariwisata yang kesemuanya membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat diandalkan. Dengan dukungan tenaga kerja tersebut, maka diharapkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang wilayah yang telah diuraikan pada sub-sub bab sebelumnya dapat terealisasi, dimana pada setiap kecamatan telah diarahkan peningkatan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi *leading sector* terhadap fungsi utama dan penunjangannya dapat lebih cepat terealisasi.

*Leading sector* akan lebih berarti bila ditunjang dengan kemampuan sumberdaya manusia dalam hal sektor unggulan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan database sumberdaya manusia yang lengkap, terutama mencakup :

- § Jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja
- § Jumlah tenaga kerja yang bekerja di setiap sektor produktif
- § Jumlah tenaga kerja, meliputi: pendidikan, bidang keahlian, dan tingkat keterampilan

- § **Pergerakan tenaga kerja, termasuk perpindahan dari daerah satu ke daerah lain atau dari sektor satu ke sektor yang lainnya, di dalam wilayah Kota Parepare sendiri maupun dari luar wilayah.**

### **13. Pemuda dan Olah Raga**

Dalam lima tahun ke depan, Kota Parepare juga akan semakin menghadapi tuntutan untuk menggairahkan kegiatan pemuda dan olah raga. Prestasi pemuda dan olah raga akan menjadi salah satu simbol prestasi daerah otonom.

Terkait dengan tuntutan ini adalah pembinaan olah raga ke arah pencapaian prestasi sekaligus segi hiburan dari sebuah olah raga. Salah satu ikon perkembangan olahraga di Kota Parepare yaitu Persipare sebagai simbol sepak bola Parepare memerlukan dukungan multi pihak agar tetap eksis, selain itu cabang olahraga potensil yang telah menghasilkan prestasi memerlukan pencarian bakat dan pembinaan yang serius.

### **14. Komunikasi dan Informasi**

Pada bidang komunikasi dan informasi, salah satu isu strategis adalah belum optimalnya penginformasian kebijakan dan pencapaian pemerintah kepada masyarakat serta belum berkembangnya media yang bisa mendorong kesadaran atas perwujudan visi daerah khususnya pencapaian Kota Hijau, Kota Pelayanan, Kota Pendidikan dan sebagainya. Dalam lima tahun ke depan, diperlukan adanya media siaran yang bisa secara terus menerus menyampaikan informasi terpercaya kepada masyarakat tentang perkembangan Kota Parepare secara umum dan penyampaian kebijakan serta kinerja kebijakan secara khusus.

Dalam lima tahun ke depan, diperlukan media siaran yang bisa secara terus menerus menyampaikan informasi terpercaya kepada masyarakat tentang perkembangan Kota Parepare secara umum dan penyampaian kebijakan serta kinerja kebijakan secara khusus. Penyampaian suara masyarakat melalui media demikian juga amat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Radio komunitas untuk isu terkait visi, misalnya dalam hal masalah lingkungan, masalah pendidikan dan masalah pelayanan publik, juga merupakan kebutuhan yang perlu ditingkatkan pemenuhannya ke depan.

### **15. Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Manengah**

Pada bidang industri, isu pokok dalam lima tahun ke depan adalah kebutuhan akan pengembangan sentra industri potensil, khususnya pada lokasi yang dipersiapkan sebagai kawasan bagi investor. Terkait dengan isu ini adalah penyelesaian sarana dan fasilitas pendukung pada kawasan yang telah disiapkan tersebut.

Masalah lain yang memerlukan pembenahan adalah pengembangan kemampuan teknologi industri bagi UKM, fasilitasi penyimpanan barang bagi pedagang kaki lima, dan pengembangan pasar/lods ikan. Upaya

pengembangan pasar lelang dan pemberian label halal produk juga masih menjadi masalah dalam lima tahun ke depan.

## **16. Kesejahteraan sosial**

Seiring dengan perkembangan kota, penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, manusia usia lanjut dan penyandang cacat merupakan fenomena sosial yang semakin signifikan. Selain itu, penanganan atas penyandang masalah sosial lain seperti wanita tuna susila, gelandangan dan peminta-minta, mantan narapidana serta penderita ketergantungan narkoba, dalam lima tahun kedepan tetap akan signifikan dan membutuhkan pelayanan pemerintah selain partisipasi masyarakat. Penanganan terhadap korban bencana alam merupakan upaya yang juga merupakan masalah signifikan dalam lima tahun kedepan.

## **17. Ketertiban, Keamanan dan Penegakan Hukum**

Sebagai kota dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, terkait dengan posisi sebagai kota persinggahan yang memiliki pelabuhan, masalah yang terkait dengan ketertiban, keamanan dan penegakan hukum juga demikian dinamis di Parepare. Dalam lima tahun kedepan, penurunan indeks kriminalitas menjadi tantangan pokok, demi terwujudnya citra Kota Madani.

Salah satu isu pokok terkait penegakan hukum adalah belum ditegakkannya sejumlah Peraturan Daerah secara sepenuhnya, sehingga kondisi ideal pada berbagai aspek kehidupan yang menjadi sasaran produk hukum tersebut tidak sepenuhnya terealisasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keamanan juga menuntut peningkatan dalam lima tahun kedepan.

## **18. Kelembagaan Pemerintah**

Dalam mewujudkan pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa, tuntutan penguatan dalam hal kapasitas sumberdaya aparatur, struktur organisasi dan pelembagaan aturan main, semakin dibutuhkan dalam lima tahun kedepan. Tantangan paling krusial adalah bagaimana menerapkan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*) didalam birokrasi pemerintah merespons dinamika dan kompleksitas fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu isu krusial terkait fungsi kelembagaan pemerintah adalah keterbatasan (terutama dari segi kualitas) dalam monitoring dan evaluasi program serta pengawasan. Dalam lima tahun kedepan, kapasitas pengawasan, monitoring dan evaluasi program amat menentukan efektivitas kinerja pemerintah, berhubung perubahan alamiah pada lingkungan eksternal demikian

tinggi sehingga perubahan terencana kearah yang diinginkan menuntut konsistensi tinggi antara rencana dan pelaksanaan.

Berbagai masalah lain yang memerlukan perhatian adalah pelaporan capaian kinerja dan keuangan mencakup ikhtisar realisasi kinerja, capaian kinerja, laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang memerlukan perbaikan pada seluruh SKPD, dan ini amat ditentukan oleh kapasitas SDM aparat. Pembinaan disiplin dan profesionalitas serta pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis substantif, tetap diperlukan dalam lima tahun kedepan.

Isu lain adalah penguatan kelembagaan pemerintah pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan perlu semakin jelas pendelegasiannya, kelembagaan tingkat kelurahan memerlukan peningkatan kapasitas terkait hubungannya dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demikian pula dengan peran RT/RW, fasilitasi perpustakaan kelurahan, fasilitasi pusat pelayanan keluarga dan pelayanan pembangunan (Baruga Sayang) dan sebagainya.

Dalam lima tahun kedepan, tantangan peningkatan kapasitas terkait proses legislasi perlu semakin diantisipasi, khususnya formulasi regulasi dan keputusan yang semakin pro-rakyat miskin, pro-kesetaraan gender, pro-kelestarian lingkungan, dan memantapkan tatakelola yang baik.

## **19. Sinergitas dengan Daerah *Hinterland***

Isu strategis terkait posisi Parepare sebagai simpul perlintasan barang, jasa dan manusia dengan daerah sekitarnya adalah bagaimana membangun kerjasama sinergis secara terencana dengan daerah sekitarnya, terutama daerah berbatasan yakni Sidrap, Pinrang dan Barru. Penekanannya adalah pemanfaatan peluang yang dapat lebih optimal bila melalui kerjasama daerah, baik dalam fungsi pelayanan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

## **20. Kehidupan Beragama**

Pengaruh globalisasi dan modernisasi dalam lima tahun kedepan akan semakin intensif. Penetrasi nilai dan gaya hidup global akan semakin kuat menjangkau setiap tatanan. Parepare sebagai sebuah kota tidak terhindarkan menghadapi pengaruh demikian. Tantangannya adalah bagaimana tetap mempertahankan nilai-nilai, noma-noma, tata perilaku dan gaya hidup yang tetap menunjukkan identitas Parepare sebagai kota religius yang mengedepankan citra madani dibalik penetrasi globalitas dan modernitas tersebut.

Dalam kehidupan beragama, meskipun penganut agama Islam dominan diantara semua warga, tetapi penganut agama lain yakni Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha juga cukup signifikan, dan selama ini hidup rukun dan toleran cukup terbangun dan terjaga diantara mereka. Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi yang lebih mendorong perikehidupan material dan

serba instan, upaya terencana untuk tetap memelihara spiritualitas dan kedalaman makna dalam kehidupan menjadi sebuah kebutuhan. Dalam merespons fenomena demikian inilah perwujudan Kota Rohani menjadi sesuatu yang sangat relevan.

## **21. Gender dan Perlindungan Anak**

Isu kesetaraan gender akan semakin signifikan dalam lima tahun kedepan, khususnya dalam mainstreaming gender pada perencanaan, implemementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan. Isu ini juga terkait dengan masih rendahnya indeks pemberdayaan dan pembangunan gender Kota Parepare sebagaimana halnya daerah di Indonesia secara umum.

Isu perlindungan anak terutama terkait dengan fenomena pekerja anak dimana sejumlah anak dipekerjakan dalam kondisi umurnya belum memenuhi syarat menurut peraturan. Kekerasan terhadap anak, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat secara umum, dalam lima tahun kedepan juga dapat menjadi isu startegis.

## BAB V

### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

#### 5. 1. Visi

Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 adalah :

***Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan***

*Bandar Madani* adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya berlangsung kehidupan yang sejahtera dan berperadaban dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman.

*Mandiri* adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya. Citra mandiri ditandai oleh pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, kemampuan memproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat, serta mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada.

*Religius* adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia.

*Berkomitmen Lingkungan* adalah kondisi tatanan masyarakat yang menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

#### 5.2. Misi

Misi pembangunan Kota Parepare dalam kurun waktu 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- c. Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota;
- d. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis;
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 5.3. Nilai-nilai Dasar

Untuk menjaga konsistensi antara pembangunan masa lalu dengan pembangunan mendatang sebagaimana yang tertuang pada Visi dan Misi yang dijabarkan ke dalam kebijakan pembangunan pada kurun waktu 2006-2008,

maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah beranjak dalam koridor norma-norma agama dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kota yang dinamis.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata pergaulan masyarakat nilai-nilai yang dianut berpedoman dan menjadi sumber inspirasi/kekuatan berdasarkan pada norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma hukum dan tata pergaulan yang harmonis. Adapun nilai-nilai yang menjadi bingkai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata pergaulan masyarakat di kota Parepare didasarkan pada tradisi masyarakat Kota Parepare dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam bentuk:

- **Sipakatau, sipakalebbi, simase-maseang**  
Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain dan senantiasa berlaku bijak duduk bersama merumuskan suatu masalah dan mencari jalan keluar yang terbaik, sebagai wujud pengakuan atas kesederajatan manusia ciptaan Tuhan.
- **Mali siparappe, malilu sipakainge, siwata menre tassiwata no**  
Saling mengingatkan, saling membantu dan tidak saling menjatuhkan.
- **Massidi siri, massidi gau**  
Bermusyawarah dan bertukar pikiran antara pemerintah dan masyarakat sebagai suatu keluarga untuk mencari solusi yang terbaik dalam suasana interaksi komunikatif yang kondusif.
- **Sipaiyya sipakkelo**  
Pemerintah dan masyarakat saling mufakat dan mengiyakan
- **Lempu getteng, ada tongen, temmapasilaingeng**  
Jujur, tegas, berani, kuat dalam pendirian, berpegang pada kebenaran, serta berlaku adil pada semua pihak.
- **Resopatemmangingngi namalomo naletei pammase dewatae.**  
Hanya dalam kerja keras terdapat kemudahan dan rahmat dari Tuhan
- **Kesetaraan**  
Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam lingkup tata pergaulan.
- **Akuntabilitas**  
Menjadikan setiap langkah dalam pengambilan kebijaksanaan, keputusan dan tindakan lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan kinerja yang telah disepakati bersama.



- **Transparansi**  
Mendorong timbulnya saling percaya antara komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, stakeholders lainnya melalui penyebarluasan media informasi yang akurat dan memadai.
  
- **Efektif dan Efisien**  
Penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia secara optimal yang berbasis pada pencapaian kinerja dalam menjamin terselenggaranya pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat.

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### A. Strategi

Pada prinsipnya, untuk penguatan pemerintahan dan pembangunan kedepan, strategi dasar yang akan dilakukan adalah reformasi lokal, yakni perubahan untuk penguatan lokal ini diharapkan menjadi dasar yang strategis bagi pelaksanaan misi dan perwujudan visi pembangunan daerah, mencakup aspek-aspek berikut :

*Reformasi Kebijakan*, mencakup penyesuaian semua kebijakan dan regulasi sehingga menjadi berpihak dan berbasis masyarakat.

*Reformasi Sumberdaya*, mencakup peningkatan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia, serta pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan.

*Reformasi Pelayanan*, mencakup perbaikan semua bentuk pelayanan publik, pemberlakuan/perbaikan standar pelayanan minimal, serta pengembangan partisipasi masyarakat secara lebih intensif.

*Reformasi Ekonomi*, mencakup penguatan ekonomi masyarakat pada semua sektor, didukung oleh penguatan peran investasi lokal dan investasi dari luar daerah.

*Reformasi Birokrasi*, mencakup penataan kelembagaan dan kewenangan, penguatan kompetensi dan keahlian, serta penciptaan pemerintahan yang bersih.

#### B. Arah Kebijakan

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan **Misi-1**: "*Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat*" adalah "*Pengembangan Parepare sebagai Kota Jasa dan Niaga*, dengan poin-poin arah kebijakan :

1. Penguatan tatanan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada sektor jasa, niaga dan industri, pengembangan kelembagaan usaha dan peluang berusaha, serta penciptaan daya saing usaha dan daya saing produk yang tinggi.
2. Pengembangan sistem dan kualitas pengelolaan sumberdaya alam untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, perhutanan, pertambangan, dengan penguatan pada sistem usaha lahan subtitudisional (agroindustri dan agribisnis yang didukung oleh teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran yang mutakhir).
3. Penguatan keseluruhan potensi investasi lokal dan pemberian peluang/kemudahan terhadap masuknya investasi dari luar (modal nasional/asing).
4. Peningkatan sistem dan kualitas pelayanan jasa ketenagakerjaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial, serta legalitas usaha.
5. Peningkatan pelayanan kepariwisataan, antara lain wisata berbasis agribisnis, ekowisata, wisata belanja, penyediaan sarana akomodasi untuk

- wisatawan, serta pengembangan daerah sebagai pusat informasi tujuan wisata regional.
6. Peningkatan pemantauan distribusi dan keamanan pangan dan obat-obatan;
  7. Pengembangan model-model pemanfaatan sumberdaya, lingkungan, sosial-budaya, yang mencirikan karakteristik masyarakat - kinerja dan produk khas lokal berbasis kerakyatan.

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan **Misi-2**: "*Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat*" adalah "*Pengembangan Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Kota Sehat*" dengan poin-poin arah kebijakan:

1. Pembangunan pendidikan dalam semua tingkatan dan disiplin/kejuruan, baik formal, informal dan nonformal – (prasekolah, dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi, dan luar sekolah), tuntas baca-tulis Al-Quran, serta penghapusan semua bentuk buta aksara dan buta angka, serta akselerasi pengembangan budaya baca.
2. Pengembangan sistem, sarana/prasarana, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan, yang dapat menjangkau semua orang, disertai dengan penguatan etika pendidikan.
3. Pengembangan kelembagaan dan sarana/prasarana untuk riset, rekayasa dan inovasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengembangan sistem, sarana/prasarana, manajemen dan layanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, yang dapat menjangkau semua orang, pengembangan sistem layanan rujukan antar-daerah, serta pengembangan layanan medik spesialistik

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan **Misi-3**: "*Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana dan fasilitas untuk kota*" adalah "*Pengembangan Parepare sebagai Kota Maju*" dengan poin-poin arah kebijakan :

1. Pengembangan Parepare sebagai "Kota Maju".
2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas air bersih, energi, tata air kota, transportasi dan komunikasi bagi aktivitas niaga, industri, jasa, rumah tangga dan publik.

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan **Misi-4**: "*Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan*" adalah "*Pengembangan Parepare sebagai Kota Hijau*" dengan poin-poin kebijakan :

1. Peningkatan kesadaran dan etika masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan serta peningkatan peran kelembagaan lingkungan dan pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan.
2. Perlindungan dan pelestarian fungsi-fungsi dan daya dukung sumberdaya dan lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan.
3. Pemenuhan ruang terbuka hijau minimal 30% dari total luas kota.
4. Penerapan praktek konservasi sumberdaya dan lingkungan, yang mencakup konservasi sumberdaya buatan, sumberdaya tidak terbarukan, dan

- sumberdaya terbarukan yang dilakukan oleh masyarakat, serta pengembangan konservasi sumberdaya alam secara *eks-situ*.
5. Pemanfaatan potensi sumberdaya dan lingkungan sesuai prinsip-prinsip pelestarian dan keberlanjutan, pengembangan inventarisasi dan penelitian sistem tata guna ruang dan lahan, pembangunan sarana/prasarana dan fasilitas, serta perluasan akses/informasi sumberdaya dan lingkungan.

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan **Misi-5**: "*Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius dan humanis* adalah "*Pengembangan Parepare sebagai Kota Rohani*" dengan poin-poin kebijakan :

1. Fasilitasi kecukupan sarana/prasarana dan fasilitas keagamaan, penguatan layanan umat, serta pembinaan manajemen dan lembaga-lembaga keagamaan.
2. Pembangunan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama, pemeliharaan hubungan yang harmonis antarumat beragama, antarumat seagama, dan antar umat beragama dengan pemerintah.
3. Pemantapan dan penguatan daya tangkal umat beragama terhadap gangguan dan ancaman, bahaya infiltrasi, fanatisme dan fundamentalisme ekstrem, sektarianisme, serta terorisme, yang dapat merusak kehidupan beragama dan kehidupan masyarakat.
4. Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang meliputi penguatan harkat dan martabat manusia sebagai umat beragama dan makhluk sosial.
5. Peningkatan daya apresiasi masyarakat terhadap arus globalisasi, kosmopolitansi, dan modernisasi, khususnya berupa pengaruh-pengaruh dari luar, disertai terbangunnya kesadaran dan daya tangkal yang baik.
6. Peningkatan daya akomodasi dan adaptasi masyarakat terhadap alih-budaya, alih-ilmu dan alih-teknologi, yang sifatnya dapat mendukung pengembangan jatidiri, dan dapat mengakselerasi pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.
7. Pengembangan masyarakat yang efisien dan efektif dalam memanfaatkan informasi, teknologi dan produk, dengan tetap menolak nilai-nilai konsumerisme, materialisme dan profanisme.

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan **Misi-6** : "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik*" adalah "*Pengembangan Parepare sebagai Kota Pelayanan*" dengan poin-poin kebijakan :

1. Penguatan sistem manajemen dan kebijakan pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat .
2. Pengembangan kelembagaan dan birokrasi pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan, keterpenuhan fungsi serta kemampuan aplikatif.
3. Pengembangan sumberdaya pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta penataan batas wilayah daerah.
4. Penyelenggaraan reformasi lokal yang meliputi pengembangan sistem regulasi berbasis masyarakat, peningkatan pelayanan, penerapan standar kinerja, serta penguatan potensi kelembagaan usaha masyarakat.

5. Penguatan sistem manajemen dan kebijakan pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat.
6. Pengembangan pemerintahan yang desentralistis dan otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih (*clean government*).

## BAB VII

### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan.

Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare dijabarkan dalam enam poin kebijakan yang saling terkait dan bersinergi satu sama lain yakni:

- (1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat;
- (2) Pengembangan Kualitas Manusia;
- (3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan;
- (4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
- (5) Pengembangan Kehidupan Beragama dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat ;
- (6) Perbaikan Tatakelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah.

#### 7.1. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paling penting dari upaya pembangunan. Kesejahteraan dimaksud mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam pembangunan Kota Parepare lima tahun kedepan, upaya yang dijalankan bukan hanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan melalui dorongan pertumbuhan, melainkan juga bagaimana kesejahteraan tersebut dinikmati secara relatif merata melalui akses sumber pendapatan yang baik, daya beli yang tinggi serta upaya perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

*Tujuan* dari kebijakan umum ini adalah:

- (1) Mendorong pertumbuhan dan memantapkan struktur ekonomi daerah;
- (2) Mengurangi jumlah penduduk miskin;
- (3) Memberikan perlindungan kesejahteraan sosial.

*Sasaran* yang hendak dicapai adalah:

- (1) Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat berada pada tingkat yang menjamin hidup bermartabat, tercermin pada PDRB Daerah, pendapatan perkapita, daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran;

- (2) Berkurangnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan yang tercermin pada terpenuhinya kebutuhan/hak dasar orang miskin semakin berkurang;
- (3) Tertanggulangnya berbagai masalah kesejahteraan sosial yang tercermin pada meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial baik melalui peran langsung pemerintah maupun melalui keterlibatan masyarakat.

### **7.1.1. Pemantapan Pelayanan Umum dan Investasi**

#### *Arah Kebijakan*

Pelayanan perizinan diarahkan pada terlayannya semua izin terkait pemangku kepentingan daerah dalam pelayanan satu atap serta semakin mantapnya penerapan prinsip pelayanan yang baik yakni kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dan perizinan, kedisiplinan, kesopanan, keramahan petugas serta kenyamanan. Pengembangan investasi diarahkan pada penataan kawasan yang dipersiapkan untuk investasi dalam bentuk penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi berjalannya investasi.

#### *Sasaran*

1. Semua bentuk perizinan terkait pemangku kepentingan daerah terlayani dalam sistem perizinan dan layanan administrasi satu pintu;
2. Prinsip pelayanan yang baik semakin mantap diterapkan dalam sistem pelayanan perizinan satu pintu;
3. Jumlah dan nilai investasi meningkat.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pemantapan pelayanan perizinan satu pintu;
2. Penataan kawasan investasi.

### **7.1.2. Pengembangan Iklim Ketenagakerjaan**

#### *Arah Kebijakan*

Pengembangan iklim ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja baik untuk pasar kerja domestik maupun untuk tenaga kerja Indonesia bagi pasar luar negeri, serta perbaikan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial.

#### *Sasaran*

1. Jumlah penganggur terbuka dan semi pengangguran dibawah rata-rata nasional dan rata-rata provinsi;
2. Kualitas keterampilan calon tenaga kerja untuk pasar domestik dan luar negeri memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja;
3. Informasi pasar dan bursa kerja mudah diakses oleh calon tenaga kerja;
4. Hak-hak pekerja terpenuhi.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
2. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

### **7.1.3. Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan**

#### *Arah Kebijakan*

Pembangunan industri dan perdagangan diarahkan pada pencapaian produktivitas industri dan volume perdagangan yang terus bertumbuh, dengan struktur industri dan perdagangan yang mantap bersinergi antara skala kecil dan menengah, dan dengan daya saing yang senantiasa bersesuai dengan tuntutan pasar domestik maupun internasional, dalam prinsip yang tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

#### *Sasaran*

1. Produksi dan produktivitas industri kecil dan menengah meningkat;
2. Volume dan nilai perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional meningkat;
3. Hak konsumen atas keamanan produk terlindungi.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengembangan sentra industri potensial;
2. Pengembangan industri kecil dan menengah;
3. Penguatan usaha agribisnis skala kelompok dan rumah tangga;
4. Peningkatan kemampuan teknologi industri;
5. Penataan struktur industri;
6. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional;
7. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
8. Peningkatan dan pengembangan ekspor;
9. Perlindungan konsumen.

### **7.1.4. Pengembangan Koperasi dan UMKM**

#### *Arah Kebijakan*



Pengembangan koperasi diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi agar efektif sebagai organisasi berbasis kolektivitas dalam mensejahterakan anggotanya. Pengembangan UMKM diarahkan pada berkembangnya produk unggulan spesifik lokal yang dikelola oleh UMKM dengan muatan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penciptaan nilai tambah produk.

#### *Sasaran*

1. Jumlah unit dan anggota koperasi meningkat;
2. Kesejahteraan anggota koperasi meningkat;
3. Aplikasi pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi UMKM berkembang;
4. Jumlah dan nilai produksi UMKM yang terpasarkan dalam negeri meningkat;
5. Jumlah dan nilai produksi UMKM yang terpasarkan untuk ekspor berkembang.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM;
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi K-UMKM;
4. Pembinaan produk yang berdaya saing.

### **7.1.5. Pembangunan Pertambangan dan Energi**

#### *Arah Kebijakan*

Pembangunan pertambangan dan energi diarahkan pada upaya pengelolaan potensi pertambangan yang senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta pembinaan ketenagalistrikan dan energi yang menjamin ketersediaan secara berkelanjutan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

#### *Sasaran*

1. Potensi pertambangan dimanfaatkan secara ramah lingkungan;
2. Kebutuhan masyarakat akan listrik dan energi lainnya terpenuhi secara berkelanjutan.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengawasan dan penertiban tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
2. Pembinaan dan pengawasan pertambangan;
3. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan/energi.

#### 4. Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

### **7.1.6. Pengembangan Pariwisata**

#### *Arah Kebijakan*

Pembangunan pariwisata diarahkan pada pemanfaatan posisi strategis Parepare sebagai kota persinggahan bagi aktivitas kepariwisataan melalui pelaksanaan even seni-budaya dan olahraga secara berkala, pengembangan ekowisata, serta wisata belanja dan kuliner.

#### *Sasaran*

1. Jumlah pengunjung wisata meningkat;
2. Pendapatan masyarakat dari jasa wisata meningkat;
3. Citra Parepare sebagai Bandar Madani terpromosikan.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Promosi dan pemasaran pariwisata;
2. Pengembangan sarana dan destinasi pariwisata;
3. Pengembangan kemitraan kepariwisataan.

### **7.1.7. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pertanian**

#### *Arah Kebijakan*

Pemantapan ketahanan pangan diarahkan pada pencegahan terjadinya kasus gizi buruk dan kurang gizi terutama pada balita dan ibu melahirkan serta terjaminnya keamanan produk-produk pangan dari segi higienitas. Pembangunan pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan) diarahkan pada upaya menghasilkan produk pertanian pangan dan hortikultura berkualitas dari segi rasa dan ekologis (produk aromatik dan organik) serta berbasis agrowisata disertai pengembangan penyuluhan yang sesuai dengan upaya tersebut.

#### *Sasaran*

1. Kasus penduduk kurang gizi dan gizi buruk tidak ada;
2. Keamanan produk pangan dan obat-obatan terjamin;
3. Produksi padi aromatik serta hortikultura organik berkembang dengan dukungan sistem penyuluhan yang tepat;
4. Kesejahteraan petani dan stakeholder terkait meningkat;
5. Kawasan agrowisata dan usaha agribisnis berkembang.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Revitalisasi Posyandu;
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian organik;
5. Pemberdayaan penyuluh pertanian;
6. Pengembangan balai benih, agrowisata, agribisnis, dan ekowisata;
7. Pembinaan usaha dan pengembangan hasil-hasil pertanian;
8. Pengembangan perikanan.

#### **7.1.8. Penanggulangan Kemiskinan**

##### *Arah Kebijakan*

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada upaya pemenuhan hak dasar orang miskin baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat hidup bermartabat. Hak dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan usaha, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup, dan partisipasi dalam pembangunan.

##### *Sasaran*

1. Jumlah rumah tangga miskin berkurang hingga hanya 5%;
2. Kebutuhan dasar orang miskin terlayani dengan baik;
3. Orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan pada lokalitasnya;
4. Gerbang Taskin semakin efektif memberdayakan rumah tangga/orang miskin.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembakuan kriteria/indikator kemiskinan dan jumlah warga miskin sesuai kondisi riil
2. Bantuan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Miskin;
3. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin/Gerbang Taskin.

#### **7.1.9. Penanganan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial**

##### *Arah Kebijakan*

Penanganan dan perlindungan kesejahteraan sosial diarahkan pada menguatnya ketahanan sosial bagi perwujudan keadilan sosial khususnya perlindungan bagi golongan rentan dan kurang beruntung melalui upaya-upaya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, partisipasi, kemandirian dan kemitraan sosial yang berkelanjutan.

### *Sasaran*

1. Panti penyandang masalah kesejahteraan sosial menerapkan tata-kelola dengan baik;
2. Prosedur penanganan bencana dan pasca bencana tersusun dan terapkan dengan baik;
3. Partisipasi, kemandirian dan kemitraan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana meningkat.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pemberdayaan fakir-miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Pembinaan anak terlantar;
4. Pembinaan penyandang cacat;
5. Pembinaan panti asuhan;
6. Pembinaan bekas penyandang penyakit sosial;
7. Pembinaan penderita narkoba dan HIV/AIDS;
8. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

## **7.2. Peningkatan Kualitas Manusia**

Pembangunan manusia merupakan kebalikan upaya mensejahterakan masyarakat. Kualitas manusia yang tinggi memungkinkan kehidupan yang bermartabat, yang didalamnya terbuka banyak pilihan (*choices*) dan manusia bebas menentukan pilihan bagi kehidupannya (*voices*), sehingga citra madani dalam arti kehidupan yang berperadaban bisa lebih signifikan termanifestasikan. Dalam pembangunan Kota Parepare lima tahun kedepan, peningkatan kualitas manusia bukan hanya dalam dimensi fisik-SDM terkait pendidikan dan kesehatan, melainkan juga kualitas lain yang mendukung kemajuan peradaban kota seperti seni-budaya, ilmu-teknologi, dan kepemudaan-olah raga.

*Tujuan* dari kebijakan umum ini adalah:

- (1) Memperbaiki akses dan kualitas pendidikan;
- (2) Meningkatkan akses dan derajat kesehatan;
- (3) Mendorong apresiasi seni-budaya dan iptek;
- (4) Mendorong prestasi kepemudaan dan olah raga.

*Sasaran* yang hendak dicapai adalah:

- (1) Indeks pembangunan manusia yang tinggi, tercermin pada angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan indeks pembangunan gender;
- (2) Apresiasi seni-budaya mewamai dinamika kehidupan masyarakat ditopang daya adaptasi terhadap perubahan melalui penguasaan atas perkembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi;
- (3) Kegiatan olah raga dan kepemudaan/remaja berkembang kearah pencapaian prestasi nasional maupun internasional.

### **7.2.1. Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan Pendidikan**

#### *Arah Kebijakan*

Pemerataan akses layanan pendidikan diarahkan pada tuntasnya pemberantasan buta huruf, peningkatan rata-rata lama sekolah serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mudah terjangkau bagi semua lapisan dan golongan masyarakat.

#### *Sasaran*

1. Angka melek huruf mencapai 99% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas;
2. Angka rata-rata lama sekolah minimal 9,5 tahun;
3. Prasarana dan sarana pendidikan tercukupi 100% dalam kualitas yang baik;
4. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berlangsung dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan efektif.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Penuntasan pemberantasan buta huruf;
2. Pendidikan anak usia dini;
3. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun;
4. Pendidikan menengah;
5. Pendidikan non formal;
6. Pendidikan luar biasa;
7. Pembebasan biaya bagi peserta didik (Pendidikan Gratis)

### **7.2.2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan**

#### *Arah Kebijakan*

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu luaran pendidikan melalui proses belajar-mengajar berkualitas yang ditopang oleh kemampuan guru yang handal serta pengembangan pendidikan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan dan sesuai potensi lokal Kota Parepare.

### *Sasaran*

1. Seluruh tenaga pendidik memiliki kemampuan fungsional yang tinggi dalam memfasilitasi pembelajaran;
2. Seluruh proses belajar-mengajar berlangsung secara berkualitas sesuai Standar Nasional;
3. Manajemen berbasis sekolah terlaksana efektif;
4. Luaran pendidikan memiliki prestasi tinggi pada bidang iptek, seni-budaya dan olah raga, serta kegiatan kepemudaan dan remaja;
5. Persentase tingkat kelulusan Ujian Akhir Nasional mencapai 100%;
6. SMU Unggulan berbasis alam/outbond berkembang;
7. Akhlak dan budi pekerti peserta didik terpelihara dalam bingkai nilai dan norma agama serta landasan idiil nasional.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan mutu proses belajar-mengajar;
2. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Pengembangan SMU Unggulan berbasis alam/outbond;
4. Peningkatan budaya baca dan pengembangan perpustakaan;
5. Perbaikan manajemen pelayanan pendidikan yang berbasis teknologi maju;
6. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dengan lulusan siap-pakai.

## **7.2.3. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan**

### *Arah Kebijakan*

Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan diarahkan pada efektivitas penerapan paradigma sehat melalui upaya pengembangan lingkungan dan keluarga sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan pengobatan dengan peralatan dan sarana-prasarana bermutu, serta pengembangan sistem informasi, komunikasi dan perangkat hukum bidang kesehatan.

### *Sasaran*

1. Angka harapan hidup warga Parepare bertambah dan berada pada tingkat tertinggi di Sulawesi Selatan;
2. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan semakin berkurang dan berada pada tingkat terkecil di Sulawesi Selatan;
3. Mutu kesehatan terwujud ditandai oleh rumah sehat 75%, penggunaan air bersih 95%, penggunaan jamban 95, TTU/TPM yang memenuhi syarat 95%, dan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya mencapai 80%, cakupan kesehatan kerja 80%, dan ketersediaan sarana, alat dan bahan penyelenggaraan lingkungan sehat 100%;

4. Angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menurun ditandai oleh persentase kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) 100%, Case Detection Rate (CDR) paru-paru 70% dengan angka kesembuhan 85%, angka AFP lebih besar atau sama dengan 2/100.000 anak diatas 15 tahun, penyakit demam berdarah (DBD) tertangani diatas 90%, CFR diare pada KLB lebih kecil 1,2%, orang dengan HIV Aids (ODHA) terobati dengan ART 100%, RFT penderita kusta diatas 90%, balita dengan pneumonia tertangani 100%, kelurahan dengan KLB yang ditangani 24 jam sebanyak 100%, rumah dan bangunan bebas jentik nyamuk diatas 95%;
5. Angka kesakitan dan kematian ibu dan anak menurun ditandai dengan cakupan kunjungan ibu hamil 95%, cakupan pertolongan persalinan oleh bidan 100%, cakupan kunjungan neonatus 100%, ibu hamil resiko tinggi yang tertangani 100%, neonatal resiko tinggi yang tertangani 100%;
6. Gizi perorangan, institusi dan masyarakat meningkat, ditandai dengan cakupan ibu hamil makan tablet Fe diatas 80%, anemia gizi besi pada ibu hamil dan nifas diatas 40%, ASI eksklusif diatas 80%, cakupan balita yang mendapat vitamin A 90%, balita yang naik berat badannya (N/D) diatas 80%, balita bawah garis merah/gizi buruk dibawah 15%, cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah 90%, cakupan bayi BBLR tertangani 100%, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM keluarga miskin 100%, balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%, kecamatan bebas rawan gizi 80%;
7. Individu, keluarga dan masyarakat menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat ditandai dengan tingginya komitmen stakeholder, terselenggaranya promosi kesehatan (P2, Kesling, KIA, Nafsa), cakupan pemeriksaan kesehatan siswa 100%, cakupan pelayanan kesehatan remaja diatas 80%, cakupan Posyandu aktif diatas 90%, posyandu mandiri mencapai 50%;
8. Akses, ketersediaan dan mutu obat serta perbekalan kesehatan dan sarana-prasarana kesehatan terjamin ditandai dengan ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100%, pengadaan obat esensial 100%, pengadaan obat generik 100%, penulisan resep obat generik 90%;
9. Kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya serta sistem rujukan meningkat, ditandai dengan cakupan rawat jalan >15% dan rawat inap > 1,5%, laboratorium Puskesmas berfungsi 100%, pelayanan kesehatan dasar luar gedung mencakupi 100% wilayah, murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi/mulut 100%, pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja >80%, keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan > 80%, kesehatan perkotaan dan bencana tertangani;
10. Kemampuan pembiayaan pemeliharaan kesehatan masyarakat meningkat, ditandai dengan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra-bayar 80%, cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin 100%;
11. Sistem, kebijakan, manajemen dan administrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan terarah berkembang dan berkelanjutan;
12. Kawasan sehat dan lingkungan sehat serta pemberdayaan masyarakat dan upaya hidup sehat berkembang;
13. Peredaran obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan terawasi;

#### 14. Upaya keluarga berencana berkembang.

##### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengembangan lingkungan sehat;
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. Pengembangan kesehatan keluarga;
4. Perbaikan gizi masyarakat;
5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Farmasi dan perbekalan kesehatan;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
8. Pelayanan dasar dan rujukan;
9. Pemeliharaan kesehatan masyarakat;
10. Penerapan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
11. Pengembangan kebijakan, manajemen dan administrasi pelayanan kesehatan;
12. Pengembangan kawasan sehat;
13. Pengawasan obat dan makanan;
14. Pengembangan UKS dan UKBM;
15. Pengembangan Keluarga Berencana.

#### **7.2.4. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Rujukan Andi Makkasau**

##### *Arah Kebijakan*

Peningkatan pelayanan rumah sakit rujukan Andi Makkasau diarahkan pada upaya untuk tumbuh menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Sulawesi Selatan dengan pelayanan kesehatan bermutu dan memuaskan serta terjangkau.

##### *Sasaran*

1. Status rumah sakit meningkat dari Kelas C menjadi Kelas B;
2. Sarana fisik/gedung rumah sakit terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, ditandai dengan kecukupan kamar jenazah, ketersediaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit, ketersediaan gedung cardiac center, ketersediaan gedung radiologi, ketercukupan kamar bersalin, ketercukupan ruang perawatan;
3. Sarana penunjang medik dan non medik terpenuhi, ditandai dengan kecukupan alat kesehatan dan laboratorium, kecukupan perlengkapan rumah tangga, kecukupan dan kelayakan instalasi listrik, kecukupan dan kelayakan instalasi air, efektivitas sistem informasi rumah sakit berbasis kompetensi, ketersediaan sarana lainnya;
4. SDM rumah sakit berkembang kualitasnya, ditandai dengan jumlah dan kualitas dokter dan paramedis yang berkembang;



5. Sarana dan prasarana rumah sakit terpelihara.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan status rumah sakit;
2. Pengembangan sarana fisik/gedung rumah sakit;
3. Pengembangan prasarana penunjang non medik;
4. Pengembangan prasarana penunjang medik;
5. Pengembangan kualitas SDM rumah sakit;
6. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit;
7. Pemeliharaan sarana-prasarana rumah sakit, termasuk sarana layanan bagi pembesuk pasien.

### **7.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

#### *Arah Kebijakan*

Pengendalian penduduk dan pengembangan keluarga berencana diarahkan pada penataan administrasi kependudukan dan upaya penataan kembali pengelolaan program Kebutuhan Berencana serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program Kebutuhan Berencana sehingga pertumbuhan penduduk dapat terkendalikan.

#### *Sasaran*

1. Administrasi kependudukan tertata dengan baik;
2. Pertumbuhan penduduk turun menjadi sekitar 1,1%/tahun;
3. Angka kelahiran total (TFR) turun menjadi sekitar 2,2/perempuan;
4. Pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran tanpa menggunakan alat kontrasepsi (unmet need) menjadi 6%;
5. Peserta KB laki-laki meningkat menjadi 4,5%;

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan kualitas pengoperasian Sistem Informasi Kependudukan;
2. Pengembangan Data-Base kependudukan;
3. Pembinaan Keluarga Berencana;
4. Pengembangan Kesehatan Reproduksi Remaja;
5. Pelayanan Kontrasepsi;
6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam KB Mandiri;

### **7.2.6. Pengembangan Seni-Budaya**

#### *Arah Kebijakan*

Pengembangan seni-budaya diarahkan pada upaya fasilitasi bagi semaraknya kegiatan dan apresiasi masyarakat atas kesenian dan kebudayaan sehingga kualitas non material masyarakat semakin berkembang bagi peradaban yang lebih baik.

#### *Sasaran*

1. Kegiatan kesenian dan kebudayaan berlangsung semarak ditopang apresiasi masyarakat yang tinggi;
2. Sarana dan prasarana bagi kegiatan kesenian dan kebudayaan tersedia dan fungsional.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembinaan individu, kelompok dan organisasi yang bergerak dibidang kesenian dan kebudayaan;
2. Pengembangan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan.

### **7.2.7. Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga**

#### *Arah Kebijakan*

Pembinaan pemuda dan olah raga diarahkan pada upaya mendorong peningkatan prestasi olah raga pada berbagai level pertandingan olahraga melalui pembinaan cabang olahraga yang potensial berprestasi; mendorong pelibatan organisasi pemuda dalam peningkatan prestasi daerah melalui keterlibatan pada kegiatan sosial, olahraga, pendidikan; dan mendorong peningkatan peran pemuda dalam kegiatan inovatif-kreatif berbasis potensi daerah dalam mendukung program pembangunan daerah.

#### *Sasaran*

1. Kebijakan dan manajemen kepemudaan dan olahraga berjalan efektif dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga;
2. Prestasi olahraga pada event provinsi dan nasional tercapai, ditandai dengan posisi lima besar dalam Porda dan kontribusi medali pada PON;
3. Organisasi pemuda berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan daerah;
4. Sarana kepemudaan (Parepare Youth Centre) dan remaja (Sircuit Race Centre) berfungsi bagi penyaluran bakat dan hobi pemuda dan remaja.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembangunan sarana kepemudaan dan remaja;
2. Peningkatan peran serta kepemudaan;

3. Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba;
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;
6. Pembinaan prestasi dan pemasyarakatan olahraga;
7. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

### **7.2.8. Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi**

#### *Arah Kebijakan*

Pengembangan keterbukaan informasi dan komunikasi diarahkan pada upaya penyebaran informasi pembangunan daerah melalui informasi elektronik maupun media massa dan penyiaran; penyadaran dan pencerdasan masyarakat melalui akses informasi dan komunikasi yang mendidik; serta pengembangan saluran aspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perwujudan Parepare sebagai bandar madani.

#### *Sasaran*

1. Sistem informasi elektronik terpadu (website/situs Pemerintah Kota) berfungsi optimal;
2. Radio siaran pemerintah daerah efektif mencerahkan pendengar dalam masalah lingkungan hidup, seni-budaya, pemuda-olahraga dan kehidupan beragama;
3. Kerjasama pemerintah dengan lembaga penyiaran serta media massa dan media elektronik efektif dalam menyajikan informasi berimbang dan menangkap aspirasi masyarakat.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pelayanan informasi pembangunan daerah;
2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
3. Pengembangan kerjasama informasi dengan lembaga penyiaran, media cetak dan media elektronik;
4. Peningkatan sistem kearsipan.

### **7.2.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### *Arah Kebijakan*

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada upaya penyerasian kebijakan dalam meningkatkan peran perempuan dan melindungi anak-anak serta penguatan kelembagaan dan upaya untuk mengarusutamakan perempuan dan anak dalam berbagai upaya pembangunan.

#### *Sasaran*

1. Indeks pemberdayaan gender berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan;
2. Perlindungan anak berkembang dan dilandasi kebijakan yang jelas.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan perempuan dan anak.

### **7.2.10. Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi**

#### *Arah Kebijakan*

Pengembangan ilmu dan teknologi diarahkan pada kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pekerjaan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan agar dasar ilmiah berbagai pekerjaan lebih terjamin. Pengembangan ilmu dan teknologi juga diarahkan pada upaya penerapan teknologi madya dan pemberian muatan pengetahuan atas produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UMKM.

#### *Sasaran*

1. Pekerjaan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang bersifat kompleks dilandasi kajian ilmiah dalam mencapai efektivitas, efisiensi dan keberlanjutannya;
2. Muatan pengetahuan dan teknologi produk lokal spesifik signifikan dalam meningkatkan nilai tambah.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembangunan lembaga penelitian dan pengembangan budaya penelitian;
2. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

### **7.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan**

Perwujudan visi Bandar Madani, yang intinya adalah masyarakat sejahtera dan berperadaban, selain meniscayakan kualitas manusia yang tinggi, juga memerlukan kecukupan sarana-prasarana yang tingkat kebutuhannya berkembang dari waktu ke waktu. Dalam lima tahun kedepan, ketercukupan sarana-prasarana perkotaan tidak hanya dituntut penyesuaian dari segi jumlah, tetapi juga penyesuaian dari segi kualitas, di satu sisi terkait pemenuhan hak dasar rakyat atas pemukiman yang layak, ketersediaan air bersih dan

sebagainya, di sisi lain juga terkait dengan citra kemajuan kota seperti kondisi jalan yang mulus, drainase yang fungsional serta ketertataan lalu lintas kota.

*Tujuan* dari kebijakan umum ini adalah:

- (1) Memantapkan fungsi sarana-prasarana transportasi dan perhubungan kota;
- (2) Memelihara ketercukupan sarana-prasarana pemukiman dan tata air kota;
- (3) Memenuhi kebutuhan sarana-prasarana kawasan strategis cepat tumbuh.

*Sasaran* yang hendak dicapai adalah:

- (1) Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik;
- (2) Tata air kota efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman;
- (3) Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- (4) Sarana dan fasilitas perhubungan dan lalu lintas berfungsi efektif bagi kenyamanan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

### **7.3.1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi**

#### *Arah Kebijakan*

Pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana transportasi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas jalan dan jembatan guna menunjang perekonomian daerah dan kemajuan kota.

#### *Sasaran*

1. Jalan dan jembatan baru terbangun sesuai tuntutan perkembangan kota, ditandai dengan terbangunnya sarana jalan 50.000 meter tersebar dalam kota, sarana jembatan lima buah, rintisan jalan 40.000 meter dan trotoar 10.000 meter;
2. Jalan dan jembatan terpelihara dan direhabilitasi dengan baik, ditandai dengan selesainya rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan 32.500 meter, rehabilitasi berkala jalan 478.260 meter.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembangunan jalan dan jembatan;
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

### **7.3.2. Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Air Kota dan Permukiman**

#### *Arah Kebijakan*

Pemeliharaan dan pengembangan tata air kota dan permukiman diarahkan pada upaya penciptaan lingkungan permukiman dan kota yang bebas banjir secara berkelanjutan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat.

#### *Sasaran*

1. Saluran drainase/gorong-gorong terpenuhi sesuai perkembangan kota, ditandai dengan berfungsinya saluran drainase 50.000 meter, gorong-gorong 150 buah, duiker 40 unit, plat penutup selokan 5.000 meter, serta perencanaan drainase Jl. H. Agussalim;
2. Kebutuhan turap/talud/bronjong terpenuhi, ditandai dengan terbangunnya turap/talud/bronjong 1.500 m bujur sangkar tersebar dalam kota;
3. Sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan air limbah terpenuhi, ditandai dengan tersedianya saluran sanitasi 5.500 meter, sarana reservoir kapasitas 1.000 meter kubik dan pompa distribusi kapasitas 20 liter/detik dua unit;
4. Jaringan irigasi terpelihara dan berkembang sesuai kebutuhan, ditandai dengan tersedianya jaringan irigasi/hasil rehabilitasi 3.000 meter, bendung yang efektif sesuai kedalamannya 3.000 m<sup>3</sup>, bendung Salobulo 150 m<sup>2</sup>, proteksi saluran irigasi Ladoma 130 m<sup>3</sup>, saluran sekunder irigasi Ladoma 250 m, saluran tambak Bacukiki 2.000 m;
5. Drainase lingkungan permukiman terpelihara dan berkembang sepanjang 16.000 meter, tersebar pada semua kecamatan.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
3. Penyediaan dan pengolahan air baku;
4. Pengembangan perumahan dan permukiman;
5. Penataan, pengembangan dan pemeliharaan lampu jalan umum.

### **7.3.3. Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Pertumbuhan**

#### *Arah Kebijakan*

Penataan sarana-prasarana kawasan pertumbuhan diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan bagi investasi pengusaha pada kawasan industri (KIPAS) serta sarana-prasarana lainnya dalam kota.

### *Sasaran*

1. Sarana-prasarana fisik kawasan strategis untuk pertumbuhan tersedia dan berfungsi, ditandai dengan tertatanya kawasan industri (KIPAS), terbangunnya gedung olahraga satu unit, terbangunnya Pasar Lakessi yang representatif, dan berfungsinya fasilitas kolam renang Ujung Lare.
2. Tersedianya sarana-prasarana pengembangan kawasan-kawasan strategis yang tertuang di RTRW Kota Parepare.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
2. Pengembangan infrastruktur pedesaan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

## **7.3.4. Penataan Sarana dan Fasilitas Perhubungan**

### *Arah Kebijakan*

Penataan sarana dan fasilitas perhubungan diarahkan pada upaya pemantapan sistem angkutan penumpang dan barang, pengendalian dan pengaturan lalu lintas, dan ketersediaan fasilitas perhubungan dan lalu lintas guna terwujudnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam lalu lintas serta perhubungan darat dan laut.

### *Sasaran*

1. Sarana dan fasilitas perhubungan darat dan laut tersedia dan berfungsi efektif;
2. Layanan angkutan dan keamanan lalu lintas tertata dengan baik.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan angkutan;
4. Pengawasan kelaikan kendaraan bermotor.

## **7.4. Penataan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**

Penataan lingkungan hidup berkelanjutan merupakan keniscayaan dalam mewujudkan salah satu komponen visi Kota Parepare lima tahun kedepan,

yakni masyarakat yang berkomitmen lingkungan. Urgensinya juga terkait dengan kecenderungan global atas perubahan iklim yang berlangsung cepat dan sulit terprediksi. Kebijakan ini terkait dengan upaya untuk menjamin keberlanjutan dari daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat dalam arti luas. Selain itu, penataan lingkungan hidup juga mencakup upaya pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota serta upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

*Tujuan* dari kebijakan umum ini adalah:

- (1) Memantapkan kesadaran dan etika lingkungan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- (2) Menekan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pembangunan dan masyarakat;
- (3) Merehabilitasi dan memelihara fungsi lingkungan hidup;
- (4) Menata kebersihan dan keindahan kota;
- (5) Mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

*Sasaran* yang hendak dicapai melalui kebijakan ini adalah:

- (1) Prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam memelihara lingkungan hidup meningkat, ditandai dengan berfungsinya kelembagaan masyarakat pada bidang lingkungan hidup dan berjalannya upaya menanam pohon dan membersihkan lingkungan sekitar oleh masyarakat;
- (2) Dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan diatasi secara komprehensif dan tuntas, ditandai dengan diterapkannya secara konsisten dokumen-dokumen Amdal kegiatan pembangunan;
- (3) Upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup berjalan efektif, ditandai dengan terpenuhinya ruang terbuka hijau, hutan kota dan taman kota;
- (4) Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan;
- (5) Masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global.

#### **7.4.1. Pemantapan Kesadaran dan Etika Lingkungan Masyarakat**

##### *Arah Kebijakan*

Pemantapan kesadaran dan etika lingkungan masyarakat diarahkan pada semakin berkembangnya pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan melalui penerapan paradigma dan moralitas *Atur Diri Sendiri* dalam kelembagaan yang berbasis pada kearifan dan prakarsa lokalitas.

##### *Sasaran*



1. Masyarakat mengakses informasi lingkungan hidup dengan efektif dalam menggerakkan masyarakat berpraktis dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Masyarakat memiliki wadah kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Praksis *Go Green* terpahami dan terimplementasikan oleh masyarakat dalam bentuk *green-office* (penghijauan halaman kantor), *green-school* (penghijauan halaman sekolah), *green-belt* (penghijauan tepi jalan), *green-homeyard* (penghijauan halaman rumah) dan *green-patch* (penghijauan taman dan tebing sungai).

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat pada bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan Gerakan *SulSel Go Green melalui Gerakan Parepare Evergreen City*.

### **7.4.2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau**

#### *Arah Kebijakan*

Pengembangan ruang terbuka hijau diarahkan pada terwujudnya ruang terbuka hijau seluas minimal 30% dari luas wilayah melalui penataan sejumlah hutan raya dan hutan kota, penataan taman dan penanaman pohon secara tersebar pada seluruh bagian kota baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

#### *Sasaran*

1. Tata batas fisik kawasan hutan Jompie seluas 13,5 hektar terselesaikan dan ruang dalam kawasan dimanfaatkan;
2. Tata batas fisik kawasan Hutan Raya Alitta seluas 80 hektar terselesaikan disertai dengan terpeliharanya pohon yang ada dan tertanamnya pohon baru;
3. Kawasan Hutan Raya Bacukiki dengan tambahan 100 hektar ditetapkan dan tata batas fisik kawasan terselesaikan disertai terisinya kawasan;
4. Hutan Konservasi Plasmanuffah Cadangan Agribisnis Bacukiki seluas 80 hektar selesai ditetapkan batas-batas fisiknya disertai pengisian kawasan secara bertahap;
5. Area konservasi dan pusat agribisnis dan layanan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tumbuhan obat berkembang;
6. Area agrowisata berbasis masyarakat berkembang;
7. Kebijakan dan regulasi wajib tanam pohon bagi warga masyarakat yang melakukan hajatan efektif berjalan.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Penataan hutan kota dan hutan raya/kawasan konservasi alam;
2. Pengembangan agrowisata berbasis masyarakat;
3. Penerapan regulasi pengelolaan lingkungan dan penanaman pohon;
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

### **7.4.3. Penataan Kebersihan dan Keindahan Kota**

#### *Arah Kebijakan*

Penataan kebersihan dan keindahan kota diarahkan pada terwujudnya sistem pengelolaan sampah secara terpadu yang selain menjamin kebersihan juga dapat memanfaatkan sampah melalui efektivitas armada pengangkutan sampah, proses daur ulang sampah, dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya menuju Parepare kota bebas sampah. Selain itu, segi estetika kota diupayakan terwujud melalui penataan taman.

#### *Sasaran:*

1. Sampah terkelola efektif dan terpadu, ditandai dengan efektifnya fungsi armada pengangkut sampah dan penyedot tinja yang mobil angkutannya tercukupi dan layak, peralatannya lengkap dan layak, tenaga teknisnya terampil dan didukung oleh tenaga pengawas yang cukup dan tempat pembuangan akhir yang memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan meningkat, ditandai dengan berkembangnya pusat pengkomposan rumah tangga/komunitas dan daur ulang sampah pada setiap kelurahan, berkembangnya persaingan kebersihan lingkungan antar RT/RW dan antar kelurahan, kontribusi dalam retribusi sampah, dan perilaku bersih dan sehat masyarakat.
3. Keindahan kota semakin tertata dan semarak ditandai dengan taman-taman dan halaman/perumahan tertata dengan tanaman hias, TMP Paccekke dan lokasi pemakaman lainnya tertata sebagai aksesoris kota, trotoar jalan pusat kota tertata indah dan fungsional, lampu penerangan jalan tertata rapih dengan jangkauan cahaya yang memadai, papan reklame dan baliho tertata dengan tertib sebagai aksesoris kota, pintu gerbang kota tertata rapih dan estetik.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengelolaan persampahan secara terpadu;

2. Pengembangan sarana dan peningkatan layanan TPA;
3. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
4. Penataan dan pemeliharaan taman dan keindahan kota;
5. Penetapan dan penerapan regulasi kebersihan dan keindahan kota;
6. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (sistem pemanfaatan sampah).

#### **7.4.4. Pengelolaan Dampak Lingkungan**

##### *Arah Kebijakan*

Pengelolaan dampak lingkungan diarahkan pada tertanggulangnya berbagai dampak kegiatan pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat melalui upaya pencegahan, pengendalian, pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam di wilayah kota, sungai dan pantai.

##### *Sasaran*

1. Polusi udara, limbah padat dan limbah cair terkendalikan pada tingkat yang dapat ditoleransi bagi kesehatan, kebersihan dan keindahan kota
2. Sumber air tanah terkonservasi dan terlindungi ditandai dengan terinventarisasinya mata air dalam kota, area resapan air tersedia, penggunaan sumur bor/artesis terkendalikan;
3. Pantai dan lahan reklamasi pantai tertata untuk fungsi yang berkelanjutan, ditandai dengan termanfaatkannya lahan reklamasi pantai Labukkang, rampungnya pengurugan, desain dan pembangunan sarana bagi termanfaatkannya lahan reklamasi Tonrangan, terlaksananya penambahan reklamasi pantai Mattirotasi dengan pertimbangan matang atas dampaknya bagi alur pelayaran, tertatanya tanggul Mattirotasi dengan pohon peneduh, dan pantai Lumpue tertata lebih rapih sesuai dengan kebutuhan ekowisata;
4. Sungai Karajae berhijaukan dengan pohon mangrove sekitar lima kilometer ke arah hulu dan terbangun bendungan untuk sumber PDAM sekaligus sarana rekreasi air, tempat penebaran/budidaya ikan dan cadangan air musim kemarau;
5. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis berlangsung efektif, dan terbangunnya kawasan konservasi.
6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kesiapan dalam mengantisipasi perubahan iklim global.

##### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan pengendalian polusi;
2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

3. Penerapan kebijakan dan kegiatan konservasi lingkungan serta sumberdaya alam;
4. Penanganan lahan kritis dan pemanfaatan ruang secara efektif;
5. Penyusunan kebijakan dan *road-map* adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global.

### **7.5. Penguatan Kehidupan Beragama dan Kelembagaan Masyarakat**

Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi, dimana dunia profan-material lebih mendominasi praktek kehidupan dan secara sosial-budaya cenderung berlangsung homogenisasi, maka upaya sadar untuk menguatkan dunia spiritual-non material menjadi sangat urgen. Penguatan kehidupan beragama dan kelembagaan masyarakat merupakan upaya strategis dalam memenuhi urgensi tersebut. Penguatan kehidupan beragama merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang religius, merupakan upaya untuk menjadikan Parepare sebagai Kota Rohani. Penguatan kelembagaan masyarakat diarahkan untuk menjadikan masyarakat sebagai pilar yang berdaya dalam memantapkan identitas tatanan Parepare ditengah dinamika perubahan yang berlangsung.

*Tujuan* dari kebijakan umum ini adalah:

1. Memantapkan spiritualitas dan moralitas masyarakat melalui penghayatan dan pengamalan agama, toleransi diantara umat beragama dan daya tangkal serta penguatan identitas dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi;
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai sebuah tatanan yang mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, dan aspirasi yang berkembang dengan difasilitasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Meningkatkan kualitas dari teknostruktur masyarakat guna melahirkan produk unggulan berdasarkan potensi dan sumberdaya spesifik lokalitas.

*Sasaran* yang hendak dicapai dari kebijakan umum ini adalah:

1. Kehidupan spiritual-keagamaan yang berkualitas semakin termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dari terefleksikannya nilai dan prinsip keagamaan dalam praktek kehidupan masyarakat, pemerintah/birokrasi dan bisnis/dunia usaha;
2. Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan efektif berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat;
3. Teknostruktur masyarakat meningkat dalam menghasilkan produk unggulan sesuai potensi lokalitas dan peluang yang dapat dimanfaatkan.

### **7.5.1. Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Agama**

#### *Arah Kebijakan*

Peningkatan penghayatan dan pengamalan agama diarahkan pada upaya fasilitasi terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan moralitas dan etika yang bersumber dari nilai dan norma keagamaan. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan pada semakin terbukanya akses umat beragama didalam proses pembangunan, terutama dalam mengawal nilai-nilai luhur yang mendasari perubahan yang didorong oleh pembangunan.

#### *Sasaran*

1. Nilai-nilai, prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari agama sebagai landasan bagi pencapaian kehidupan rohaniah dengan moralitas, spiritualitas dan etika yang baik semakin tertanam dalam masyarakat;
2. Pendidikan agama terutama pada anak usia dini dan remaja semakin intensif dan berkualitas, ditandai dengan digalakkannya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan pembelajaran Al-Qur'an pada tingkat SD, SLTP serta fasilitasi pembelajaran Al-Quran oleh guru mengaji/mesjid;
3. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah serta pengelolaan zakat semakin tertata dengan baik.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pembangunan sarana keagamaan dan pendidikan keagamaan;
2. Pemberantasan buta aksara Al-Qur'an;
3. Peningkatan pengelolaan haji dan umrah;
4. Pembinaan keluarga sakinah.

### **7.5.2. Pemantapan Toleransi antar Umat Bergama**

#### *Arah Kebijakan*

Pemantapan toleransi antar umat beragama diarahkan pada upaya memelihara dan memantapkan toleransi dalam hubungan antar umat beragama yang telah berlangsung baik selama ini, begitu pula pemantapan hubungan yang baik antara umat beragama/organisasi keagamaan dengan pemerintah demi terciptanya sinergitas dalam proses pembangunan.

#### *Sasaran*

1. Saling pemahaman dan dialog antarumat beragama/organisasi keagamaan meningkat;

2. Peran serta umat beragama/organisasi keagamaan dalam pembangunan semakin signifikan;
3. Antara umat beragama/organisasi keagamaan dengan pemerintah terpelihara hubungan baik dan sinergitas yang semakin berkualitas.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pemantapan forum bersama antarumat beragama;
2. Pemantapan kerjasama umat beragama/organisasi keagamaan dengan pemerintah.

### **7.5.3. Pemberdayaan Masyarakat**

#### *Arah Kebijakan*

Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri pada berbagai aspek kehidupan. Kelembagaan masyarakat mencakup entitas kelembagaan yang diprakarsai masyarakat sendiri seperti bentuk tolong-menolong dan gotong royong, organisasi sosial informal seperti kerukunan, maupun organisasi formal seperti yayasan yang bergerak dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, serta organisasi profesi. Kelembagaan masyarakat juga mencakup organisasi yang dibentuk melalui kegiatan pembangunan dan telah melembaga dalam masyarakat seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna dan sebagainya.

#### *Sasaran*

1. Kelembagaan masyarakat berbasis aksi kolektif tradisional seperti tolong-menolong dan gotong-royong terrevitalisasi dan berkontribusi fungsional dalam pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah pada tingkat lokalitas;
2. Kelembagaan masyarakat berbasis organisasi sosial seperti yayasan, kerukunan dan sejenisnya berkembang fungsional dan terfasilitasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ketertiban dan keamanan serta bidang-bidang lainnya;
3. Kelembagaan masyarakat dalam bidang pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi, kelompok usaha bersama dan sejenisnya berkembang fungsional dan terfasilitasi dalam mendukung peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
4. Kelembagaan masyarakat dalam bidang sosial-politik, khususnya dalam mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi, mematangkan proses komunikasi politik dan mendorong partisipasi politik terfasilitasi untuk semakin fungsional;

5. Kelembagaan masyarakat yang dibentuk melalui program pembangunan seperti PKK, posyandu, karang taruna, Baruga Sayang, kelompok siaga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan sebagainya semakin fungsional dalam mendorong kemajuan tingkat lokalitas.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Revitalisasi kegotongroyongan dan swadaya masyarakat dalam partisipasi pembangunan;
2. Penguatan kelembagaan sosial-kemasyarakatan;
3. Penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas;
4. Pengembangan kelembagaan dan organisasi sosial-politik;
5. Pengembangan Kelurahan Siaga;
6. Pengembangan kelembagaan profesi;
7. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal.

#### **7.5.4. Peningkatan Kualitas Teknostruktur Masyarakat**

##### *Arah Kebijakan*

Peningkatan kualitas teknostruktur masyarakat diarahkan bagi terkuatkannya kapasitas pengetahuan dan teknologi masyarakat dalam mengelola potensi dan sumberdaya pada lokalitasnya sehingga dapat menghasilkan produk dengan nilai yang tinggi melalui pendampingan dan pelatihan sambil bekerja.

##### *Sasaran*

1. Produk spesifik bernilai tinggi dihasilkan oleh masyarakat;
2. Teknologi tepat guna berkembang dan terdiseminasikan dalam masyarakat.

##### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Pengembangan produk khas (ikon) Parepare

#### **7.6. Penguatan Kelembagaan Pemerintah**

Kelembagaan pemerintah memegang peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Berhubung lingkungan strategis daerah senantiasa berubah, baik dalam bentuk lahirnya

tantangan dan peluang baru dari lingkungan eksternal maupun karena dinamika aspirasi yang sifatnya internal, maka kelembagaan pemerintah senantiasa

memerlukan penguatan. Dalam rangka termantapkannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, penguatan tersebut semakin menjadi keniscayaan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan kelembagaan pemerintah kota Parepare mencakup aspek sumberdaya baik manusia maupun fisik, aspek organisasi terutama struktur dan saling kordinasi antar unit, dan aspek noma-noma terkait perwujudan tata kelola yang memenuhi kaidah akuntabilitas, transparansi, partisipatif serta bersih dan berwibawa.

*Tujuan* dari kebijakan umum ini adalah:

- (1) Memantapkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur dalam merespons secara kreatif tuntutan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang muncul secara dinamis dalam kehidupan masyarakat;
- (2) Memantapkan efektivitas organisasi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sebagai organisasi pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengakselerasi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan;
- (3) Memantapkan penerapan noma-noma pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum/perundangan.

*Sasaran* yang hendak dicapai pada kebijakan umum ini adalah:

- (1) Sumberdaya aparatur memiliki kapasitas dan kompetensi yang handal dan terus meningkat sesuai tuntutan kebutuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Organisasi pemerintahan memiliki struktur yang senantiasa dapat mengkondisikan tercapainya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan melalui kejelasan tugas setiap unit, kordinasi dan kolaborasi diantara unit-unit tersebut, serta hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif.
- (3) Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan noma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit.

### **7.6.1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur**

#### *Arah Kebijakan*

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur diarahkan pada terciptanya sumberdaya aparatur yang kompetitif, responsif dan bemosal



melalui pelatihan dan *learning-organization* sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing senantiasa meningkat sesuai tuntutan kebutuhan baik dari segi kepemimpinan, tugas substantif-fungsional, maupun tugas teknis-administratif.

#### *Sasaran*

1. Pegawai yang menempati jabatan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai sehingga berkapasitas dan berkemampuan tinggi dalam menduduki jabatan tersebut.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur senantiasa mengalami perbaikan dan peningkatan sesuai tuntutan zaman dari segi kurikulum, metode pembelajaran dan tenaga pengajar.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional;
3. Pendidikan dan pelatihan substantif;
4. Pendidikan dan pelatihan teknis-administratif.

### **7.6.2. Peningkatan Efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi**

#### *Arah Kebijakan*

Peningkatan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi diarahkan pada berfungsinya sistem perencanaan pembangunan daerah yang efektif mendorong dan mengarahkan perubahan menuju pencapaian visi pembangunan daerah. Efektivitas pencapaian tersebut didorong melalui kordinasi pelaksanaan program antar SKPD yang semakin terfokus pada perwujudan indikator kinerja pembangunan daerah serta monitoring dan evaluasi yang mengarahkan konsistensi upaya dan pencapaian untuk sasaran tahunan dan sasaran jangka menengah lima tahun serta pencapaian jangka panjang dua puluh tahun.

#### *Sasaran*

1. Data dan informasi pembangunan daerah yang strategis dan aktual tersedia melalui kajian dan penelitian yang valid;
2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra-SKPD serta dokumen lainnya) tersusun dan menjadi acuan yang efektif bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Pengendalian pembangunan daerah efektif mengarahkan upaya dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan kearah pencapaian visi jangka menengah dan jangka panjang pembangunan daerah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

4. Kerjasama daerah semakin fungsional dalam menghasilkan sinergitas upaya dan pencapaian, khususnya antara Kota Parepare dengan daerah hinterlandnya yakni Barru, Sidrap dan Pinrang.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Perencanaan pembangunan daerah (jangka menengah dan tahunan);
2. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
3. Perencanaan kota-kota menengah dan besar;
4. Perencanaan tata ruang;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Perencanaan pembangunan ekonomi;
7. Perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
8. Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam;
9. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
10. Pengembangan kerjasama pembangunan;
11. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah;
12. Pengendalian/monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

### **7.6.3. Peningkatan Efektivitas Pelaporan dan Pengawasan**

#### *Arah Kebijakan*

Peningkatan efektivitas pelaporan dan pengawasan diarahkan pada tercapainya kualitas pelaporan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk terwujudnya aparatur pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin serta pencapaian kinerja pembangunan yang optimal melalui pelaporan dan pengawasan yang profesional.

#### *Sasaran*

1. Sistem pelaksanaan pengawasan yang menjamin pencapaian sasaran dan tujuan tugas pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat implementasinya, ditandai dengan berkurangnya kasus pelanggaran PP.10 Tahun 1983 YO PP. 45 dan PP. 30 Tahun 1980 dan meningkatnya kegiatan tindak lanjut dari semua LHP-APFP serta berkurangnya kesalahan melalui pengawasan melekat pada aparat;
2. Sinergi pengawasan berkembang di lingkungan pemerintah kota, ditandai dengan terbangunnya iklim yang mencegah KKN pada semua tingkatan;
3. Laporan kinerja program/kegiatan setiap SKPD tersusun dengan efektif, ditandai dengan kualitas laporan yang semakin baik dan jadwal pelaporan yang semakin tepat waktu;
4. Laporan keuangan setiap SKPD tersusun dengan efektif, ditandai dengan kualitas laporan yang semakin baik dan jadwal pelaporan yang semakin tepat waktu.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan tindak lanjut LHP APFP dan pengawasan melekat;
2. Pemberdayaan aparatur dan masyarakat dalam pengawasan;
3. Pendidikan dan pelatihan tenaga pengawas;
4. Pemberdayaan aparatur dalam pelaporan kinerja program/kegiatan;
5. Pemberdayaan aparatur dalam pelaporan keuangan.

#### **7.6.4. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas dan Transparansi**

##### *Arah Kebijakan*

Peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi diarahkan pada terwujudnya pencapaian kinerja yang semakin optimal melalui pelayanan yang semakin prima, terpenuhinya standar minimal dalam pelayanan serta terbukanya akses publik dalam pengambilan kebijakan.

##### *Sasaran*

1. Standar pelayanan minimal bagi semua SKPD/unit pelayanan tersusun dan berlaku efektif;
2. Unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terbentuk dan efektif berfungsi;
3. Peraturan Daerah terkait pelayanan efektif berjalan dan dipatuhi;
4. Akses masyarakat dalam setiap tahap pengambilan kebijakan publik terbuka dan efektif.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Penyusunan dan Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal;
2. Penerapan sistem kontrak kinerja bagi pejabat Eselon-II;
3. Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan;
4. Penegakan Peraturan Daerah;

#### **7.6.5. Pemberdayaan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan**

##### *Arah Kebijakan*

Kebijakan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan kelurahan diarahkan pada semakin fungsionalnya pemerintah kecamatan dalam mengelola kewenangan tertentu sesuai kemampuan kecamatan bersangkutan serta semakin fungsionalnya pemerintah kelurahan dalam penyelesaian permasalahan pada tingkat lokalitas.

### *Sasaran*

1. Pemerintah kecamatan efektif menjalankan kewenangan relevan yang diserahkan Walikota seperti pengurusan IMB rumah kayu, SITU untuk warung kecil, urusan penerangan jalan, kebersihan dan keindahan kota;
2. Pemerintah kelurahan efektif dalam memfasilitasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah lokalitas.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan walikota kepada camat;
2. Pemberdayaan pemerintah kelurahan.
3. Penempatan tenaga-tenaga PNS yang memiliki kualifikasi dan keahlian tertentu di Kecamatan dan Kelurahan

## **7.6.6. Pengembangan Kapasitas dan Dukungan Fasilitas bagi Legislatif**

### *Arah Kebijakan*

Kebijakan pengembangan kapasitas dan dukungan fasilitas bagi legislatif diarahkan pada meningkatnya kualitas proses legislasi yang berlangsung dan produk legislasi yang dihasilkan pada lembaga legislatif melalui peningkatan kapasitas legislatif dan sinergi yang baik antara eksekutif dengan legislatif.

### *Sasaran*

1. Kapasitas dan profesionalisme anggota dewan meningkat;
2. Kualitas produk legislasi meningkat.

### *Program Pembangunan Daerah*

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota DPRD;
2. Peningkatan kualitas produk legislasi.

## **7.6.7. Penataan Keuangan dan Asset Daerah**

### *Arah Kebijakan*

Kebijakan penataan keuangan dan asset daerah diarahkan pada efektifnya pengelolaan asset daerah sebagai sumber keuangan daerah melalui upaya optimalisasi pengelolaan asset daerah.

### *Sasaran*

1. Pengelolaan kekayaan/asset daerah berjalan efektif terutama sistem penggunaan kendaraan dinas;
2. Rumah dinas pemerintah kota tertata dan terbangun dalam satu kompleks perumahan dinas pemerintah kota;
3. Sistem penentuan pagu indikatif tersusun dan efektif berlaku.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Penataan asset daerah;
2. Pengembangan sistem pagu indikatif;
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

### **7.6.8. Pengembangan Kerjasama**

#### *Arah Kebijakan*

Kebijakan pengembangan kerjasama diarahkan pada meningkatnya kerjasama Pemerintah Kota Parepare dengan berbagai pihak dengan orientasi pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi perwujudan visi daerah.

#### *Sasaran*

1. Kerjasama dengan daerah hinterland berkembang;
2. Kerjasama dengan lembaga donor berkembang;
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian berkembang.

#### *Program Pembangunan Daerah*

1. Pengembangan kerjasama dengan daerah hinterland, maupun daerah lainnya;
2. Pengembangan kerjasama dengan lembaga donor;
3. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

## **BAB VIII**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pencapaian sasaran pada setiap kebijakan demi terwujudkannya visi pembangunan Kota Parepare dalam lima tahun kedepan amat ditentukan oleh terselenggaranya sejumlah program terkait kebijakan tersebut. Program-program yang berkontribusi pada pencapaian sasaran kebijakan tersebut dapat berupa program sektoral (SKPD) dan lintas sektoral (lintas SKPD), maupun program kewilayahan maupun lintas kewilayahan, sebagaimana telah dirumuskan pada Bab V (Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah).

Setiap program dalam berkontribusi pada pencapaian sasaran kebijakan ditentukan oleh kegiatan yang mendukung program tersebut, baik kegiatan yang sifatnya dijalankan dalam kerangka regulasi maupun kegiatan yang dijalankan dalam kerangka pendanaan. Kegiatan yang dijalankan dalam kerangka regulasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian dukungan, fasilitasi dan pengaturan kepada masyarakat didalam tercapainya sasaran sebuah program melalui prakarsa, swadaya dan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dijalankan dalam kerangka pendanaan adalah kegiatan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa melalui pembiayaan pemerintah dan dengan itu sasaran program tercapai. Sebuah program dapat dicapai sasarnya melalui kombinasi antara kegiatan dengan kerangka pendanaan dan kegiatan dengan kerangka regulasi.

Kontribusi setiap kegiatan dalam mewujudkan sasaran program ditentukan oleh luaran kegiatan tersebut. Artinya, faktor relevansi kegiatan terhadap sasaran program, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam memanfaatkan sumberdaya/input untuk menghasilkan luaran, amat penting perannya didalam memastikan apakah kegiatan yang berjalan betul-betul akan berkontribusi dalam perwujudan visi daerah. Besarnya kebutuhan pendanaan bagi setiap kegiatan dipengaruhi oleh pertimbangan atas faktor-faktor tersebut. Mengenai rumusan kegiatan pada semua program prioritas dan gambaran kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada Lampiran 1. (Matriks Program Lima Tahunan RPJMD), Lampiran 2 (Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaannya untuk lima tahun), Lampiran 3 (Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaannya Berdasarkan Kebijakan Peningkatan Kinerja), dan Lampiran 4 (Matriks Pagu Indikatif Setiap Tahun).

## BAB IX

### INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja pembangunan daerah untuk setiap kebijakan pembangunan daerah yang akan dijalankan pada 2008-2013 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Tingkat pertumbuhan PDRB (%);
- 2) Tingkat PDRB perkapita (%);
- 3) Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%);
- 4) Peningkatan capaian PAD (%);
- 5) Jumlah bentuk perizinan yang ditangani secara satu atap (unit/satuan izin);
- 6) Angka pengangguran terbuka (%);
- 7) Angka pengangguran sukarela (%);
- 8) Jumlah unit industri yang berkembang di sentra industri (unit);
- 9) Persentase peningkatan produksi UMKM (%);
- 10) Persentase peningkatan produktivitas UMKM (%);
- 11) Jumlah kelembagaan/kelompok masyarakat agribisnis;
- 12) Nilai ekspor produk UMKM (\$);
- 13) Volume ekspor produk UMKM (ton);
- 14) Jumlah regulasi keamanan konsumen;
- 15) Persentase rumah tangga yang mengakses listrik (%);
- 16) Persentase keterpenuhan listrik bagi industri (%);
- 17) Jumlah pengunjung wisata dalam setahun (jiwa/tahun);
- 18) Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggarakan (kegiatan/tahun);
- 19) Jumlah posyandu yang efektif melayani (unit);
- 20) Persentase perkurangan penderita gizi buruk/kurang gizi (%);
- 21) Tingkat perkembangan produk pertanian organik dan beras aromatik;
- 22) Tingkat perkembangan kawasan agrowisata;
- 23) Tingkat pelembagaan dan penerapan gender di tengah masyarakat;
- 24) Persentase orang miskin (%);
- 25) Persentase keluarga pra-sejahtera, sejahtera, sejahtera-1, sejahtera-1 plus (%);
- 26) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (satuan panti);
- 27) Jumlah regulasi/standar prosedur penanganan bencana alam.

## 2. Pengembangan Kualitas Manusia

- 1) Indeks pembangunan manusia;
- 2) Angka melek huruf (%);
- 3) Angka rata-rata lama sekolah (%);
- 4) Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 tahun (%);
- 5) Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 tahun (%);
- 6) Angka Partisipasi Murni Usia 16-18 tahun (%);
- 7) Angka Partisipasi Kasar Usia 7-12 tahun (%);
- 8) Angka Partisipasi Kasar Usia 13-15 tahun (%);
- 9) Angka Partisipasi Kasar Usia 16-18 tahun (%);
- 10) Tingkat Kelulusan UAN SD (%);
- 11) Tingkat Kelulusan UAN SMP (%);
- 12) Tingkat Kelulusan UAN SMA (%);
- 13) Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik (%);
- 14) Jumlah sekolah yang menjalankan manajemen berbasis sekolah dengan efektif (%);
- 15) Jumlah sekolah kejuruan dan sekolah bernilai plus;
- 16) Tingkat pemanfaatan perpustakaan kota;
- 17) Jumlah sarana perpustakaan di kelurahan;
- 18) Angka Harapan Hidup (Tahun);
- 19) Rate Kematian Bayi (/100 kelahiran);
- 20) Rate Kematian Ibu Melahirkan (/1.000 melahirkan);
- 21) Persentase penduduk berakses air bersih (%);
- 22) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%);
- 23) Persentase balita gizi-buruk (%);
- 24) Rasio puskesmas persatuan penduduk (x 1000);
- 25) Rasio posyandu persatuan balita;
- 26) Jumlah kelurahan siaga;
- 27) Persentase jumlah pasien luar Parepare yang dilayani di RS. Andi Makkasau;
- 28) Status rumah sakit Andi Makkasau;
- 29) Tingkat pertumbuhan penduduk (%);
- 30) Rate Kelahiran Total (kelahiran/perempuan);
- 31) Tingkat unmet-need (%);
- 32) Peserta KB laki-laki (%);
- 33) Jumlah kegiatan seni budaya (kegiatan/tahun);
- 34) Jumlah sarana/prasarana seni-budaya (unit);
- 35) Jumlah sarana/prasaran kepemudaan dan olah raga (unit);
- 36) Jumlah prestasi olah raga dan seni tingkat nasional;
- 37) Urutan Kota Parepare dalam Porseni Sulawesi Selatan;
- 38) Jumlah organisasi pemuda;
- 39) Jumlah pengunjung pada web-site/situs Pemda;
- 40) Jam siar Radio Pemda;
- 41) Indeks pembangunan gender;
- 42) Indeks pemberdayaan gender;



- 43) Jenis teknologi tepat guna yang berkembang di masyarakat;
- 44) Jumlah produk lokal.

### **3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan**

- 1) Panjang jaringan jalan dengan kondisi baik (km);
- 2) Panjang jaringan jalan dengan kondisi rusak (km);
- 3) Panjang saluran drainase dengan kondisi baik (km);
- 4) Panjang saluran drainase dengan kondisi rusak (km);
- 5) Jumlah jembatan dengan kondisi baik (unit);
- 6) Jumlah jembatan dengan kondisi rusak (unit);
- 7) Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik (unit);
- 8) Jumlah gorong-gorong dengan kondisi rusak (unit);
- 9) Kecukupan turap dan bronjong;
- 10) Rasio saluran air limbah dengan jumlah rumah tangga;
- 11) Ketercukupan saluran sanitasi untuk penyediaan air;
- 12) Ketercukupan sarana reservoir untuk penyediaan air;
- 13) Keberfungsian pompa distribusi untuk penyediaan air;
- 14) Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (km);
- 15) Panjang jaringan irigasi dalam kondisi buruk (km);
- 16) Ketersediaan sarana layak guna KIPAS;
- 17) Keberfungsian gedung olah raga;
- 18) Keberfungsian fasilitas kolam renang.
- 19) Ketertataan prasarana publik di sepanjang pantai.

### **4. Penataan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**

- 1) Prosentase luas ruang terbuka hijau dalam kota (%);
- 2) Jumlah kantor yang halamannya tertanami pohon dan memiliki taman (unit);
- 3) Jumlah sekolah (SD, SMP dan SMA) serta perguruan tinggi yang halamannya tertanami pohon dan memiliki taman (unit);
- 4) Jumlah sekolah/lembaga pendidikan yang berbasis lingkungan (outbond);
- 5) Prosentase rumah/gedung yang halamannya tertanami pohon dan memiliki taman (%);
- 6) Jumlah pohon yang ditanam ditepi jalan (pohon/ruas jalan);
- 7) Jumlah pohon yang ditanam di tebing sungai (pohon/panjang tebing);
- 8) Ketertataan batas fisik hutan kota dan hutan raya;
- 9) Luas dan keberadaan batas fisik hutan kawasan konservasi plasmanutfah;
- 10) Tingkat pemanfaatan hutan kawasan plasma nutfah;
- 11) Keberadaan kawasan agrowisata;
- 12) Keberadaan regulasi penanaman pohon;

- 13) Keberadaan kelompok/organisasi lingkungan masyarakat;
- 14) Persentase lokasi/kawasan bebas sampah;
- 15) Jumlah pusat pengkomposan sampah yang berfungsi (unit);
- 16) Jumlah unit daur ulang sampah yang berfungsi (unit);
- 17) Jumlah kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan (kegiatan);
- 18) Ketertataan trotoar jalan kota;
- 19) Ketertataan lampu penerangan jalan umum;
- 20) Ketertataan reklame dan baliho;
- 21) Ketertataan batas wilayah/daerah dan pintu gerbang kota;
- 22) Tingkat polusi udara;
- 23) Tingkat polusi limbah padat;
- 24) Tingkat polusi perairan;
- 25) Jumlah sumber air yang terkonversi dan terlindungi;
- 26) Luas areal dan jumlah pohon mangrove yang tertanam (pohon/ha);
- 27) Luas areal terumbu karang yang tertata dan terpelihara;
- 28) Luas lahan kritis yang mengalami rehabilitasi dan reboasasi (ha);
- 29) Tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder pembangunan atas perubahan iklim global.

## **5. Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kelembagaan Masyarakat**

- 1) Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan agama setiap kelurahan/ bulan;
- 2) Jumlah pendakwah/pembimbing agama (orang);
- 3) Jumlah majelis ta'lim;
- 4) Jumlah jemaah haji pertahun;
- 5) Jumlah jemaah umrah pertahun;
- 6) Jumlah zakat dan sedekah;
- 7) Efektivitas pengelolaan zakat dan sedekah;
- 8) Persentase anak bebas buta aksara Al-Quran (%);
- 9) Jumlah kegiatan dialog antar umat beragama;
- 10) Jumlah kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang melibatkan peran serta kelompok/organisasi keagamaan;
- 11) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (x 1000);
- 12) Jumlah kegiatan swadaya masyarakat;
- 13) Jumlah kelembagaan sosial-kemasyarakatan;
- 14) Jumlah kelembagaan dan organisasi sosial-politik;
- 15) Jumlah kelembagaan Baruga Sayang;
- 16) Jumlah kelurahan siaga;
- 17) Jumlah kelembagaan profesi, hobi dan minat;
- 18) Jumlah dan jenis produk lokal yang terpasarkan;
- 19) Jumlah dan jenis teknologi tepat guna yang berkembang.

## **6. Penguatan Tatakelola dan Kelembagaan Pemerintah**

- 1) Peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan;

- 2) Tingkat perbaikan metode rekrutmen dalam menduduki jabatan;
- 3) Ketersediaan data dasar dan data pencapaian pembangunan setiap tahun;
- 4) Persentase gender dalam jabatan publik;
- 5) Persentase program/kegiatan SKPD yang konsisten dengan dokumen RPJPD dan RPJMD;
- 6) Efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan terhadap rencana tahunan dan lima tahunan;
- 7) Persentase SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyektif dan tepat waktu (%);
- 8) Persentase SKPD yang melaporkan kinerja keuangannya secara obyektif dan tepat waktu (%);
- 9) Persentase peningkatan tindak lanjut LHP APFP;
- 10) Keberadaan regulasi pelayanan;
- 11) Persentase SKPD yang standar pelayanan minimalnya efektif berjalan;
- 12) Jumlah unit layanan publik yang bersifat satu pintu dan memiliki SOP;
- 13) Jumlah pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani pada unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- 14) Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam penyusunan kebijakan publik;
- 15) Jumlah kewenangan dan efektivitas kewenangan yang dijalankan pemerintah kecamatan;
- 16) Tingkat efektivitas pemerintahan kelurahan;
- 17) Jumlah ranperda yang disusun melalui pendekatan partisipatif;
- 18) Persentase Ranperda yang disahkan menjadi perda dalam setahun (%);
- 19) Persentase Perda yang dijalankan secara efektif (%);
- 20) Persentase pelanggaran Perda (%);
- 21) Tingkat keberlakuan sistem penentuan pagu indikatif dalam penetapan anggaran;
- 22) Jumlah kerjasama dengan pemerintah hinterland Parepare;
- 23) Jumlah kerjasama dengan donor;
- 24) Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Periode berlakunya RPJMD ini adalah 2008-2013. Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan serta menghindari terjadinya kekosongan perencanaan, diperlukan sebuah pedoman pada periode transisi pergantian Walikota Parepare pada tahun 2013.

Pada periode sebelum efektifnya Walikota dan Wakil Walikota 2013 terpilih untuk menyusun RPJMD 2013-2018, maka pemerintah daerah dapat menyusun RKPD pada periode transisi tersebut dengan fokus pada penyelesaian kebijakan/program 2008-2013 yang belum tertangani tuntas serta merespon masalah-masalah pembangunan yang berkembang pada tahun 2013 itu sendiri.

Pada satu tahun periode transisi setelah 2013 hingga dilantiknya Walikota terpilih, pembangunan Kota Parepare tetap mengacu pada sembilan kebijakan umum pembangunan yakni: (1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan; (2) Pengembangan Kualitas Manusia; (3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan; (4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan; (5) Pengembangan Kehidupan Beragama dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat; (6) Perbaikan Tatakelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan.

Fokus dari kegiatan dan program yang diprioritaskan pada periode transisi tersebut adalah: 1. kegiatan dan program dalam RPJMD 2008-2013 ini yang pencapaiannya paling tertinggal dalam mencapai sasaran yang ditargetkan untuk masing-masing kebijakan umum; 2. kegiatan dan program dalam RPJMD 2008-2013 ini yang sifatnya menunjang secara substansial keberlanjutan pelayanan dan pemerintahan; 3. kegiatan dan program dalam RPJMD 2008-2013 ini yang sifatnya menunjang prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional pada saat itu.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan dalam pengelolaan kegiatan dan program demi terwujudnya sasaran, tujuan dan visi pembangunan Kota Parepare.

RPJMD Kota Parepare merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik dunia pemerintah, swasta maupun masyarakat secara sinergis dan kolaboratif. Pedoman tersebut tidak hanya tentang arah yang akan dituju tetapi juga tentang cara untuk mengarah ke tujuan tersebut. Untuk itu, terdapat sejumlah kaidah untuk diikuti sebagai berikut.

1. Pemangku kepentingan di Kota Parepare dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat berkewajiban mengupayakan pencapaian visi, tujuan, dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintah Kota Parepare menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMD ini sebagai dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD Kota Parepare.
3. SKPD Kota Parepare wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMD ini, sebagai dokumen perencanaan lima tahun bagi SKPD tersebut. Selanjutnya SKPD membuat penjabarannya kedalam Rencana Kerja Anggaran-SKPD (RKA-SKPD).
4. Masyarakat dan dunia usaha memiliki ruang untuk berperan serta dan berkontribusi bagi pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui prakarsa, swadaya dan partisipasinya dalam pembangunan Kota Parepare. Peran serta masyarakat dan dunia usaha mencakup pada tahap perencanaan, implementasi, monitoring maupun evaluasi dari berbagai upaya pembangunan yang berjalan. Selain itu, masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai ruang untuk terlibat dalam perumusan sejumlah kebijakan dan regulasi daerah.
5. Setiap akhir tahun seluruh SKPD pada lingkup Kota Parepare wajib melakukan evaluasi atas setiap kegiatan dan program yang dijalankannya, baik evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan/program, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan peraturan terkait.
6. Pada sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan/program, setiap SKPD wajib melakukan monitoring untuk melihat kesesuaian implementasi dengan perencanaan serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan/program.
7. Selain evaluasi tahunan, juga diperlukan monitoring dan evaluasi yang melihat konsistensi arah penyelenggaraan program dan kegiatan terhadap visi, tujuan dan sasaran lima tahunan yang akan diwujudkan pada 2013. Proses ini dilaksanakan oleh Bappeda.

**WALIKOTA PAREPARE,**

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**